



AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Grace Tianna Solovida | Bambang Arianto | Sri Mulyani
Rikah | Khairina Nur Izzaty | Prawita Yani | Muchlis
Payamta | Nur Fadjrih Asyik | Musviyanti | Deviana Sari
Amir Hamzah | Sofyan Anshori | Anita Wijayanti
Imanita Septian Rusdianti



Editor: Dr. Luhglatno, S.E., M.M., M.Si.

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Perubahan iklim yang telah mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia menciptakan berbagai bentuk kepedulian seperti lahirnya topik akuntansi keberlanjutan. Dampaknya topik akuntansi keberlanjutan telah menjadi salah satu topik krusial dan banyak diperbincangkan oleh berbagai entitas bisnis dan publik. Akuntansi keberlanjutan menjadi wadah utama dari topik turunan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Akuntansi keberlanjutan kemudian banyak menciptakan istilah akuntansi hijau, akuntansi ekologi, akuntansi lingkungan, akuntansi keanekaragaman hayati dan masih banyak istilah baru yang linier dengan topik keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga menjadi pedoman bagi korporasi bisnis untuk segera beradaptasi dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Hal itu bisa dilacak dari kemunculan berbagai bentuk laporan keberlanjutan yang mulai banyak digunakan oleh mayoritas korporasi untuk menegaskan citra positif. Akuntansi keberlanjutan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan korporasi dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan kehidupan manusia. Berbagai elaborasi dari perkembangan keilmuan akuntansi keberlanjutan akan disajikan dalam buku ini secara komprehensif oleh para penulis yang ahli dalam bidangnya.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa yang ingin mendalami dan memahami akuntansi keberlanjutan. Buku ini juga mengelaborasi tentang topik-topik terkini dari keilmuan akuntansi keberlanjutan beserta. Terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca untuk mengenal secara komprehensif tentang akuntansi keberlanjutan.

Sementara dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi:

- Bab 1. Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan
- Bab 2. Prinsip Dasar Akuntansi Keberlanjutan
- Bab 3. Standar Akuntansi Keberlanjutan
- Bab 4. Pengukuran Kinerja Keberlanjutan
- Bab 5. Pengungkapan dan Pelaporan Keberlanjutan
- Bab 6. Akuntansi Karbon dan Emisi Gas Rumah Kaca
- Bab 7. Akuntansi Sosial dan Dampak Sosial Perusahaan
- Bab 8. Akuntansi Lingkungan dan Konservasi Biodiversitas
- Bab 9. Keuangan Berkelanjutan dan Nilai Perusahaan
- Bab 10. Akuntansi untuk Rantai Pasokan Berkelanjutan
- Bab 11. Etika dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Akuntansi Berkelanjutan
- Bab 12. Akuntansi Hijau dan Praktik Berkelanjutan
- Bab 13. Pengelolaan Risiko Berkelanjutan
- Bab 14. Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Publik Terhadap Akuntansi Keberlanjutan
- Bab 15. Tantangan dan Peluang Masa Depan Akuntansi Keberlanjutan

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Dr. Grace Tianna Solovida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Sri Mulyani, S.El., M.Si.

Rikah, S.E., M.Si.

Khairina Nur Izzaty, S.E., M.Si., Akt.

Prawita Yani, S.E., M.Ak.

Dr. Muchlis, S.E., M.MT.

**Dr. Payamta, CPA., M.Si., Ak. CA., CPI., CGRPCA., CRA., CRP.,
Asean CPA.**

Prof. Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dr. Hj. Musviyanti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA., CSP.

Deviana Sari, S.E., M.S.Ak., CSRS.

Amir Hamzah, S.E., M.Si.

Sofyan Anshori S.E., Ak., CA., M.M.

Anita Wijayanti, S.E., M.M., Akt., CA.

Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

- Penulis** : Dr. Grace Tianna Solovida, S.E., M.Si., Ak., CA.
Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.
Sri Mulyani, S.EI., M.Si.
Rikah, S.E., M.Si.
Khairina Nur Izzaty, S.E., M.Si., Akt.
Prawita Yani, S.E., M.Ak.
Dr. Muchlis, S.E., M.MT.
Dr. Payamta, CPA., M.Si., Ak. CA., CPI.,
CGRPCA., CRA., CRP., Asean CPA.
Prof. Dr. Nur Fadrijih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.
Dr. Hj. Musviyanti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA.,
CSP.
Deviana Sari, S.E., M.S.Ak., CSRS.
Amir Hamzah, S.E., M.Si.
Sofyan Anshori S.E., Ak., CA., M.M.
Anita Wijayanti, S.E., M.M., Akt., CA.
Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.
- Editor** : Dr. Luhgiatno, S.E., M.M., M.Si.
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Herlina Sukma
- ISBN** : 978-623-120-710-4
- No. HKI** : EC00202441324

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Keberlanjutan.

Akuntansi keberlanjutan menjadi topik krusial bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa akuntansi agar bisa menciptakan keseimbangan dalam tata kelola korporasi. Selama ini entitas bisnis bergerak dengan orientasi pada profit yang kemudian mengesampingkan dampak lingkungan dan sosial. Dampaknya banyak terjadi permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas produksi suatu entitas bisnis. Geliat ini tentu menciptakan berbagai ancaman bagi keberlangsungan manusia dan juga lingkungan hidup. Fakta demikian semakin menegaskan bahwa suatu entitas bisnis sudah waktunya untuk memikirkan tata kelola yang lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Berbagai standar dan pedoman telah diterapkan agar entitas bisnis harus peduli dengan dampak lingkungan dan sosial. Dengan kepedulian ini tentu akan membuat citra positif entitas bisnis semakin berpihak kepada publik dan bukan kepada orientasi profit. Buku ini kemudian ingin mengelaborasi berbagai langkah taktis dari topik akuntansi keberlanjutan yang sangat penting bagi masa depan suatu entitas bisnis.

Pembahasan dalam buku ini sangat komprehensif, karena dimulai dari konsep, prinsip dan standar akuntansi keberlanjutan, pengukuran kinerja keberlanjutan, pengungkapan dan pelaporan keberlanjutan, akuntansi karbon, akuntansi sosial, akuntansi lingkungan dan keanekaragaman hayati, etika dan tanggung jawab serta ditutup dengan tantangan dan peluang masa depan akuntansi keberlanjutan. Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif.

Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan keilmuan akuntansi keberlanjutan di Indonesia, sekaligus bermanfaat bagi publik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Purbalingga, April 2024

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Dr. Grace Tianna Solovida, S.E., M.Si., Ak., CA....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Dasar Akuntansi Keberlanjutan	4
C. Bagaimana Akuntansi dapat Menjadi Alat untuk Mengukur dan Mencatat Keberlanjutan	5
D. Peran Akuntansi dalam Konteks Keberlanjutan	7
E. Akuntansi sebagai Sarana Pelaporan Kinerja Sosial dan Ekonomi.....	8
F. Prinsip Dasar Akuntansi Keberlanjutan	10
G. Relevansi Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan.....	12
H. Dampak Positif Akuntansi Keberlanjutan Terhadap Pemangku Kepentingan.....	13
I. Tantangan dan Peluang	14
J. Penutup	16
DAFTAR PUSTAKA	18
TENTANG PENULIS	20
BAB 2 PRINSIP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Prinsip Dasar Akuntansi Keberlanjutan	24
C. Prinsip Dasar untuk Penentuan Konten Laporan Keberlanjutan.....	30
D. Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA	36
TENTANG PENULIS	38
BAB 3 STANDAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Sri Mulyani, S.El., M.Si.	39
A. Pendahuluan.....	39
B. <i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	40
C. <i>Sustainability Accounting Standards Board (SASB)</i>	45

D. <i>Task Force on Climate-related Financial Disclosures</i> (TCFD).....	47
E. Penutup.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
TENTANG PENULIS	58
BAB 4 PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN	
Oleh : Rikah, S.E., M.Si.....	59
A. Pendahuluan	59
B. Teori-Teori Pengukuran Kinerja	60
C. Berkelanjutan	61
D. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	64
E. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
TENTANG PENULIS	68
BAB 5 PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN	
Oleh : Khairina Nur Izzaty, S.E., M.Si., Akt.....	69
A. Pendahuluan	69
B. Definisi dan Tujuan Pengungkapan	71
C. Pengungkapan Keberlanjutan	73
D. Definisi dan Tujuan Pelaporan.....	78
E. Pelaporan Keberlanjutan.....	79
F. Pengungkapan dan Pengungkapan Keberlanjutan Berdasarkan GRI.....	83
G. Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
TENTANG PENULIS	91
BAB 6 AKUNTANSI KARBON DAN EMISI GAS RUMAH KACA	
Oleh : Prawita Yani, S.E., M.Ak.....	92
A. Pendahuluan	92
B. Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	92
C. Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca	95
D. Akuntansi Karbon	97
E. Standar Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca	100
F. Penutup.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

	TENTANG PENULIS	104
BAB 7	AKUNTANSI SOSIAL DAN DAMPAK SOSIAL PERUSAHAAN	
	Oleh : Dr. Muchlis, S.E., M.MT.....	105
	A. Pendahuluan.....	105
	B. Akuntansi Sosial.....	106
	C. Mengukur Dampak Akuntansi Sosial.....	107
	D. Pelaporan Akuntansi Sosial.....	107
	E. Penerapan Akuntansi Sosial di Indonesia	108
	F. Peran Akuntansi Sosial dalam Pengungkapan di Indonesia	110
	G. Kesimpulan	111
	DAFTAR PUSTAKA	112
	TENTANG PENULIS	113
BAB 8	AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN KONSERVASI BIODIVERSITAS	
	Oleh : Dr. Payamta, CPA., M.Si., Ak. CA., CPI, CGRPCA., CRA., CRP., Asean CPA.	114
	A. Definisi Akuntansi Lingkungan dan Biodiversitas ...	114
	B. Tujuan Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Biodiversitas.....	117
	C. Penutup	151
	DAFTAR PUSTAKA	153
	TENTANG PENULIS	154
BAB 9	KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN NILAI PERUSAHAAN	
	Oleh : Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.....	155
	A. Pendahuluan.....	155
	B. Manfaat Keuangan Kerkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	157
	C. Tantangan Keuangan Kerkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	159
	D. Langkah-Langkah menuju Keuangan Keberlanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	160

E. Penerapan Keuangan Keberlanjutan (<i>Sustainable Finance</i>) dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI).....	166
F. Kaitan antara Keuangan Keberlanjutan (<i>Sustainable Finance</i>) dengan Nilai Perusahaan	168
G. Kesimpulan	170
DAFTAR PUSTAKA.....	171
TENTANG PENULIS	173
BAB 10 AKUNTANSI UNTUK RANTAI PASOKAN BERKELANJUTAN	
Oleh : Dr. Hj. Musviyanti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA., CSP.....	174
A. Pendahuluan	174
B. Konsep Rantai Pasokan Berkelanjutan.....	176
C. Akuntansi Rantai Pasokan Berkelanjutan.....	181
D. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Rantai Pasokan Berkelanjutan.....	186
E. Kesimpulan	190
DAFTAR PUSTAKA.....	191
TENTANG PENULIS	193
BAB 11 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Deviana Sari, S.E., M.S.Ak., CSRS.....	194
A. Pendahuluan	194
B. Konsep Etika dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Akuntansi Keberlanjutan	195
C. Etika dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Sustainability Report.....	199
D. Kesimpulan	201
DAFTAR PUSTAKA.....	202
TENTANG PENULIS	203
BAB 12 AKUNTANSI HIJAU DAN PRAKTIK KEBERLANJUTAN	
Oleh : Amir Hamzah, S.E., M.Si.	204
A. Akuntansi Hijau	204
B. Praktik Keberlanjutan dalam Akuntansi.....	210
C. Implikasi Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis.....	216

DAFTAR PUSTAKA	219
TENTANG PENULIS	221
BAB 13 PENGELOLAAN RISIKO BERKELANJUTAN	
Oleh : Sofyan Anshori S.E., Ak., CA., M.M.	222
A. Pendahuluan.....	222
B. Kategori risiko	242
C. Mitigasi Risiko	243
DAFTAR PUSTAKA	245
TENTANG PENULIS	246
BAB 14 PENGARUH REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	
TERHADAP AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Anita Wijayanti, S.E., M.M., Akt., CA.....	247
A. Pendahuluan.....	247
B. Peran Kritis Pemerintah dalam Mendorong	
Pengungkapan Akuntansi Keberlanjutan.....	250
C. Regulasi dan kebijakan Public sebagai Pendorong	
Implementasi Akuntansi Keberlanjutan	252
D. Masa Depan Akuntansi Keberlanjutan di bawah	
Dampak Regulasi dan Kebijakan Publik	254
E. Kesimpulan	256
DAFTAR PUSTAKA	258
TENTANG PENULIS	259
BAB 15 TANTANGAN DAN PELUANG MASA DEPAN	
DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
Oleh : Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.	260
A. Pendahuluan.....	260
B. Tantangan dan Peluang Akuntansi Keberlanjutan	261
C. Kesimpulan	272
DAFTAR PUSTAKA	274
TENTANG PENULIS	275

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Dasar Acuan Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia.....	81
Gambar 6.1	Produksi emisi gas rumah kaca terhadap atmosfer bumi.....	93
Gambar 6.2	Bagian emisi gas rumah kaca dari laporan keberlanjutan PT Unilever, Tbk.	97
Gambar 6.3	Metode reduksi karbon bagi entitas bisnis.....	98
Gambar 6.4	Rancangan sistem akuntansi dan pelaporan emisi Karbon.....	99
Gambar 6.5	Struktur sistem akuntansi dan kuantifikasi pelaporan emisi karbon	99
Gambar 9.1	Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia	162
Gambar 9.2	Taksonomi Hijau Indonesia untuk Keuangan Berkelanjutan.....	167
Gambar 10.1	Kategori dan Praktik Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan.....	177
Gambar 10.2	Pengungkapan Rantai Pasok pada Laporan Keberlanjutan	187
Gambar 10.3	Pengungkapan Dimensi Lingkungan Rantai Pasokan Berkelanjutan	188
Gambar 10.4	Pengungkapan Dimensi Sosial Rantai Pasokan Berkelanjutan.....	189

DAFTAR TABEL

Tabel 9.1 Prinsip-Prinsip Kesadaran Keberlanjutan	163
---	-----

BAB

1

KONSEP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Dr. Grace Tianna Solovida, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan bisnis kontemporer, persepsi terhadap keberlanjutan telah mengalami evolusi yang signifikan. Peningkatan kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan membuat perusahaan semakin dihadapkan pada tantangan keberlanjutan. Dalam konteks ini, peran akuntansi menjadi semakin relevan sebagai alat untuk menyampaikan informasi keuangan yang mencerminkan kinerja berkelanjutan dan memenuhi tuntutan *stakeholders* terkait keberlanjutan. Buku ini akan mengeksplorasi konsep dasar akuntansi keberlanjutan dan strategi akuntansi merespon tantangan keberlanjutan dalam dunia bisnis saat ini.

1. Evolusi Persepsi Keberlanjutan dalam Konteks Bisnis

Evolusi akuntansi keberlanjutan dari masa lalu hingga saat ini telah mengalami perkembangan. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen pada tahun 1953. Praktik akuntansi keberlanjutan tidak hanya menjadi instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan tiga lingkaran tanggung jawab yaitu; dalam, tengah, dan luar organisasi. Pentingnya

mempertimbangkan semua aspek dalam praktik akuntansi keberlanjutan seperti aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*), serta penambahan aspek spiritualitas (*prophet*) dan fenoteknologi (*pehnotechnology*)—ditekankan dalam evolusi persepsi keberlanjutan dalam konteks bisnis (GRI, 2013) (Aziza & Sukoharsono, 2021).

Pada awalnya, disebut dengan akuntansi sosial lingkungan (Gray *et al.*, 1996) setelah diterapkan oleh para pelaku bisnis pada perkembangannya menjadi akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*). Evolusi persepsi keberlanjutan dalam konteks bisnis mencerminkan perubahan pandangan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Keberlanjutan kemudian dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau sekadar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, paradigma ini kemudian berubah. Persepsi keberlanjutan kini dianggap sebagai peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang, meningkatkan daya saing, dan memperkuat reputasi perusahaan. Banyak entitas bisnis menyadari bahwa praktik berkelanjutan dapat mengurangi risiko, mengoptimalkan biaya operasional, dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial.

Dalam evolusi ini, sektor bisnis mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis, termasuk dalam rantai pasok, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan produk. Konsep *circular economy*, penggunaan energi terbarukan, serta inklusi sosial menjadi fokus penting. Investor juga semakin menilai kinerja keberlanjutan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, evolusi ini menciptakan suatu paradigma yang menyatakan bukan hanya menjalankan tanggung jawab sosial, tetapi juga mengadopsi keberlanjutan sebagai satu pilar strategis. Pilar ini kemudian yang membentuk visi dan misi perusahaan

untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan harmoni dengan lingkungan serta masyarakat.

2. Relevansi Akuntansi dalam Menanggapi Tantangan Keberlanjutan

Menurut Zyznarska-Dworczak (2020), akuntansi memiliki peran penting dalam menanggapi isu keberlanjutan. Dalam konteks *sustainability accounting*, akuntansi dapat digunakan untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam hal ini, akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkelanjutan. Selain itu, akuntansi juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan keberlanjutan. Oleh karena itu, Zyznarska-Dworczak (2020) ini menekankan pentingnya pengembangan *sustainability accounting* sebagai bagian dari akuntansi dalam menanggapi tantangan keberlanjutan.

Sementara itu Taïbi & Antheaume (2020) menyatakan bahwa pendekatan intervensi berbasis penelitian digunakan untuk mengembangkan alat akuntansi untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitiannya menyoroti kesulitan dalam mengoperasikan modal sosial, lingkungan dan ekonomi serta menunjukkan hasil yang menunjukkan "ketidakberlanjutan". Selain itu, telah teridentifikasi bahwa alat akuntansi yang dirancang untuk keberlanjutan memberikan laporan tentang ketidakberlanjutan dan karakteristik yang memengaruhi kemungkinan adopsi oleh organisasi. Hasil penelitian Taïbi & Antheaume, (2020) tersebut telah memberikan wawasan yang mendalam tentang peran akuntansi dalam merespon tantangan keberlanjutan dengan mencoba mengoperasikan

pembangunan berkelanjutan dalam alat akuntansi, mengidentifikasi hambatan dan konsekuensinya.

B. Definisi Dasar Akuntansi Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam bahasa Inggris disebut "sustainability" yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan suatu kondisi atau proses dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks lingkungan dan pembangunan, keberlanjutan sering kali mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, keberlanjutan mencakup keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Dalam konteks bisnis, keberlanjutan sering kali merujuk pada praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta mampu bertahan dalam jangka panjang (Ozili, 2021).

Akuntansi keberlanjutan dijelaskan oleh Zyznarska-Dworczak (2020) adalah suatu sistem terintegrasi bagi pengukuran keuangan dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Akuntansi keberlanjutan mengumpulkan, merekam, memproses, menganalisis, dan melaporkan informasi (biasanya informasi keuangan) yang terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja seimbang perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan, yaitu mempertahankan keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan dan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian akuntansi keberlanjutan juga dianggap sebagai cabang akuntansi yang memerlukan organisasi untuk memperhatikan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan mengungkapkan informasi non-keuangan tentang organisasi (Ozili, 2021).

C. Bagaimana Akuntansi dapat Menjadi Alat untuk Mengukur dan Mencatat Keberlanjutan

Akuntansi memiliki peran krusial dalam mengukur dan mencatat keberlanjutan suatu entitas. Konsep dasar akuntansi keberlanjutan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi dalam kegiatan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan, entitas dapat menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan terukur tentang dampak positif atau negatif yang dihasilkan oleh operasional bisnis. Sebagai contoh, pengukuran kinerja keberlanjutan dapat mencakup pencatatan emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, dan kebijakan karyawan yang mendukung keberlanjutan.

Menurut Cantele *et al.*, (2018), terdapat beberapa alat pengukuran dan pencatatan kinerja keberlanjutan yang dapat digunakan oleh perusahaan, antara lain:

1. *Sustainability Reporting*: Pelaporan keberlanjutan merupakan alat utama untuk mencatat kinerja keberlanjutan perusahaan. Hal ini mencakup penyusunan laporan keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan informasi para pemangku kepentingan tentang kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan.
2. *Environmental Management Systems (EMS)*: Sistem Manajemen Lingkungan seperti ISO 14001 dan EMAS dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mencatat kinerja lingkungan suatu perusahaan.
3. *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*: Standar GRI menyediakan kerangka kerja pelaporan yang terperinci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait isu-isu keberlanjutan.
4. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*: SASB menyediakan kerangka kerja akuntansi dan pelaporan yang memperbaiki transparansi perusahaan terkait isu-isu keberlanjutan.

Di Indonesia, standar akuntansi dan pelaporan keberlanjutan diatur oleh beberapa lembaga dan organisasi, antara lain:

1. *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Di Indonesia, GRI telah digunakan oleh beberapa perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan.
2. *Sustainability Reporting Guidelines for Publicly Listed Companies*. Pada tahun 2012, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan panduan pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Panduan ini mengacu pada standar GRI dan mendorong perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara transparan dan konsisten.
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah lembaga akuntansi yang mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. IAI telah mengeluarkan beberapa standar akuntansi yang terkait dengan isu-isu keberlanjutan, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan SAK 2 tentang Laporan Keuangan Interim.
4. *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. IICD adalah lembaga yang mengembangkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia. IICD telah mengeluarkan beberapa panduan dan pedoman terkait dengan pelaporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi standar akuntansi dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelaporan keberlanjutan, serta kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang transparan dan konsisten.

D. Peran Akuntansi dalam Konteks Keberlanjutan

Pramasita *et al.*, (2022) membahas tentang akuntansi lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan dalam pengungkapan simbolik dan substantif, yang relevan dengan konteks keberlanjutan. Hal ini berkaitan dengan kontribusi akuntansi dalam mengelola dampak lingkungan. Terlebih akuntansi lingkungan merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan informasi lingkungan dalam upaya mencapai keberlanjutan. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Dalam mengelola dampak lingkungan, perusahaan perlu melakukan pengukuran dan pengungkapan informasi lingkungan secara transparan dan akurat agar dapat memperoleh kepercayaan bisnis dan mempertahankan legitimasi perusahaan dalam konteks keberlanjutan. Akuntansi lingkungan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola dampak lingkungan dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, sehingga membantu perusahaan untuk mempertahankan praktik yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Unerman *et al.*, (2018) menjelaskan kontribusi akuntansi dalam mengelola dampak lingkungan dengan menyoroti pentingnya akuntansi keberlanjutan memainkan peran penting dalam membantu organisasi mengelola dampak lingkungan secara efektif untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan dari kegiatan operasional bisnis.
2. Melaporkan informasi yang relevan mengenai dampak lingkungan kepada para pemangku kepentingan.
3. Mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan manajerial.

4. Mengelola risiko lingkungan dan memperbaiki kinerja lingkungan melalui tindakan perbaikan yang didasarkan pada informasi akuntansi keberlanjutan.

E. Akuntansi sebagai Sarana Pelaporan Kinerja Sosial dan Ekonomi

Akuntansi keberlanjutan dapat membantu organisasi dalam menghitung dan melaporkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari kegiatan kepada publik. Akuntansi keberlanjutan dapat membantu organisasi dalam memisahkan atau isolasi informasi antara pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan, serta antara isolasi informasi dalam pelaporan keberlanjutan itu sendiri (Unerman *et al.*, 2018).

Masih menurut Unerman *et al.*, (2018), isolasi informasi dalam konteks pelaporan keuangan dan keberlanjutan merujuk pada pemisahan atau isolasi informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan yang diproduksi oleh organisasi. Dalam banyak kasus, informasi keuangan dan non-keuangan diproduksi oleh departemen yang berbeda dan tidak saling terintegrasi, sehingga sulit untuk memahami hubungan antara kinerja keuangan dan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi. Pemisahan ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk memahami dampak penuh dari kegiatan bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memecahkan isolasi informasi antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan untuk memungkinkan informasi yang lebih terintegrasi dan holistik.

Sementara Pramasita *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa melalui pengungkapan informasi lingkungan, memungkinkan perusahaan untuk melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi terkait dengan aspek lingkungan. Aspek tersebut meliputi upaya perlindungan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan dampak

lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Masih menurut Pramasita *et al.*, (2022), akuntansi lingkungan dapat memberikan pengungkapan simbolik dan substantif merujuk pada dua pendekatan yang berbeda dalam melaporkan informasi lingkungan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut terdiri dari:

- a. Pengungkapan Simbolik: Pengungkapan simbolik cenderung fokus pada aspek kualitatif dan naratif dalam melaporkan informasi lingkungan. Perusahaan yang menggunakan pendekatan simbolik sering kali menekankan pada strategi, tujuan, dan tindakan perlindungan lingkungan secara deskriptif, namun dengan data kuantitatif yang terbatas. Pendekatan ini sering digunakan untuk menciptakan citra positif perusahaan terkait dengan isu lingkungan, untuk mendapatkan kepercayaan publik, dan untuk memperoleh sumber daya serta konsolidasi pengaruh dengan para pemangku kepentingan.
- b. Pengungkapan Substantif: Di sisi lain, pengungkapan substantif melibatkan penyajian informasi lingkungan yang lebih terperinci dan terukur, termasuk data kuantitatif yang signifikan. Perusahaan yang menggunakan pendekatan substantif cenderung fokus pada tindakan nyata yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti produksi tanpa limbah, kontrol polusi, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan terukur terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan.

Penjelasan yang lebih sederhana dapat dinyatakan bahwa pengungkapan simbolik lebih menekankan pada aspek deskriptif dan citra, sedangkan pengungkapan substantif lebih menekankan pada tindakan nyata dan data terukur terkait dengan dampak lingkungan perusahaan.

F. Prinsip Dasar Akuntansi Keberlanjutan

1. Prinsip Materialitas dalam Pengukuran dan Pelaporan Keberlanjutan

Panduan GRI terpilih sebagai kerangka kerja pelaporan yang paling bermanfaat, paling kredibel, dan disukai perusahaan dan organisasi, disamping CDP dan DJSI (GRI, 2013). Laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan GRI (OJK, 2017). *GRI Standards* adalah standar global untuk pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI Standards menggantikan GRI G4 *Guidelines* dan mencakup 36 standar yang terdiri dari 33 standar inti dan 3 standar tambahan. Standar inti mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan standar tambahan mencakup hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, dan rantai pasokan dan pengaruhnya terhadap lingkungan. GRI Standards dirancang untuk membantu organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan yang lebih terfokus, relevan, dan transparan. Standar ini juga memungkinkan perbandingan antara laporan keberlanjutan dari berbagai organisasi, karena standar ini mencakup indikator yang sama untuk setiap aspek. GRI Standards juga menekankan pentingnya prinsip materialitas dalam penentuan aspek yang akan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.

Mazelfi (2018) menjelaskan bahwa prinsip materialitas dalam pengukuran dan pelaporan keberlanjutan merupakan konsep yang diterapkan dalam proses penentuan aspek yang akan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Prinsip ini memungkinkan pelapor untuk memilih aspek material yang akan diungkapkan, dengan meminimalisir pengungkapan aspek yang dianggap tidak material. Hal ini dilakukan melalui penilaian oleh penyusun terhadap masing-masing aspek relevan. Proses penilaian ini memberikan kesempatan bagi pelapor untuk fokus pada aspek yang dianggap

material, sehingga laporan keberlanjutan dapat menjadi lebih terfokus dan lebih pendek, tanpa mengurangi informasi penting yang harus diketahui oleh pembaca.

Studi yang dilakukan oleh Daromes *et al.*, (2023) bertujuan untuk menganalisis pengungkapan aspek materialitas dalam laporan keberlanjutan beberapa perusahaan di Indonesia pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam kelengkapan data mengenai aktivitas sosial, lingkungan dan ekonomi yang diungkap sebagai topik material dalam laporan keberlanjutan, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pedoman yang sama, yaitu GRI Standards. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman yang sama, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam mengungkapkan aspek materialitas baik dari segi penyampaian maupun kelengkapan informasi. Penelitian tersebut telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi aspek materialitas diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia, serta implikasinya terhadap praktik pelaporan keberlanjutan dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan di Indonesia, dan memberikan kontribusi penting dalam memperjelas topik mana yang relevan dan memerlukan tingkat pengembangan yang lebih tinggi dalam laporan keberlanjutan, serta memberikan wawasan bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keberlanjutan.

2. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Konteks Bisnis Berkelanjutan

Gil-Marín *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting dalam konteks bisnis berkelanjutan. Prinsip keterbukaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk melaporkan secara terbuka dan transparan tentang tindakan keberlanjutan dan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks bisnis berkelanjutan, prinsip keterbukaan memungkinkan

perusahaan untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, seperti investor dan konsumen.

Pengungkapan informasi lingkungan, baik dalam bentuk simbolik maupun substantif, merupakan wujud dari keterbukaan perusahaan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang upaya perlindungan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak lingkungan yang dihasilkan, perusahaan menunjukkan keterbukaan terhadap para pemangku kepentingan terkait isu lingkungan. Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan juga mencerminkan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, perusahaan bisa menunjukkan tanggung jawabnya terhadap publik terkait dengan aspek lingkungan dari bisnis yang dijalankan (Pramasita *et al.*, 2022). Sementara, prinsip akuntabilitas mengacu pada kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas operasi. Dalam konteks bisnis berkelanjutan, prinsip akuntabilitas memungkinkan perusahaan untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerjanya dalam hal keberlanjutan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

G. Relevansi Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan

Mengapa Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan Penting untuk Perusahaan

Konsep dasar akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan dalam mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi bisnis. Dengan menggunakan akuntansi keberlanjutan, perusahaan dapat mengukur, melaporkan, dan memantau kinerjanya dalam konteks keberlanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan bisa mengidentifikasi area yang

dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal keberlanjutan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, akuntansi keberlanjutan juga membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutan serta dalam memenuhi tuntutan dari para pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, dan regulator, yang semakin menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Gil-Marín *et al.*, 2022).

Sejalan dengan pendapat Gil-Marín *et al.*, (2022) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, akuntansi keberlanjutan secara sukarela digunakan perusahaan untuk mematuhi aturan pemerintah terkait dengan lingkungan atas operasi perusahaan. Akuntansi keberlanjutan memiliki manfaat dalam mendeteksi biaya lingkungan, mengelola biaya tersebut secara terpisah, memberikan informasi tentang cara mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan serta mendukung sistem manajemen lingkungan. Manfaat pemasaran dan prospek bagi pihak eksternal, seperti mengurangi risiko, memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan menciptakan citra positif perusahaan dalam meningkatkan laba menjadi alasan kuat mengapa akuntansi keberlanjutan penting bagi perusahaan (Idrawahyuni *et al.*, 2020). Hal ini semakin memberikan gambaran yang jelas, bahwa akuntansi keberlanjutan sangat penting baik dari segi tanggung jawab sosial dan lingkungan, maupun dari segi manfaat operasional dan pemasaran perusahaan.

H. Dampak Positif Akuntansi Keberlanjutan Terhadap Pemangku Kepentingan

Menurut Gil-Marín *et al.*, (2022), akuntansi keberlanjutan memiliki dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan.

Akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan dalam melaporkan tindakan keberlanjutan dan hasilnya secara

terbuka dan transparan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

b. Meningkatkan Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan.

Dengan melaporkan tindakan keberlanjutan dan hasilnya secara terbuka dan transparan, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor dan konsumen.

c. Meningkatkan Reputasi Perusahaan.

Akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik dengan menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

d. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Operasional.

Dengan mengukur dan memantau kinerja keberlanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi area mana saja yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis.

e. Meningkatkan Akses ke Modal.

Perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan yang baik dapat menarik investor yang lebih banyak dan mendapatkan akses ke modal yang lebih mudah.

I. Tantangan dan Peluang

1. Tantangan Utama dalam Mengimplementasikan Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan

Mengimplementasikan konsep dasar akuntansi keberlanjutan menjadi sebuah tantangan utama dalam era ketidakpastian lingkungan dan tuntutan tanggung jawab sosial korporat yang semakin meningkat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pedoman dan standar yang konsisten dalam mengukur kinerja keberlanjutan secara akuntabel. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menentukan parameter yang objektif untuk mencerminkan

dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi perusahaan secara holistik. Selain itu, ketidaktransparanan dan kurangnya laporan keberlanjutan yang terstandarisasi dapat menyulitkan pemangku kepentingan untuk melakukan perbandingan antar perusahaan (Unerman *et al.*, 2018).

Idrawahyuni *et al.*, (2020) juga menekankan bahwa fokus utama perusahaan pada pertumbuhan ekonomi dan laba jangka pendek, yang dapat mengabaikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Idrawahyuni *et al.*, (2020) menyoroti kegagalan sistemik dalam tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis, dan perusahaan yang dapat mengakibatkan pengabaian tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan harus meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan, mengembangkan metrik yang dapat diukur dengan jelas, dan memperkuat transparansi dalam laporan keberlanjutan. Dengan adopsi standar dan panduan terkini, perusahaan dapat lebih efektif dalam menerapkan konsep dasar akuntansi keberlanjutan, sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan menciptakan dampak positif dalam lingkungan bisnis global.

2. Peluang untuk Inovasi dan Peningkatan Kinerja Melalui Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan

Konsep dasar akuntansi keberlanjutan membuka peluang besar untuk inovasi dan peningkatan kinerja dalam konteks bisnis yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi dalam pelaporan keberlanjutan juga dapat meningkatkan transparansi perusahaan, menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang nilai jangka panjang. Referensi terbaru dalam konteks ini dapat mencakup laporan

keberlanjutan perusahaan terkemuka dan pedoman internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) yang memandu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Literatur terbaru dari penelitian tentang akuntansi keberlanjutan juga dapat memberikan wawasan bagi perusahaan guna mencapai inovasi dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan berperan dalam mendorong inovasi dan peningkatan kinerja dalam konteks bisnis yang berkelanjutan.

J. Penutup

Dalam perkembangan bisnis kontemporer, konsep dasar akuntansi keberlanjutan menjadi semakin relevan dan penting. Evolusi persepsi keberlanjutan dalam konteks bisnis mencerminkan perubahan paradigma dari melihat keberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan menjadi peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang. Kontribusi akuntansi keberlanjutan terlihat dalam kemampuan untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan konsep dasar akuntansi keberlanjutan dihadapkan pada tantangan utama, seperti kurangnya pedoman dan standar yang konsisten, serta ketidaktransparan dalam laporan keberlanjutan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan guna mengembangkan metrik yang jelas, dan memperkuat aspek transparansi.

Konsep dasar akuntansi keberlanjutan memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks bisnis berkelanjutan. Dengan membantu perusahaan mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasional mereka, akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan reputasi perusahaan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip materialitas, keterbukaan, dan akuntabilitas memainkan peran penting. Meskipun terdapat tantangan, tetapi penerapan konsep

dasar akuntansi keberlanjutan membuka peluang besar untuk inovasi dan peningkatan kinerja. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Referensi terbaru, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) bisa memberikan panduan komprehensif, sementara literatur terbaru dari jurnal keberlanjutan dan akuntansi keberlanjutan memberikan wawasan mendalam. Peran kunci akuntansi keberlanjutan dalam mendorong inovasi dan peningkatan kinerja terus menjadi fokus dalam literatur terkini. Dengan demikian, konsep dasar akuntansi keberlanjutan bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam membentuk visi dan misi perusahaan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, W. Q. & Sukoharsono, E. G. (2021) 'Evolusi Akuntansi Keberlanjutan', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 No 10, pp. 5371-5388. doi: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4376>.
- Cantele, S., Tsalis, T. A. & Nikolaou, I. E. (2018) 'A new framework for assessing the sustainability reporting disclosure of water utilities', *Sustainability (Switzerland)*, 10(2), pp. 1-12. doi: [10.3390/su10020433](https://doi.org/10.3390/su10020433).
- Daromes, F. E., Holly, A. & Loferdy, M. (2023) 'Analisis Aspek Materialitas Dalam Pelaporan Keberlanjutan', *Wacana Ekonomi Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22 No 1, pp. 1-17. doi: <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.1-17>.
- Gil-Marin, M. *et al.* (2022) 'Sustainability Accounting Studies: A Metasynthesis', *Sustainability*. doi: <https://doi.org/10.3390/su14159533>.
- Gray, R., Owen, D. . & Adams, C. (1996) *Accounting And Accountability : Changes And Challenges In Corporate Social And Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- GRI (2013) *Pedoman pelaporan keberlanjutan G4*. Available at: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/558111467993208712/global-reporting-initiative-gri-index-2013> (Accessed: 23 January 2024).
- Idrawahyuni; *et al.* (2020) 'Esensi Akuntansi Lingkungan dalam Keberlanjutan Perusahaan', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3 No 2, pp. 147-159. doi: <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.646>.
- OJK (2017). *Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Sustainability Report*. Available at: <http://www.ojk.go.id> (Accessed: 24 January 2024).

- Ozili, P. K. (2021) 'Sustainability Accounting'. Available at: <https://ssrn.com/abstract=3803384>.
- Pramasita, S. E., Baridwan, Z. & Nurofik, N. (2022) 'Akuntansi Lingkungan Dalam Pengungkapan Simbolik Dan Substantif', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), pp. 85–94. doi: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.07.
- Taïbi, S. & Antheaume, N. (2020) 'Accounting for strong sustainability: an interventionresearch based approach', *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11 No. 7, pp. 1213–1243. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2017-0105>.
- Unerman, J., Bebbington, J. & O'dwyer, B. (2018) 'Corporate reporting and accounting for externalities', *Accounting and business research*, 48(5), pp. 497–622. doi: <https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470155>.
- Zyznarska-Dworczak, B. (2020) 'Sustainability Accounting – Cognitive and Conceptual Approach', *Sustainability*, 12(9936). doi: <http://dx.doi.org/10.3390/su12239936>.

TENTANG PENULIS

Dr. Grace Tianna Solovida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng



Penulis adalah dosen tetap LLDikti VI Wilayah Jawa Tengah yang diperbantukan pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Menyelesaikan pendidikan sarjana sampai dengan doktoral pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah. Selain, pendidikan sarjana Program Studi Manajemen yang telah dilaluinya di Universitas Diponegoro, penulis melanjutkan kembali pendidikan sarjana Program Studi Akuntansi di Universitas Semarang, dan pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro. Bidang akuntansi manajemen khususnya akuntansi manajemen lingkungan adalah bidang yang penulis tekuni. Mata kuliah yang sering diampu Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya, Sistem Pengendalian Manajemen, Audit Manajemen, Manajemen Keuangan, Manajemen Risiko, Metodologi Penelitian dan Metodologi Riset Akuntansi. Beasiswa *sandwich program* - Program Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Kemenristekdikti pada UniSA University of Australia serta penghargaan atas karya publikasi ilmiah internasional bereputasi pernah penulis dapatkan.

BAB 2

PRINSIP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten

A. Pendahuluan

Perkembangan teori akuntansi dekade terakhir cukup signifikan dengan kehadiran topik yang variatif. Salah satu kajian akuntansi yang cukup menarik untuk dielaborasi saat ini adalah tentang kajian akuntansi yang mengelaborasi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Kajian ini kemudian masuk dalam kategori akuntansi keberlanjutan. Perlu diketahui akuntansi keberlanjutan merupakan bagian dari ilmu akuntansi keuangan yang lebih menekankan pada pengungkapan atas informasi non keuangan, terutama tentang kinerja suatu organisasi kepada pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur hingga para pemangku kepentingan. Akuntansi keberlanjutan memiliki cakupan cukup luas karena dapat berdampak langsung terhadap aspek sosial lingkungan dan kinerja ekonomi suatu organisasi. Akuntansi keberlanjutan sejatinya selaras dengan akuntansi keuangan yang digunakan untuk pedoman pengambilan keputusan internal hingga membentuk kebijakan baru yang memiliki dampak pada kinerja suatu organisasi. Dalam menjamin konsisten informasi dalam koridor akuntansi keberlanjutan, maka berdirilah organisasi yang bisa menjamin terlaksananya informasi sosial dan lingkungan yang disebut dengan *Global Reporting Initiative* (GRI).

Organisasi ini bertujuan memberikan panduan kepada setiap entitas dalam menjalankan komitmen untuk terlaksananya pelaporan keberlanjutan. GRI menyatakan bahwa laporan kinerja sosial lingkungan dan ekonomi dapat sejalan dengan pelaporan keuangan korporasi (Sari, 2014).

Hal itu ditujukan agar para pemangku kepentingan dan entitas pemerintahan ingin organisasi dapat mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga diperkuat melalui arahan dari *Institute of Chartered Accountants di England and Wales*. Arahan tersebut mendorong agar setiap entitas mengeluarkan laporan keberlanjutan. Sementara aspek pengukuran dalam akuntansi keberlanjutan menggunakan indikator *Corporate Sustainability Reporting* (CSR) dan akuntansi *Triple Bottom Line* (TBL). Konsep *Triple Bottom Line* pertamakali dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1994 yang sengaja dirancang untuk mendorong faktor valuasi non pasar yaitu tentang integrasi antara modal bisnis dan modal alam dalam konteks bisnis korporasi (Hidayah *et al.*, 2019). Konsep ini merupakan rerangka kerja dari akuntansi keberlanjutan yang meliputi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Konsep TBL juga menuntut bahwa tanggung jawab suatu korporasi terletak pada pemangku kepentingan dan bukan hanya pada pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir laporan keberlanjutan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu keberlanjutan yang mengelaborasi tentang peran akuntan profesional agar dapat meningkatkan kepedulian tentang isu-isu sosial, lingkungan dan ekonomi.

Dengan demikian berbagai informasi yang diperoleh dalam laporan keberlanjutan dapat dimanfaatkan untuk para pembuat keputusan terutama dalam korporasi. Hal itu yang kemudian membuat akuntansi keberlanjutan menjadi fokus utama bagi banyak organisasi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan tata kelola yang bijaksana atas sumber daya. Dalam konteks ini prinsip dasar akuntansi keberlanjutan hadir sebagai panduan yang penting bagi perusahaan dalam

mencatat, mengukur dan melaporkan kinerja korporasi secara holistik. Dengan demikian, prinsip dasar akuntansi keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi suatu korporasi. Dengan mempertimbangkan ketiga pilar keberlanjutan, sosial, lingkungan dan ekonomi maka prinsip tersebut dapat membantu organisasi mengukur nilai jangka panjang suatu korporasi.

Prinsip dasar akuntansi keberlanjutan bukan hanya sekedar kerangka kerja untuk mencatat pencapaian finansial tetapi juga merupakan saluran untuk mendorong perubahan positif dalam perilaku bisnis bagi korporasi. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini akan menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi organisasi. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan merupakan saluran terpenting dalam menyusun gambaran yang komprehensif tentang dampak aktivitas ekonomi terhadap kewargaan terutama dari aspek sosial dan lingkungan. Pemahaman akan konsep akuntansi keberlanjutan sejatinya tidak terbatas pada aspek bisnis atau organisasi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang berkelanjutan bagi generasi mendatang (Kusumawardani *et al.*, 2018). Akuntansi keberlanjutan kemudian dapat menilai tindakan tersebut agar bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi keberlanjutan sangat dimungkinkan digunakan dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang suatu korporasi. Para pemangku kepentingan baik itu pemilik bisnis, investor, pemerintah atau publik, dapat menggunakan informasi tersebut untuk menjadi landasan dalam membuat keputusan bisnis berbasis dampak sosial, lingkungan dan ekonomi secara jangka panjang. Dengan mengetahui berbagai dampak yang tercipta dapat membuat korporasi mengambil langkah preventif dalam mengurangi risiko tersebut. Akuntansi keberlanjutan memiliki banyak kebermanfaatannya bagi masa depan korporasi terutama bagi

peningkatan citra positif korporasi, sehingga dapat mendorong inovasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep akuntansi keberlanjutan bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan baik dalam skala individu maupun korporat. Dengan memahami dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis berkelanjutan, maka korporasi dapat menciptakan nilai jangka panjang yang memiliki kebermanfaatannya dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi bagi kewargaan.

B. Prinsip Dasar Akuntansi Keberlanjutan

Dalam akuntansi keberlanjutan diperlukan berbagai prinsip dasar yang bisa menjadi pedoman dalam penyusunan informasi keberlanjutan. Dengan berpedoman pada beberapa prinsip tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi korporasi dalam penyusunan laporan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam akuntansi keberlanjutan dikenal ada beberapa prinsip mendasar di antaranya:

1. Akurasi (*Accuracy*)

Dalam akuntansi keberlanjutan dikenal dengan prinsip akurasi. Prinsip akurasi merupakan aspek fundamental yang dirancang sedemikian rupa agar bisa menegaskan tentang fakta bahwa suatu informasi keuangan bisa disampaikan melalui berbagai cara, baik secara kualitatif hingga kuantitatif. Tingkat akurasi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, sehingga sebuah laporan harus berisi informasi yang terperinci dan dipercaya bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja suatu entitas (Sukaharsono & Andayani, 2021). Prinsip akurasi harus disajikan sesuai dengan fakta, data yang relevan serta dapat diandalkan. Hal ini melibatkan proses yang cermat dalam mengklasifikasikan transaksi keuangan sehingga bisa memastikan bahwa pengukuran yang digunakan dalam menyajikan informasi adalah konsisten dan tepat. Dengan demikian, prinsip utama dari akurasi adalah mengacu pada

kebutuhan untuk menyajikan informasi keuangan dengan tepat dan benar, tanpa kesalahan yang signifikan. Hal itu ditujukan agar tidak mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, prinsip akurasi dalam laporan keuangan menjadi hal terpenting karena informasi yang tidak akurat dapat berpengaruh pada proses penilaian yang salah. Dengan demikian prinsip akurasi mencakup kewajiban untuk mengungkapkan segala ketidakpastian dan estimasi yang bisa mempengaruhi keakuratan suatu laporan keberlanjutan.

2. Keseimbangan (*Balance*)

Dalam akuntansi keberlanjutan, prinsip informasi yang dilaporkan harus mencerminkan dampak positif dan negatif dari berbagai kinerja organisasi pelapor, sehingga dapat memungkinkan terjadinya penilaian secara keseluruhan. Prinsip ini diharapkan untuk menghindari pemilihan, penghapusan atau penyajian format yang bisa mempengaruhi secara tidak wajar atau tidak benar. Berbagai keputusan atau penilaian oleh pembaca laporan harus menyertakan kedua prinsip baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Termasuk informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan sesuai dengan materialitasnya (Ardianingsih & Ilmiani, 2020). Prinsip kualitas laporan keuangan harus menjaga keseimbangan dan mengacu pada pentingnya menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan adil tanpa fakta berlebihan. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang relevan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang seimbang dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks prinsip keseimbangan, laporan keuangan keberlanjutan harus mencantumkan berbagai informasi yang mencakup aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Hal ini termasuk memberikan pengungkapan yang cukup tentang risiko dan

ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan demikian dalam prinsip keseimbangan, diharapkan informasi harus disajikan secara obyektif dan adil, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat membuat penilaian yang benar-benar berdasarkan fakta. Prinsip keseimbangan juga harus diikuti dengan pemeriksaan yang independen agar bisa memastikan bahwa informasi yang disajikan memenuhi standar objektivitas dan keadilan.

3. Kejelasan (*Clarity*)

Dalam akuntansi keberlanjutan, organisasi pelaporan harus bisa membuat informasi yang tersedia dengan cara yang mudah dimengerti dan bisa diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Bagi para pemangku kepentingan sangat penting untuk bisa menemukan informasi yang diinginkan dengan jelas dan tanpa usaha yang birokratis. Oleh sebab itu informasi yang dibutuhkan sejatinya bisa disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan jelas terutama bagi para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai organisasi dan kegiatannya. Prinsip utama akuntansi keberlanjutan adalah harus memiliki aspek kejelasan yang mengacu pada pentingnya menyajikan informasi keuangan yang terstruktur dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa informasi yang tersedia harus disusun dengan cara yang sistematis sehingga memungkinkan para pembaca dapat dengan cepat memahami isi dan implikasinya. Oleh sebab itu, diperlukan pemilihan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh para investor, analisis keuangan dan pihak terkait lainnya. Dalam penciptaan laporan keberlanjutan yang memiliki maka kejelasan, perlu dihindari berbagai penggunaan istilah teknis berlebihan atau jargon yang bisa membingungkan para pembaca. Informasi dalam akuntansi keberlanjutan juga harus memiliki struktur kata yang teratur dan terorganisir dengan bagian yang jelas dan terpisah untuk setiap komponen utama. Dengan begitu,

para pengguna informasi dalam konteks akuntansi keberlanjutan bisa memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya akurat dan seimbang, tetapi juga bisa dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.

4. Keterbandingan (*Comparability*)

Dalam akuntansi keberlanjutan aspek terpenting yang harus dipenuhi adalah prinsip keterbandingan. Prinsip keterbandingan merupakan suatu proses atau hasil dengan cara membandingkan dua hal atau lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan atau hubungan. Keterbandingan diperlukan dalam upaya mengevaluasi suatu kinerja (Sukaharsono & Andayani, 2021). Bagi para pemangku kepentingan sangat penting untuk membandingkan informasi tentang kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi terhadap kinerja organisasi masa lalu. Hal itu bertujuan untuk memperkuat kinerja organisasi karena konsistensi bisa memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk menilai kemajuan dari berbagai keputusan investasi dan program lainnya. Prinsip keterbandingan harus mengacu pada kemampuan laporan keuangan keberlanjutan untuk bisa dibandingkan dari waktu ke waktu, serta dibandingkan dengan pelaporan dari korporasi lain yang relevan. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya menyajikan informasi keuangan dalam format yang konsisten dan komparatif, sehingga memungkinkan para pengguna melakukan analisis yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Oleh sebab itu, pelaporan keuangan berkelanjutan harus disusun secara konsisten dari periode ke periode agar bisa dibandingkan. Penggunaan standar akuntansi yang diterima secara umum memungkinkan laporan keuangan keberlanjutan dari berbagai perusahaan bisa dibandingkan dengan lebih mudah. Laporan keuangan yang konsisten memungkinkan perhitungan rasio keuangan yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu (Natalia, 2014). Prinsip keterbandingan dalam laporan keuangan dapat membantu

para pemangku kepentingan untuk membuat perbandingan yang bermakna dalam mengambil keputusan yang informatif berdasarkan analisis yang komparatif.

5. Keandalan (*Reliability*)

Dalam akuntansi keberlanjutan, aspek keandalan menjadi hal terpenting karena para pemangku kepentingan yakin laporannya bisa diperiksa untuk membuktikan keabsahaan isi dan prinsip-prinsip pelaporan yang telah diterapkan. Dengan demikian, organisasi pelapor harus bisa mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan melaporkan informasi yang digunakan dalam bentuk yang bisa diperiksa, serta memiliki materialitas dari informasinya. Sementara bila organisasi merancang sistem informasi untuk pelaporannya, maka organisasi diharapkan mengantisipasi bila sistemnya diperiksa sebagai bagian dari proses *assurance* oleh pihak eksternal (Sukaharsono & Andayani, 2021). Dengan begitu, prinsip keandalan dalam akuntansi keberlanjutan harus mengacu pada kebutuhan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan keandalan informasi untuk memastikan bahwa para pengguna dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Akan tetapi laporan keuangan keberlanjutan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat membantu memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disajikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dari aspek relevansi, keandalan dan keberterimaan. Pihak korporasi juga harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Keandalan juga dapat disiapkan dan disajikan dalam waktu yang tepat sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Keterlambatan dalam penyajian informasi

keuangan dapat mengurangi keandalan dan relevansi terutama dalam proses pengambilan keputusan (Rafikaningsih et al, 2020). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam akuntansi keberlanjutan sangat penting karena informasi yang tidak dapat diandalkan bisa mempengaruhi penilaian tentang kinerja dan posisi keuangan korporasi, sehingga pada akhirnya dapat merugikan bagi para pemangku kepentingan.

6. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Akuntansi keberlanjutan sangat memperhatikan ketepatan waktu untuk mengacu pada keteraturan pelaporan dan dampak yang dijelaskan dalam laporan. Konsistensi atas frekuensi periode pelaporan, sangat dibutuhkan untuk memastikan keterbandingan informasi dari waktu ke waktu, dan aksesibilitas laporan untuk para pemangku kepentingan (Santoso *et al.*, 2021). Bila jadwal pelaporan keberlanjutan dan bentuk lain dari pelaporan selaras, maka hal ini bisa berguna untuk para pemangku kepentingan. Dengan demikian, organisasi diharapkan dapat mengimbangi kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi tersebut bisa diandalkan, termasuk penyajian kembali dari pengungkapan sebelumnya. Prinsip akuntansi keberlanjutan harus mengedepankan ketepatan waktu karena mengacu pada pentingnya menyajikan informasi keuangan dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, laporan berkelanjutan harus disiapkan dan disajikan dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengakses informasi tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan harus bisa mematuhi semua persyaratan hukum dan regulasi terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan, termasuk batas waktu pelaporan kepada otoritas pemerintah. Melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu bisa memungkinkan para pemangku kepentingan bisa membuat keputusan yang

informasional dalam jangka waktu yang tepat. Akan tetapi, keterlambatan dalam penyajian informasi keuangan dapat menghambat kemampuan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Bila kemudian terjadi keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, maka perusahaan harus melakukan pengungkapan yang tepat kepada para pemangku kepentingan terkait alasan di balik keterlambatan dan langkah taktis yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Prinsip Dasar untuk Penentuan Konten Laporan Keberlanjutan

Dalam akuntansi keberlanjutan prinsip pelaporan menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan berkelanjutan. Dengan demikian pelaporan keberlanjutan harus mengikuti beberapa prinsip dasar untuk penentuan konten saat menyusun laporan berkelanjutan di antaranya:

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Inclusiveness*).

Dalam laporan keberlanjutan terdapat aspek pelibatan pemangku kepentingan yang perlu dipertegas. Pelibatan ini harus bisa mengidentifikasi siapa saja para pemangku kepentingan yang relevan terhadap laporan keberlanjutan. Para pemangku kepentingan tersebut bisa meliputi investor maupun pihak eksternal institusi pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan untuk memberikan berbagai masukan dan saran atas berbagai aspek yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Peran para pemangku kepentingan ini dapat memperkuat identifikasi terkait dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang akan menjadi topik dalam laporan keberlanjutan. Dengan begitu dalam menyusun laporan keuangan keberlanjutan, pihak korporasi bisa mengelaborasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan secara komprehensif. Dengan pelibatan pemangku kepentingan, maka laporan keberlanjutan bisa

tepat pada identifikasi aspek keberlanjutan dari pihak korporasi.

2. **Konteks Keberlanjutan (*Sustainability Context*).**

Laporan keberlanjutan harus mengelaborasi semua aspek kinerja dari suatu entitas dalam konteks keberlanjutan yang luas. Konteks keberlanjutan harus fokus pada pengakuan bahwa aktivitas organisasi telah memiliki dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam laporan keberlanjutan. Perlu dipastikan bahwa laporan keberlanjutan telah mencerminkan terkait praktik keberlanjutan, sehingga dapat mendukung tujuan jangka panjang korporasi. Laporan keberlanjutan juga harus mencerminkan informasi yang jujur, transparan dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Ekasari et al., 2019). Hal itu termasuk juga memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keberlanjutan organisasi, pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Dalam konteks keberlanjutan diperlukan pertimbangan lokal dan global yang mempengaruhi aktivitas organisasi dari waktu ke waktu. Termasuk mempertimbangkan risiko dan peluang yang timbul dari perubahan iklim dan regulasi. Oleh sebab itu, pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan bisa memastikan bahwa isu tersebut relevan dan diakomodasi dengan baik. Dengan demikian, konteks keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan harus menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan kinerja dan dampak organisasi terhadap aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

3. **Materialitas (*Materiality*).**

Dalam laporan keberlanjutan dikenal istilah materialitas yang bisa menjadi tolak ukur dalam mencerminkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi bagi suatu korporasi. Materialitas merupakan topik relevan yang tercantum dalam laporan berkelanjutan yang menggambarkan

aspek terpenting terhadap dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang bisa mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan (Daromes et al., 2023). Meski demikian suatu topik dapat dikatakan relevan dan berpotensi material hanya berdasarkan pada salah satu dimensi. Prinsip materialitas selalu mengacu pada pengakuan bahwa tidak semua informasi yang relevan dengan keberlanjutan memiliki tingkat signifikansi atau dampak yang sama. Oleh karena itu prinsip ini menekankan pentingnya fokus pada isu-isu yang material atau signifikan bagi pemangku kepentingan. Dalam menerapkan prinsip materialitas diperlukan identifikasi terhadap isu-isu yang material dengan melibatkan penilaian mendalam terhadap dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari berbagai lintas sektoral. Dalam akuntansi keberlanjutan, saat menentukan isu material korporasi juga harus mempertimbangkan berbagai dampak dan risiko potensial yang terkait dengan setiap isu tersebut. Dengan demikian diperlukan fokus pada isu-isu yang memiliki dampak besar terhadap kinerja keberlanjutan suatu korporasi atau yang memiliki resiko tinggi. Aspek ini untuk memastikan bahwa isu-isu material yang diidentifikasi terkait erat dengan strategi bisnis korporasi. Dengan begitu langkah ini untuk memastikan bahwa upaya keberlanjutan terintegrasi secara efektif dalam aktivitas korporasi, sehingga bisa mendukung tujuan jangka panjang (Sandri et al., 2021). Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap isu-isu material untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan tetap relevan dan akurat. Hal itu disebabkan perubahan dalam konteks eksternal atau internal korporasi dapat mempengaruhi tingkat materialitas suatu isu yang lagi tren. Dengan menerapkan prinsip materialitas, pihak korporasi dapat menyusun laporan keberlanjutan yang fokus pada isu-isu utama bagi perbaikan kinerja keberlanjutan korporasi secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah taktis ini dapat

meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan (*Completeness*).

Laporan keberlanjutan harus mencakup informasi mengenai aspek material dan batasannya secara komprehensif atau lengkap. Dengan kata lain, laporan keberlanjutan harus mencakup semua aspek terpenting dari kinerja keberlanjutan organisasi. Hal ini mencakup berbagai informasi dan data penting tentang aspek sosial, lingkungan dan ekonomi termasuk tentang siklus kehidupan kewargaan. Laporan yang disediakan juga harus mencakup berbagai dimensi keberlanjutan yang lebih luas seperti hak asasi manusia dan hubungan tenaga kerja. Selain menyajikan pencapaian dan prestasi, laporan keberlanjutan juga harus mengakui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan keberlanjutan, sehingga memastikan bahwa kelengkapan informasi bisa memberikan gambaran yang faktual tentang kinerja organisasi (Hidayah et al., 2023). Pastikan data dan informasi yang disajikan dalam laporan berkelanjutan didukung oleh sumber yang valid dan terpercaya. Kelengkapan informasi dan data bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Aspek kelengkapan lain juga harus mencerminkan prinsip transparansi dan keterbukaan dengan cara menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses bagi para pemangku kepentingan. Terakhir, dalam prinsip kelengkapan ini juga perlu dilakukan evaluasi yang berkala terhadap kualitas laporan, sehingga kemudian bisa menyajikan informasi yang komprehensif, transparan dan akurat, tentang kinerja keberlanjutan dari suatu korporasi.

D. Penutup

Dalam kajian akuntansi keberlanjutan diperlukan berbagai prinsip dalam menjelaskan dan mendiskusikan isu-isu akuntansi sosial, lingkungan dan ekonomi secara komprehensif. Beberapa prinsip fundamental tersebut harus mengedepankan aspek akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan dan ketepatan waktu. Sementara untuk penentuan konten keberlanjutan juga harus memperhatikan prinsip dasar dalam menyusun laporan berkelanjutan di antaranya: (1) pelibatan pemangku kepentingan, (2) konteks keberlanjutan, (3) materialitas, dan (4) kelengkapan. Dengan memperhatikan berbagai prinsip dasar tersebut maka akuntansi berkelanjutan menjadi salah satu fundamental utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi keberlanjutan juga bisa berperan menjadi saluran utama bagi entitas dalam mempertegas skema berkelanjutan. Dalam konteks akuntansi berkelanjutan alat pengukuran yang paling banyak digunakan adalah *Corporate Sustainability Reporting* (CSR) dan akuntansi *Triple Bottom Line* (TBL). Konsep ini merupakan kerangka kerja dari akuntansi keberlanjutan yang meliputi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Konsep TBL juga menuntut bahwa tanggung jawab suatu korporasi terletak pada pemangku kepentingan dan bukan hanya pada pemegang saham. Kendati demikian, tantangan yang sering kali dihadapi oleh akuntansi keberlanjutan adalah dengan berkurangnya pemahaman akan konsep pembangunan berkelanjutan. Dampaknya pengungkapan *sustainability report* di Indonesia masih bersifat sukarelawan, sehingga membuat sangat sedikit korporasi yang memiliki kesadaran untuk berani mengungkapkan *sustainability report*. Sementara tantangan lain adalah sulitnya membangun hubungan yang simultan antara konsep akuntansi keberlanjutan dengan perilaku bisnis korporasi sebagai tujuan akhir. Terlebih perilaku korporasi masih dipengaruhi oleh kuatnya kultur maksimalisasi profit dalam langgam bisnis. Meski demikian, penerapan akuntansi keberlanjutan tetap memberikan banyak kontribusi nyata bagi kelangsungan suatu korporasi, karena bisa

meningkatkan kinerja keuangan dan membangun legitimasi bagi masa depan korporasi (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianingsih, A., & Ilmiani, A. (2020). Analisis Profesionalisme Dan Etika Profesi Dalam Penentuan Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 21(4).
- Daromes, F. E., Holly, A., & Loeferdy, M. (2023). Analisis Aspek Materialitas Dalam Pelaporan Keberlanjutan. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 22(1), 1-17. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.1-17>
- Ekasari, K., Eltivia, N., & Soedarso, E. H. (2019). Analisis Konten Terhadap Pengungkapan Etika dan Integritas Pada Sustainability Reporting. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(1).
- Hidayah, L. H., Astuti, D. S. P., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1). <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i1.3670>
- Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Tarigan, H. P. (2023). Akuntansi Berkelanjutan: Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis CV. Utami. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1859-1868.
- Kusumawardani, A., Irwansyah, I., Setiawati, L., Ginting, Y. L., & Khairin, F. N. (2018). Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1), 65-82. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i1.3484>
- Natalia, R. (2014). Pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan publik dari sisi profitability ratio. *Business Accounting Review*, 2(1), 111-120.
- Rafikaningsih, P. S. A., Putra, I. G. C., & Sunarwijaya, I. K. (2020). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Emiten di

Bursa Efek Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2).

- Sandri, A. B., Prihatni, R., & Armeliza, D. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga, dan Tekanan Karyawan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(3), 661-678.
- Santoso, E. B., Ismawati, A. F., & Laturette, K. (2021). *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:: Studi Di Malaysia*. Deepublish.
- Sari, N. (2014). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI): Studi Kasus Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk. *Binus Business Review*, 5(2), 527-536.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1013>
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.

TENTANG PENULIS

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten



Penulis yang lahir pada 4 November ini merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan terakhir pada S2 Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (2017), S2 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FEB) Universitas Islam Indonesia (2020) Yogyakarta, dan Profesi Akuntansi (Ak) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (2023). Penulis juga menjadi Dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf Banten. Selain menjadi pengajar, penulis juga menjadi peneliti senior dan Direktur Eksekutif *Institute for Digital Democracy* (IDD) Yogyakarta. Selain itu penulis aktif sebagai pengelola Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA). Penulis memiliki minat penelitian pada kajian Akuntansi Forensik, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Publik, Akuntansi Hijau, Akuntansi Keperilakuan dan Media Sosial. Berbagai publikasi ilmiah dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah banyak dihasilkan. Penulis dapat dihubungi melalui email: ariantobambang2020@gmail.com

BAB 3

STANDAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Sri Mulyani, S.El., M.Si.
Universitas Muria Kudus

A. Pendahuluan

Akuntansi keberlanjutan merupakan cabang dari akuntansi yang secara khusus berfokus pada pengintegrasian isu-isu keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam laporan keuangan dan keputusan bisnis. Dekade terakhir, akuntansi keberlanjutan telah berkembang dari konsep marginal menjadi salah satu prioritas utama bagi perusahaan global, sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kebutuhan untuk tata kelola yang baik. Akuntansi keberlanjutan tidak hanya tentang menghitung untung dan rugi finansial, tetapi melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari suatu kegiatan perusahaan (Hantono *et al.*, 2023). Dengan begitu akuntansi keberlanjutan memungkinkan perusahaan dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Akuntansi keberlanjutan memiliki standar yang berperan penting dalam menyediakan pedoman bagi perusahaan untuk mengukur, melaporkan, dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan. Tanpa standar yang diterima secara luas, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menyajikan data keberlanjutan yang dapat dibandingkan dan dipercaya oleh

investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntansi keberlanjutan menganut standar yang diterapkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Standar tersebut menawarkan kerangka kerja yang memandu setiap perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keberlanjutan yang relevan dengan cara yang transparan dan dapat dibandingkan.

Standar dan kerangka kerja dalam akuntansi keberlanjutan berperan membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan, yang mungkin tidak terungkap melalui metode akuntansi tradisional. Selain itu, standar ini memfasilitasi dialog yang lebih baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan dengan kolaboratif dalam membahas isu keberlanjutan. Hal ini sangat penting dalam dunia yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari korporasi terkait dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Standar akuntansi keberlanjutan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam hal reputasi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengadopsi praktik akuntansi keberlanjutan, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan, tetapi meningkatkan posisi kompetitif dengan memperkuat kepercayaan dan kesetiaan pelanggan, serta memperbaiki hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

B. *Global Reporting Initiative (GRI)*

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi nirlaba internasional yang memimpin dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 yang bertujuan mengatur kerangka kerja bagi organisasi di berbagai sektor untuk melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasional (Meutia, 2020). Standar GRI dirancang untuk memberikan pedoman yang komprehensif dan terstruktur

tentang apa yang harus dilaporkan, teknik pelaporan, dan informasi yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan menggunakan standar GRI, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keberlanjutan secara holistik, termasuk aspek pengelolaan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan lainnya.

Pentingnya standar GRI tidak hanya terletak pada keteraturan dan konsistensi dalam pelaporan keberlanjutan, tetapi juga dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan menyediakan kerangka kerja yang beragam, GRI memungkinkan perbandingan kinerja keberlanjutan antar perusahaan yang lebih mudah dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, GRI juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan. Hal itu dikarenakan bila pelaporan yang transparan dapat memicu perbaikan dalam praktik bisnis dan pengelolaan risiko jangka panjang (Meutia, 2020). Standar GRI terus berevolusi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan pasar, termasuk memperhitungkan isu-isu baru seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan keberlanjutan rantai pasokan. Organisasi yang mengadopsi standar GRI juga mendapatkan manfaat dari peningkatan reputasi, akses ke modal dan investasi yang bertanggung jawab, dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, standar GRI bukan hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi dan dampak positif organisasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Dalam implementasinya, standar GRI mendorong organisasi untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini mencakup identifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan serta upaya untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Dengan menyediakan struktur yang terorganisir, GRI dapat membantu organisasi mengumpulkan data yang relevan, menganalisis

kinerja, dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui standar GRI, perusahaan di seluruh dunia diarahkan untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan transparan dalam operasi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan perihal reputasi dan efisiensi operasional, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Sukaharsono & Andayani, 2021). Dengan demikian, standar GRI bukan hanya merupakan alat pelaporan, tetapi juga merupakan katalisator untuk transformasi bisnis menuju praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

1. Manfaat Standar GRI

Standar *Global Reporting Initiative (GRI)* memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya:

a. Transparansi dan akuntabilitas.

GRI memungkinkan perusahaan untuk melaporkan informasi keberlanjutan secara transparan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi perusahaan. Dampaknya dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

b. Kredibilitas dan kepercayaan.

Melalui pelaporan berbasis standar GRI, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dihadapan pemangku kepentingan dengan menyediakan data yang terverifikasi tentang kinerja keberlanjutan. Hal ini bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan investor, konsumen, dan masyarakat.

c. Manajemen risiko yang lebih baik.

GRI membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko keberlanjutan yang mungkin mempengaruhi operasi dan reputasi

perusahaan. Dengan memahami dan melaporkan risiko-risiko ini secara transparan, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan pasar dan regulasi.

d. Inovasi dan efisiensi.

Pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam operasi perusahaan. Dengan memahami dampak keberlanjutan dengan lebih baik, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi limbah, dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan.

e. Akses modal dan investasi yang bertanggung jawab.

Banyak investor dan lembaga keuangan semakin memperhatikan kinerja keberlanjutan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Melaporkan berdasarkan standar GRI dapat meningkatkan akses perusahaan ke modal dan investasi yang bertanggung jawab, memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan dan inisiatif berkelanjutan.

2. Tantangan Standar GRI

Meskipun memiliki banyak manfaat, standar GRI juga menghadapi sejumlah tantangan di antaranya:

a. Kompleksitas dan biaya implementasi.

Melaporkan berdasarkan standar GRI dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki sistem pelaporan keberlanjutan yang mapan. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan dengan benar.

b. Kesesuaian dengan industri dan wilayah.

Standar GRI bersifat umum dan berlaku untuk berbagai sektor industri dan lokasi geografis. Namun, ada tantangan dalam mengadaptasi standar ini agar sesuai dengan konteks unik dari masing-masing industri dan wilayah. Hal ini dapat memerlukan penyesuaian tambahan dalam pengumpulan dan pelaporan data keberlanjutan.

c. Kekurangan data dan metrik yang konsisten.

Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data keberlanjutan yang konsisten dan dapat dipercaya, terutama bila bergantung pada rantai pasokan yang kompleks atau memiliki operasi di berbagai negara. Kekurangan data yang konsisten dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melaporkan secara akurat tentang kinerja keberlanjutan.

d. Tantangan interpretasi dan pengukuran.

Beberapa aspek keberlanjutan, seperti dampak sosial dan reputasi perusahaan, sulit untuk diukur dan dinilai secara kuantitatif. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menginterpretasikan standar GRI dan mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan dengan tepat.

e. Tantangan komunikasi dan penggunaan informasi.

Meskipun perusahaan melaporkan data keberlanjutan secara transparan, penggunaan dan interpretasi informasi oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk investor dan konsumen, dapat bervariasi. Perusahaan harus berusaha untuk mengkomunikasikan informasi keberlanjutan dengan jelas dan efektif agar dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

C. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) adalah suatu lembaga nirlaba yang bertujuan mengembangkan standar akuntansi keberlanjutan yang terkait langsung dengan kinerja keberlanjutan perusahaan. Organisasi ini didirikan pada tahun 2011, SASB mengakui pentingnya memasukkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (ESG) ke dalam laporan keuangan perusahaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja keseluruhan dan risiko jangka panjang. SASB bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur bagi perusahaan untuk melaporkan informasi keberlanjutan dengan cara yang konsisten dan relevan untuk investor dan pemangku kepentingan lainnya. Standar SASB menetapkan indikator kinerja keberlanjutan yang spesifik untuk setiap sektor industri, memungkinkan perbandingan dan analisis yang lebih baik antara perusahaan dalam sektor yang sama. Dengan demikian, SASB berperan sebagai penghubung antara kebutuhan perusahaan untuk melaporkan dampak keberlanjutan dan kebutuhan investor untuk informasi yang relevan dan diandalkan, sehingga dapat mengambil keputusan investasi akhir yang berkelanjutan. Melalui adopsi dan implementasi standar SASB, perusahaan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keberlanjutan, serta meningkatkan akses modal dan dukungan investor.

1. **Manfaat *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)***

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya:

a. Relevansi untuk bisnis.

SASB menyediakan standar yang didasarkan pada risiko material dan peluang di sektor industri tertentu, sehingga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keberlanjutan yang paling signifikan dan memanfaatkan peluang yang terkait.

b. Peningkatan akuntabilitas.

Dengan mematuhi standar SASB, perusahaan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi. Dampaknya standar tersebut bisa membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

c. Kepercayaan investor.

Standar SASB memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada investor tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang hadapi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih berkelanjutan.

d. Pengelolaan risiko yang lebih baik.

Dengan menggunakan standar SASB, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keberlanjutan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini membantu perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar dan regulasi.

e. Inovasi dan efisiensi.

Standar SASB juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam operasi perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.

2. Tantangan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, SASB juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi:

a. Kesulitan dalam penetapan standar.

Memastikan bahwa standar SASB relevan dan dapat diadopsi oleh berbagai sektor industri dan wilayah geografis. Akan tetapi, SASB harus bisa mengatasi

berbagai kompleksitas dan keragaman industri untuk menghasilkan standar yang konsisten dan bermakna.

b. Kekurangan data yang konsisten.

Beberapa perusahaan telah menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang konsisten dan dapat dipercaya untuk melaporkan berdasarkan standar SASB. Kurangnya data yang konsisten dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan dengan akurat.

c. Keterbatasan peraturan dan kepatuhan.

Meskipun standar SASB bersifat sukarela, adopsi dan penerapan standar ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan informasi keberlanjutan. Kekurangan peraturan yang mengikat dapat menghambat motivasi perusahaan untuk melaporkan secara sukarela.

d. Kesulitan dalam pengukuran kinerja.

Beberapa aspek keberlanjutan, seperti dampak sosial dan reputasi perusahaan, sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menilai dan melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara akurat.

e. Kompleksitas implementasi.

Pelaporan berdasarkan standar SASB dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki sistem pelaporan keberlanjutan yang mapan. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan dengan benar

D. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adalah sebuah inisiatif global yang didirikan pada tahun 2015 oleh *Financial Stability Board (FSB)*, suatu badan internasional

yang mengawasi dan merekomendasikan perbaikan pada sistem keuangan global. TCFD bertujuan untuk mengembangkan panduan sukarela bagi perusahaan untuk melaporkan informasi finansial terkait dengan perubahan iklim dan risiko yang terkait, serta peluang transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Inisiatif ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap keuangan global dan investasi jangka panjang. TCFD mengidentifikasi empat kategori utama informasi yang harus dilaporkan oleh perusahaan di antaranya: informasi terkait kebijakan; strategi; manajemen risiko; metrik dan target yang terkait dengan perubahan iklim. Tujuannya adalah membantu para investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dampak perubahan iklim terhadap nilai dan kinerja keuangan perusahaan serta mempromosikan integrasi faktor-faktor perubahan iklim dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan mengadopsi dan menerapkan panduan TCFD, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan resiliensi terhadap risiko iklim dan memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Inisiatif ini telah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, investor, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menjadi bagian integral dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

1. Manfaat *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*

TCFD memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, investor, dan masyarakat secara keseluruhan:

a. Transparansi dan akuntabilitas.

TCFD mendorong perusahaan melaporkan informasi finansial terkait perubahan iklim secara transparan dan akuntabel. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterbukaan tentang risiko serta peluang yang terkait dengan perubahan iklim.

b. Pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui pelaporan yang lebih transparan tentang dampak perubahan iklim, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan memperhitungkan risiko dan peluang berbasis perubahan iklim.

c. Peningkatan resiliensi bisnis.

TCFD membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional. Dengan memahami risiko ini, perusahaan dapat mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim.

d. Akses ke modal dan investasi yang bertanggung jawab.

Melalui pelaporan yang terkait dengan TCFD, perusahaan dapat meningkatkan akses modal dan investasi yang bertanggung jawab. Investor semakin memperhatikan kinerja keberlanjutan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi dan pelaporan yang sesuai dengan TCFD agar bisa meningkatkan kepercayaan dan minat investor.

e. Kepatuhan dan kesetaraan.

Adopsi standar TCFD dapat membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan dan keuangan yang semakin ketat. Hal ini juga dapat memastikan kesetaraan dalam pelaporan, memungkinkan perusahaan dari berbagai sektor dan wilayah untuk membandingkan kinerja keberlanjutan secara adil.

2. Tantangan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*

Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, TCFD juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi:

- a. Kesulitan dalam penetapan standar.

Memastikan bahwa standar TCFD relevan dan dapat diadopsi oleh berbagai sektor industri dan wilayah geografis. TCFD harus mengatasi kompleksitas dan keragaman industri untuk menghasilkan standar yang konsisten dan bermakna.
- b. Kekurangan data yang konsisten.

Beberapa perusahaan masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang konsisten untuk melaporkan berdasarkan standar TCFD. Kekurangan data yang konsisten dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara akurat.
- c. Keterbatasan peraturan dan kepatuhan.

Meskipun standar TCFD bersifat sukarela, adopsi dan penerapan standar dapat dipengaruhi oleh kurangnya regulasi yang mengharuskan perusahaan melaporkan informasi keberlanjutan. Kekurangan peraturan yang mengikat dapat menghambat motivasi perusahaan untuk melaporkan secara sukarela.
- d. Kesulitan dalam pengukuran kinerja.

Beberapa aspek keberlanjutan seperti dampak perubahan iklim terhadap keuangan sangat sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menilai dan melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara akurat.
- e. Kompleksitas implementasi.

Pelaporan berdasarkan standar TCFD dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki sistem pelaporan keberlanjutan yang konsisten. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan dengan benar.

3. Peran *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

International Financial Reporting Standards (IFRS) berperan penting dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam akuntansi keuangan. IFRS merupakan kerangka kerja dari standar akuntansi yang diakui secara internasional. IFRS juga memberikan pedoman yang luas bagi perusahaan di seluruh dunia untuk menyusun laporan keuangan dengan cara yang konsisten dan mudah dipahami. Namun, peran IFRS dalam akuntansi keberlanjutan tidak secara langsung atau eksplisit seperti dalam akuntansi keuangan konvensional. Meski demikian, perkembangan terbaru dalam isu-isu keberlanjutan telah mendorong pertimbangan lebih lanjut tentang strategi IFRS untuk memperhitungkan dan melaporkan informasi keberlanjutan.

Meskipun secara khusus tidak mengatur tentang pelaporan keberlanjutan, tetapi laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS harus memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan arus kas. Dalam beberapa kasus, hal ini juga mencakup informasi tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Sebagai contoh, perusahaan diharuskan mengungkapkan risiko lingkungan atau sosial yang dapat mempengaruhi hasil operasi, seperti perubahan regulasi lingkungan atau tuntutan hukum terkait hak asasi manusia. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung mengatur pelaporan keberlanjutan, IFRS dapat memberikan landasan yang penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, banyak pihak termasuk badan pengatur dan lembaga keuangan, telah menekankan pentingnya integrasi informasi keberlanjutan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tuntutan yang meningkat dari investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk informasi yang lebih komprehensif dan terperinci tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang dihadapi oleh

perusahaan. Dampaknya beberapa organisasi telah memperluas cakupan laporan keuangan untuk mencakup informasi keberlanjutan, seperti pengelolaan risiko iklim atau peluang dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini memotivasi perusahaan untuk mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan dalam proses pelaporan keuangan, meskipun ini tidak selalu diatur oleh IFRS.

Namun, tantangan yang signifikan tetap ada dalam memperhitungkan keberlanjutan dalam kerangka kerja akuntansi yang ada. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengukur dan melaporkan informasi keberlanjutan secara objektif dan dapat diandalkan. Banyak aspek keberlanjutan, seperti dampak lingkungan atau kinerja sosial, sulit untuk diukur dan diungkapkan dalam format yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi tradisional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi informasi keberlanjutan diintegrasikan ke dalam laporan keuangan, sehingga dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan. Kendati demikian, masih terdapat ketidakpastian tentang standar dan pedoman yang digunakan untuk melaporkan informasi keberlanjutan. Meskipun ada banyak inisiatif global seperti GRI atau SASB yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, tetapi belum ada konsensus internasional tentang standar yang harus diikuti oleh perusahaan dalam melaporkan informasi keberlanjutan. Hal ini menciptakan tantangan dalam menghasilkan data yang dapat dibandingkan dan diverifikasi di seluruh perusahaan dan sektor industri.

Pertimbangan lain adalah kompleksitas regulasi dan kepatuhan yang terkait dengan pelaporan keberlanjutan. Berbagai negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan pelaporan keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi ini karena dapat menambah beban administratif dan biaya bagi perusahaan. Dalam beberapa kasus, persyaratan pelaporan keberlanjutan dapat bertentangan satu sama lain, menciptakan tantangan

tambahan bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Meskipun ada tantangan yang signifikan, ada juga peluang besar untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam akuntansi keuangan. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang semakin meningkat dari investor dan pemangku kepentingan lainnya, maka semakin banyak inisiatif dan diskusi tentang informasi keberlanjutan yang dapat diintegrasikan ke dalam laporan keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan konsisten. Selain itu, peningkatan teknologi dan kemajuan dalam pengukuran dan pelaporan keberlanjutan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kompleksitas dan ketidakpastian dalam menghasilkan informasi keberlanjutan yang relevan.

Dengan demikian, peran IFRS dalam akuntansi keberlanjutan tidak langsung atau eksplisit mempengaruhi, tetapi kerangka kerja ini bisa memberikan landasan penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengembangan pedoman dalam melaporkan informasi keberlanjutan, maka perusahaan dapat lebih baik memahami dan mengelola risiko serta peluang yang terkait dengan perubahan iklim dengan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.

4. Dimensi Standar Akuntansi Keberlanjutan

Di tengah tantangan global yang semakin meningkat terkait perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, standar akuntansi keberlanjutan telah muncul sebagai alat penting dalam mengukur dan melaporkan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Standar ini mencakup tiga dimensi utama yaitu, lingkungan, sosial, dan tanggung jawab perusahaan, yang masing-masing memiliki peranan dalam mendefinisikan keberlanjutan entitas bisnis.

Dimensi Lingkungan berfokus pada dampak perusahaan terhadap alam sekitar, termasuk pengelolaan sumber daya, emisi, serta limbah dan polusi. Pengukuran dan pelaporan dalam aspek ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi jejak karbon serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko lingkungan tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan dan memenuhi ekspektasi regulator serta pemangku kepentingan. Sebagai contoh, laporan emisi gas rumah kaca membantu perusahaan dalam strategi mitigasi perubahan iklim dan transisi ke energi bersih.

Dimensi sosial menekankan pada hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek ini mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas perusahaan. Pelaporan sosial yang efektif tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum dan etis perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas yang lebih besar dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan adalah dimensi yang melingkupi cara perusahaan mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam strategi dan operasi bisnisnya. Tanggung jawab perusahaan mencakup tata kelola, etika, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan risiko, strategi adaptasi, dan inovasi berkelanjutan merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang berubah tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan juga mencakup strategi perusahaan berinteraksi dengan pemegang saham dan memastikan bahwa beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Penerapan standar akuntansi keberlanjutan membutuhkan komitmen dari semua level organisasi dan strategi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dari berbagai dimensi. Dari pengukuran kinerja lingkungan yang akurat hingga pengembangan kebijakan sosial yang inklusif serta praktik tata kelola perusahaan harus dibangun dengan cara yang strategis. Dalam konteks global, standar akuntansi keberlanjutan tidak hanya menjadi kunci bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga sebagai dasar untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Melalui pelaporan yang komprehensif, perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi regulator dan pemangku kepentingan, tetapi juga bisa memanfaatkan peluang pasar baru, dan membangun ketahanan bisnis terhadap risiko sosial dan lingkungan.

Penerapan standar akuntansi keberlanjutan menawarkan jalan bagi perusahaan untuk tidak hanya mengelola risiko, tetapi juga mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ke ekonomi global yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ke dalam strategi dan operasional, perusahaan dapat mengembangkan model bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

E. Penutup

Standar akuntansi keberlanjutan telah hadir sebagai alat penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas dampak ekonomi, tetapi juga atas dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnis. Standar akuntansi keberlanjutan, yang mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan, memungkinkan perusahaan melaporkan secara transparan dan akurat tentang strategi mengatasi masalah keberlanjutan dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi standar akuntansi keberlanjutan menandai

pergeseran cara perusahaan memandang dan melaporkan kinerja, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dengan mengadopsi kerangka kerja, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan, mengoptimalkan operasi untuk efisiensi sumber daya, dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Hal ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan dan reputasi positif di mata pemangku kepentingan, tetapi juga mendukung inovasi dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Standar akuntansi keberlanjutan juga berperan dalam menginformasikan keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam menilai potensi dan risiko investasi. Dengan demikian, perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam aspek keberlanjutan bisa mendapatkan citra positif dihadapan para investor yang memiliki orientasi pada masa depan. Oleh karena itu diperlukan penguatan kerjasama antar perusahaan, regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan metodologi standar pelaporan. Peningkatan kolaborasi global dan penguatan inovasi bisa menjadi aspek terpenting dalam meningkatkan efektivitas standar akuntansi keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hantono, H., Setiawan, T., Rizal, M., Wardoyo, D. U., Dwianika, A., Akadiati, V. A. P., ... & Wardani, D. K. (2023). *Akutansi Berkelanjutan*.
- Meutia, I. (2020) *"Sustainabiity" (Konsep, Kerangka, Standar dan Indeks)*. Kedua. Surabaya: CV. Latifah.
- Sukaharsono, E.G. and Andayani, W. (2021) *Akuntansi Keberlanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

TENTANG PENULIS

Sri Mulyani, S.EI., M.Si.

Universitas Muria Kudus



Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Penulis juga aktif terlibat dalam tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku yang pernah ditulis di antaranya: Teori dan Praktik Akuntansi Pengantar 1 Sesuai PSAK; Konsep Dasar Akuntansi Syariah; Tenun Troso dalam Pusaran Zaman; Tenun Ikat Troso Jepara dan Batik Kudus – Industri Kreatif dalam Persaingan Gobal; dan Tenun Warisan Budaya Kaya Makna. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Email: s.mulyani@umk.ac.id.

BAB

4

PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Rikah, S.E., M.Si.

Universitas YPPI Rembang

A. Pendahuluan

Dalam konteks akuntansi, pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses pencatatan dan pengukuran pencapaian kegiatan untuk pencapaian misi melalui hasil yang dapat dilihat, seperti produk, jasa, atau proses. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengukuran kinerja mencakup informasi, efektivitas, dan efisiensi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, pengukuran kinerja dalam sebuah unit bisnis adalah proses *feed back* dari auditor kepada manajemen yang menunjukkan kesesuaian tindakan dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Indikator kinerja ini memungkinkan unit bisnis untuk mengawasi kinerjanya untuk mendapatkan hasil dan luaran bagi pelanggan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat menentukan tindakan apa yang harus diambil organisasi selanjutnya.

B. Teori-Teori Pengukuran Kinerja

1. Teori penetapan tujuan (*Goal setting theory*).

Teori penetapan tujuan adalah model individu yang ingin memiliki tujuan, memilih tujuan, dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut (Birnberg & Shields, 2006). Sementara teori penetapan tujuan dapat dikatakan sebagai niat untuk bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, tujuan tersebut menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak yang harus dilakukan (Robbins, 2006).

2. Teori harapan (*Expectancy theory*).

Teori harapan pertama kali diusulkan oleh Vroom. Teori ini didefinisikan sebagai kekuatan yang dapat memotivasi seseorang untuk berusaha keras untuk menyelesaikan tugasnya. Teori ini juga bergantung pada hubungan antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut, serta seberapa besar seseorang yakin bahwa perusahaan akan memenuhi keinginannya sebagai kompensasi atas upaya yang dilakukannya. Tujuan dari teori harapan adalah untuk menentukan tindakan yang akan memenuhi harapan seorang karyawan. Porter Lawler kemudian mengembangkan teori harapan yang dikembangkan oleh Vroom dan menggunakan indikator *balance score card* sebagai dasar untuk membuat model pengelolaan kinerja yang komprehensif. Hal itu dikarenakan menurut konsep Porter-Lawler, tindakan tidak selalu dapat menghasilkan kinerja karena erat kaitannya dengan kemampuan, karakter, dan perspektif. Dengan demikian, ketika gaji dikaitkan dengan kinerja, hubungan antara kinerja dan kepuasan menjadi lebih kuat (Mulyadi, 2013).

C. Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan modern bermula dari hubungan antara manusia dan alam, yang bermula dari gerakan aktivisme lingkungan pada abad ke-19. Para aktivis lingkungan tersebut menilai bahwa hubungan antara manusia dan alam dapat membantu intuisi dan inspirasi manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan juga menjelaskan tentang kemampuan peradaban manusia untuk menciptakan dunia yang mampu memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan dan ekonomi tanpa mengorbankan kehidupan manusia. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjamin kehidupan jangka panjang secara umum melalui penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi secara lebih bijaksana.

Konsep berkelanjutan pertama kali muncul pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Sementara negara-negara berkembang dan negara industri masih melakukan kompromi atas perbedaan antara pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan. Hal itu yang kemudian banyak digelar diskusi yang menetapkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sangat berkaitan. Kecelakaan yang terjadi pada tahun 1980-an menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. seperti yang terjadi di Union Carbide di Bhopal, India pada tahun 1984, dan di reaktor nuklir Chernobyl, Rusia pada tahun 1986. Tanggung jawab lingkungan kembali diperlukan karena pelepasan bahan berbahaya dan beracun serta radiasi dari kecelakaan industri.

Sejak adanya perubahan paradigma mengenai manajemen organisasi, yang awalnya “berorientasi pada pemegang saham” menjadi “berorientasi pada pemangku kepentingan” dan perhatian terhadap kerusakan alam, maka pelestarian pada lingkungan dan kepedulian sosial diangkat menjadi sebuah isu sentral. Dalam konsep *triple bottom line*, (3TBL) Elkington berusaha menempatkan bisnis sebagai bagian terpenting dari strategi perusahaan. Selama beberapa waktu, konsep pertanggungjawaban organisasi telah digantikan oleh

konsep *triple bottom line*, yang didasarkan pada aspek finansial (profit), sosial (orang), dan lingkungan (planet). Sebelumnya, konsep ini hanya didasarkan pada aspek finansial atau *single bottom line*. Kehadiran konsep *pentaple bottom line* (5P) yang merupakan hasil pemikiran ekspansif dari *triple bottom line* (3P) yang sebelumnya sudah ada. Konsep ini bertujuan agar organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mempertegas lima aspek utama di antaranya: profit, *people*, planet, *phenotechnology* dan prophet yang seimbang. Beberapa aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep profit.

Banyak yang salah mengartikan terkait istilah profit. Stigma yang berkembang selama ini menyatakan kelangsungan suatu bisnis hanya dinilai dengan meningkatnya profit yang dimiliki oleh entitas bisnis. Profit dan pertumbuhan usaha hanya dikatakan sebagai indikator untuk mengetahui suatu usaha dapat dikatakan sehat. Profit dan pertumbuhan usaha sejatinya tidak lebih penting daripada karena beberapa fakta menegaskan bahwa beberapa usaha menghadapi tantangan yang signifikan untuk berkembang, bahkan jika hanya untuk mencapai titik impas (BEP) saja membutuhkan waktu yang lama. Namun, ada juga usaha yang sudah cukup dengan usahanya sehingga tidak ingin mengambil risiko lagi. Hal itu disebabkan asumsi bahwa tanpa profit, pertumbuhan sulit dicapai, dan profit juga akan sulit meningkat bila pertumbuhan tidak berlanjut. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan menggunakan profit. Dalam konteks ini, fokus dan tindakan organisasi tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi lebih pada menciptakan praktik bisnis yang adil dan beretika.

2. Konsep *people*

Organisasi harus memahami bahwa masyarakat sekitarnya adalah pemangku kepentingan yang sangat penting untuk eksistensi, keberlangsungan hidup, dan

perkembangan organisasi. Organisasi dapat beroperasi dengan baik berkat dukungan masyarakat sekitarnya. Konsep orang (*people*) dapat didefinisikan sebagai modal dasar manusia, yaitu keyakinan bahwa organisasi harus berusaha untuk menguntungkan para *stakeholder* tanpa mengeksploitasi atau membahayakan kelompok mana pun. Organisasi harus berkomitmen untuk membantu masyarakat sebaik mungkin melalui program *environmental social and governance* (ESG). Dengan kata lain, ESG bagi suatu organisasi dianggap melakukan investasi dalam masa depan dengan melakukan kegiatan sosialnya. Kegiatan ini dapat menghasilkan timbal balik dari masyarakat yang dapat mempertahankan eksistensi organisasi.

3. Konsep Planet

Organisasi dan korporasi harus mendukung pelestarian lingkungan alam. Menjaga dan melestarikan lingkungan alam adalah kewajiban manusia, sehingga pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan cara yang seimbang serta berkelanjutan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam, organisasi harus berusaha untuk melestarikan secara produktif tanpa merusak atau menimbulkan kerusakan.

4. Konsep fenoteknologi (*Phenotechnology concept*).

Frasa "fenoteknologi", menjelaskan tentang keberadaan fenomena teknologi informasi yang berperang penting untuk keberlangsungan suatu organisasi. Beberapa contoh fenoteknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, telekomunikasi, dan aplikasi basis data. Suatu organisasi harus memiliki sistem informasi yang baik untuk bersaing dengan kompetitor, sehingga diperlukan dana yang besar untuk membangun sistem informasi. Meskipun dibutuhkan dana yang besar untuk berinvestasi pada sistem informasi, tidak sedikit organisasi yang ingin

berinvestasi dengan berbagai manfaat yang didapatkan oleh sistem informasi tersebut.

5. Konsep *prophet*.

Konsep *prophet* dapat didefinisikan sebagai spiritualitas dan mental, atau keseimbangan spiritualitas dalam proses untuk melestarikan kehidupan organisasi. Hal ini menjadi konsep awal sebagai gambaran pokok manusia dalam beragama yang bermuara pada penyerahan diri. Manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan semata-mata hanya mengharap Ridho-Nya. Suatu organisasi harus mengakui kebiasaan spiritual seperti dalam pengungkapan kesadaran Tuhan, kesadaran keimanan dan ketauhidan, kejujuran, kemampuan seseorang untuk menemukan kedamaian batin, pemikiran tentang keberadaan yang lebih tinggi dan cinta yang tulus.

D. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), tanggung jawab sosial (CSR) merupakan janji perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, perwakilan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat bagi pelaku bisnis dan pembangunan ekonomi. Pendapat lain mengatakan bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat (Sudana, 2011). Sementara CSR lingkungan dapat diwujudkan dalam perilaku transparan dan etis yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain tanggung jawab sosial (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk bekerja dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak

negatif lingkungannya. Akan tetapi fokus CSR hanya membangun kesejahteraan pihak berkepentingan perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Akuntansi keberlanjutan juga diperkuat oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menerbitkan *sustainability report* setiap tahunnya, sesuai dengan pasal 10 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, pemberi pinjaman, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan berkelanjutan. Pasal 12 ayat 3 mengatur bahwa “bagi lembaga jasa keuangan yang belum memiliki situs web, laporan keberlanjutan wajib di publikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya”. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, diubah dengan UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, sehingga bank juga memiliki tanggung jawab atas dampak negatif serta kegiatan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena saat itu perbankan sering kali mensyaratkan AMDAL kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan dilakukan review, termasuk berbagai tahapan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan kata lain pihak perbankan tidak dapat langsung menerima setelah AMDAL diberikan oleh nasabah, karena bank mempunyai tanggung jawab atas dampak negatif atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Dalam pasal ini menyatakan agar perbankan juga mempertimbangkan hasil analisis dampak lingkungan bagi perusahaan besar dan atau berisiko tinggi untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah ramah lingkungan. Perbankan juga harus mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat melalui pemberian pinjaman keuangan, yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi

rakyat. Dengan demikian, pemberian pinjaman harus memiliki jaminan yang cukup dengan mengandalkan kepercayaan atau kesanggupan dan kemampuan debitur. Hal ini berarti perbankan harus meyakinkan debitur dengan melakukan penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap karakter, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha nasabah sebelum memberikan kredit.

Dengan demikian *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan adalah bertindak etis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, yang mencakup aspek sosial, lingkungan, sosial dan ekonomi. Konsep tersebut dikenal sebagai *triple bottom line*. Selain itu, CSR juga dapat berarti tanggung jawab bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat umum. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan bukan hanya kemurahan hati, tetapi memaksimalkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi.

E. Penutup

Kehadiran revolusi industri 4.0 mendorong organisasi memperhatikan semua hal yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usahanya. Konsep keberlanjutan yang terdapat pada *triple bottom line* harus dapat berjalan seimbang. Dengan kata lain suatu organisasi juga harus memperhatikan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar untuk menjaga keberlangsungan atau eksistensi dari unit usahanya. Dengan kata lain, dengan menjaga kegiatan sosial tersebut masyarakat bisa memberikan umpan balik pada organisasi yang baik pula untuk keberlanjutan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Birnberg, J.G., Luft, J., & Shields, M.D. (2006). *Psychology Theory in Management Accounting Research Psychology Theory in Management Accounting*. *Handbook of Management Accounting Research*, 1(1), 115-137. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01004-2](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01004-2)
- Mulyadi, M. (2013). *Sistem Akuntansi, Edisi Tiga, Cetakan Keempat. Salemba Empat.*
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.*
- Sudana, I. M. (2011). *Manajemen Leuangan Perusahaan Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga.*

TENTANG PENULIS

Rikah, S.E., M.Si.

Universitas YPPI Rembang



Lahir di Rembang, 21 Februari 1983.

Penulis lulus Sarjana Ekonomi (S.E) di Program Studi Akuntansi STIE YPPI Rembang (2009), dilanjutkan dengan Pendidikan Program Magister Akuntansi (M.Si) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2015. Sejak tahun 2010 sampai sekarang penulis mengabdikan pada Kampus yang berada di Kota Rembang yaitu Universitas YPPI Rembang. Penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian dan menulis jurnal dari hasil penelitian maupun pengabdian dalam bentuk luaran Publikasi Nasional ber-ISSN, terakreditasi dan jurnal international. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, saya berharap besar semoga buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Akuntansi.

BAB 5

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Khairina Nur Izzaty, S.E., M.Si., Akt.
STIE Bank BPD Jateng

A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional, pada tahun 2015 menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi dan memastikan bahwa semua negara mencapai kemakmuran pada tahun 2030. Secara khusus, pendekatan yang digunakan oleh PBB terinspirasi oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan utama dalam agenda 2030 melalui pendekatan terintegrasi berdasarkan keterlibatan dari berbagai tipe pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan (United Nations, 2015). Pada tingkat makroekonomi, praktik akuntansi merupakan alat informasi utama yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk menilai kontribusi sektor swasta (bisnis). Faktanya, semakin banyak perusahaan yang memasukkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam laporan non-keuangan agar bisa memberikan informasi konkrit mengenai kontribusi terhadap agenda SDG 2030. Untuk mendorong organisasi dan perusahaan besar agar mengungkapkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, banyak negara mulai

memperkenalkan peraturan baru mengenai kewajiban pelaporan non-keuangan (Pizzi *et al.*, 2022).

Berkaitan dengan hal ini maka jumlah perusahaan yang mulai mengungkapkan dampak keberlanjutan juga mengalami peningkatan untuk memenuhi persyaratan legal. Pengungkapan keberlanjutan biasanya dilakukan bersamaan dengan keterbukaan informasi dalam laporan tahunan dan merupakan bagian penting dalam mencapai akuntabilitas publik. Kendati demikian, perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan pentingnya pelaporan keberlanjutan. Hanya 30 persen dari 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEI) telah menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Aldi & Djakman, 2020). Dengan adanya POJK No. 51/POJK.03/2017, perusahaan publik dan jasa keuangan di Indonesia sudah diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan.

Selain program SDGs yang dicanangkan oleh PBB, ada juga istilah *sustainability reporting* (SR) dalam dunia bisnis. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), SR adalah laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan mengenai dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas sehari-hari perusahaan. Beberapa organisasi internasional saat ini mengeluarkan pedoman pelaporan keberlanjutan. Pedoman yang paling banyak digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh GRI. Perlu diketahui, GRI merupakan organisasi internasional independen yang telah merilis standar laporan SR sejak tahun 1997. Hingga saat ini, GRI telah mengeluarkan pedoman terbaru pada tahun 2021 yang memuat standar lebih komprehensif dan terkonsolidasi. GRI menggunakan 3 pendekatan dalam pengungkapan SR, antara lain seperti strategi dan profil, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja.

B. Definisi dan Tujuan Pengungkapan

Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika ada informasi akuntansi yang berguna bagi penggunaannya tetapi tidak tercantum dalam laporan keuangan utama perusahaan, maka informasi tersebut juga harus disediakan. Prinsip pengungkapan penuh berarti bahwa laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna eksternal (Spiceland *et al.*, 2009). Namun, manfaat dari informasi yang diungkapkan tersebut harus melebihi biaya dari penyediaan informasi.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi dan diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang lengkap. Keterbukaan informasi dalam suatu perusahaan sangat penting karena nilai informasi yang relevan dan dipercaya pada saat terjadi ketidakpastian pasar tercermin dalam pengungkapan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang tidak dapat ditampilkan pada neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Transparansi perusahaan kini berperan dalam mendukung investor di pasar modal.

Tambahan informasi dapat diungkapkan dalam berbagai cara, di antaranya:

1. Komentar sisipan atau memodifikasi komentar yang ditempatkan pada halaman awal laporan keuangan.
2. Catatan pengungkapan yang memuat pengetahuan tambahan mengenai operasional perusahaan, prinsip akuntansi, perjanjian kontraktual, dan litigasi yang tertunda.
3. Laporan keuangan tambahan yang melaporkan informasi lebih detail dibandingkan yang disajikan dalam laporan keuangan utama.

Pada umumnya tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan pelaporan keuangan dan melayani kepentingan berbagai pengguna laporan keuangan. Hal itu dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama memperoleh dana dari masyarakat, maka pengungkapan mungkin diperlukan untuk tujuan berikut:

1. Perlindungan.

Pengungkapan dilakukan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari tindakan manajemen yang tidak wajar dan transparan dalam penyajian pos-pos laporan keuangan.

2. Informasi yang bermanfaat.

Pengungkapan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung efektivitas pengambilan keputusan.

3. Kebutuhan khusus.

Konten yang wajib dipublikasikan hanya sebatas apa yang dianggap bermanfaat bagi pengguna yang dituju. Saat ini, untuk tujuan pengawasan, peraturan mengharuskan informasi tertentu, yang memerlukan pengungkapan rinci, disampaikan kepada otoritas pengawas dalam bentuk tertentu.

Terkait dengan seberapa luas dan banyak pengungkapan informasi, maka terdapat tiga tingkatan pengungkapan, yaitu:

1. *Adequate disclosure.*

Pengungkapan yang memadai, yaitu pengungkapan minimum yang diwajibkan oleh standar yang berlaku agar investor dapat menginterpretasikan secara benar angka-angka yang disajikan.

2. *Fair disclosure.*

Merupakan pengungkapan wajar dengan melakukan pengungkapan informasi untuk memenuhi tujuan etis yang secara tidak langsung. Hal itu ditujukan agar memastikan perlakuan yang sama terhadap semua pengguna laporan dengan memberikan informasi yang tepat kepada calon pengguna.

3. *Full disclosure* (Pengungkapan penuh).

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang menyajikan seluruh informasi yang dianggap andal dan relevan. Pengungkapan ini sering kali dianggap berlebihan karena dikhawatirkan menyajikan rincian yang tidak terlalu penting, sehingga akan mengaburkan informasi sebenarnya penting dan justru membuat pengguna sulit melakukan representasi.

Sifat atau jenis pengungkapan yang diberikan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori: pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib.

1. **Pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*).**

Pengungkapan sukarela mengacu pada keterbukaan informasi yang dilakukan suatu perusahaan secara sukarela tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan lebih lanjut.

2. **Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*).**

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan oleh perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan otoritas regulator.

C. Pengungkapan Keberlanjutan

Beberapa studi mengaitkan pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fokus pada *Sustainability Development Goals* (SDGs) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan keberlanjutan dapat termuat secara kuantitatif maupun kualitatif di dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) maupun laporan tahunan (*annual report*). Namun pengungkapan keberlanjutan yang ditemukan di laporan tahunan memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibanding pengungkapan melalui laporan keberlanjutan (Gunawan *et al.*, 2019). Hal ini dapat dijelaskan karena adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengungkapkan item-item tertentu secara detail dalam laporan tahunannya.

Beberapa teori yang mendasari adanya pengungkapan keberlanjutan adalah:

1. Teori keagenan (*Agency*).

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan (*principal*) dan manajer (*agen*). Hal itu dikarenakan prinsipal mempercayakan seluruh pengelolaan kegiatan perusahaan kepada agen, maka agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi (*agency gap*). Sementara, untuk meminimalkan kesenjangan informasi tersebut, maka perusahaan melakukan pengungkapan informasi secara lebih optimal, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Informasi terkait laporan keberlanjutan diasumsikan dapat mengurangi asimetri informasi, dan biaya keagenan yang dihasilkan (Wahyuningrum *et al.*, 2022).

2. Teori *signalling*.

Teori *signalling* menjadi dasar pengungkapan sukarela, termasuk pengungkapan keberlanjutan. Hal itu dikarenakan manajemen akan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi yang diyakini akan memberikan kepentingan besar bagi investor dan pemegang saham, terutama jika informasi tersebut kabar baik. Meskipun informasi keberlanjutan belum menjadi kewajiban, para manajer tertarik untuk mengkomunikasikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan keberhasilan perusahaan (Suwardjono, 2008).

3. Teori *Stakeholder*.

Pelaporan keberlanjutan didukung oleh teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 sebagai evolusi dari teori pemegang saham yang sangat berpihak pada pemilik perusahaan termasuk pemegang saham. Berdasarkan teori *stakeholder*, penerapan SDGs secara luas dalam praktik bisnis dengan memenuhi berbagai kepentingan *stakeholder*, akan membantu meningkatkan reputasi perusahaan dan bisa menurunkan

premi risiko perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, meningkatnya pengungkapan kepatuhan SDGs akan mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan dihadapan para investor. Sangat disarankan bagi korporasi untuk terus mengembangkan strategi bisnis yang melibatkan praktik SDGs karena praktik tersebut dapat menjamin kebutuhan generasi saat ini dan mendatang (Lawati & Hussainey, 2022). Implikasi praktis yang penting bagi regulator, pembuat kebijakan, manajer, dan dewan direksi untuk merekomendasikan perusahaan mengadopsi SDGs dalam operasi bisnis dan memberikan respons positif terhadap seluruh pemangku kepentingan, sehingga bisa meningkatkan reputasi perusahaan di pasar dalam industri sejenis.

4. Teori legitimasi.

Teori legitimasi mengatakan bahwa batasan dari penetapan norma, nilai sosial, dan reaksi dapat memicu analisis dari perilaku organisasi untuk lebih mementingkan faktor lingkungan (Chariri & Ghozali, 2014). Dasar dari pemikiran teori legitimasi adalah keberlanjutan akan keberadaan perusahaan berdasarkan apabila masyarakat menyadari perusahaan beroperasi dalam nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat (Kepakisan & Budiasih, 2022). Legitimasi perusahaan dapat dilihat melalui teknik keselarasan antara nilai sosial dengan norma perilaku dalam sistem sosial di masyarakat. Teori ini juga memiliki makna bahwa tindakan dari perusahaan harus mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima masyarakat. Kehadiran *sustainability report* yang berisi pengungkapan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan khususnya terkait SDGs menjadi sarana agar perusahaan mendapat legitimasi dari masyarakat. Ketika perusahaan mendapat legitimasi dari masyarakat, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja keuangannya dalam jangka panjang (Arifianti & Widianingsih, 2022). Faktanya, menurut teori

legitimasi, pengungkapan informasi non-keuangan merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbaiki reputasi (Cosma *et al.*, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, pengungkapan keberlanjutan masih bersifat sukarela, sehingga perusahaan yang melakukan ini masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan faktor-faktor pendorong yang mampu meningkatkan jumlah pengungkapan keberlanjutan, khususnya di Indonesia. Beberapa pendapat menegaskan faktor yang diduga dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai keberlanjutan baik dalam hal pencapaian SDGs ataupun pelaksanaan CSR, yaitu:

1. Ukuran perusahaan.

Perusahaan yang memiliki aset lebih banyak cenderung akan mengungkapkan lebih banyak informasi pertanggungjawaban terkait aktivitas lingkungan dibandingkan perusahaan dengan ukuran lebih kecil. Hal itu terjadi karena perusahaan besar memperoleh sorotan masyarakat yang lebih luas, karena aktivitas perusahaan lebih banyak berdampak kepada lingkungan atau masyarakat (Wahyuningrum *et al.*, 2022). Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih banyak melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan untuk memenuhi permintaan *stakeholder* (Arifianti & Widianingsih, 2022).

2. Tingkat sensitivitas industri.

Berdasarkan pendekatan lingkungan, industri dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *high-profile industry* (sensitivitas lingkungan tinggi) dan *low-profile industry* (sensitivitas lingkungan rendah). Perusahaan *high-profile* menghadapi pemantauan yang lebih intens, visibilitas sosial yang lebih besar, dan tekanan publik karena operasinya, sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung dan luas terhadap lingkungan (Wang *et al.*, 2013).

3. Diversitas gender.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam GRI adalah kesetaraan gender. Direksi berkewajiban menyusun daftar pemegang saham, menyimpan ikhtisar RUPS dan rapat direksi, menyiapkan laporan tahunan dan bertanggung jawab atas seluruh data dan dokumen keuangan perusahaan (Indonesia, 2007). Sering kali, direktur perempuan cenderung lebih peka terhadap perilaku tanggung jawab sosial dibandingkan direktur laki-laki. Keberagaman gender dalam dewan direksi meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menerapkan strategi ramah lingkungan (Zampone *et al.*, 2022). Keberagaman gender dapat berperan penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. *Stakeholder* yang menginginkan perusahaan lebih ramah lingkungan, direksi perempuan menjadi lebih sadar lingkungan (Said & Ridwan, 2022).

4. Penerapan *Good corporate governance* (GCG)

Proksi GCG yang digunakan dalam penelitian terkait pengungkapan keberlanjutan diantaranya adalah ukuran dewan, proporsi direktur independen, jumlah dan presentase kehadiran rapat dewan direksi dan komisaris, dan keberadaan komite CSR. Dengan demikian ukuran dan keragaman dewan meningkatkan aktivitas yang berkaitan dengan pelaporan berkelanjutan, karena setiap anggota dewan membawa perspektif, nilai, dan ide yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan (Sekarlangit & Wardhani, 2021). Perlu diketahui bahwa rapat dewan harus mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan terkait praktik keberlanjutan dan pengungkapan. Dari perspektif teori pemangku kepentingan, direktur independen meningkatkan mekanisme tata kelola bagi direktur independen untuk mengadvokasi keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan dalam jangka panjang (Rao *et al.*, 2012). Berdasarkan perspektif teori keagenan, kehadiran komite

CSR juga dapat mengurangi permasalahan keagenan yang mungkin terjadi dan komite CSR meningkatkan transparansi dengan meningkatkan keterbukaan informasi (Fuente *et al.*, 2017). Dengan kata lain perusahaan yang menerapkan CSR cenderung berhasil dalam mengimplementasikan SDGs (Farida, 2022). Oleh karena itu, keberadaan komite CSR diharapkan dapat mendukung pengungkapan informasi SDGs dalam laporan keberlanjutan (Sekarlangit & Wardhani, 2021).

D. Definisi dan Tujuan Pelaporan

Berkaitan dengan akuntansi keuangan, pelaporan keuangan memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan saja, tetapi juga mencakup media laporan lain. Laporan keuangan menurut Spiceland *et al.*, (2009) meliputi:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
2. Informasi pelengkap, misalnya pengungkapan informasi terkait sektor bisnis perusahaan
3. Media pelaporan lainnya, seperti diskusi dan analisis manajemen, atau laporan kepada pemegang saham
4. Informasi lain, seperti diskusi tentang kompetisi pasar dan syarat yang ditentukan oleh pasar modal, laporan analisis manajemen, statistik ekonomi mikro dan makro, dan artikel *ter-update* tentang perusahaan.

Salah satu laporan keuangan yang disusun oleh akuntan untuk menjelaskan volatilitas dalam suatu periode meliputi informasi keuangan dan non keuangan yang berisi informasi yang sangat lengkap. Untuk membantu investor mengukur keyakinan di masa depan dan menilai kinerja perusahaan, tidak cukup hanya merepresentasikannya dengan menggunakan informasi keuangan saja. Perlu diketahui informasi keuangan dapat dibuat lebih jelas dan mudah dipahami melalui penggunaan grafik visual dan pergerakan angka yang dihitung

dengan menggunakan rasio. Namun, penting bagi pengguna laporan mengetahui secara kualitatif informasi lebih rinci agar mengetahui kemampuan dan kapasitas yang dimiliki perusahaan, terutama strategi dapat menjaga stabilitas agar perusahaan tetap berkelanjutan (*going concern*). Pelaporan untuk mengidentifikasi, mengungkapkan risiko dan peluang yang terkait dengan seluruh aspek aktivitas perusahaan. Pelaporan merupakan langkah awal dalam siklus pengelolaan keberlanjutan, yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan target untuk meningkatkan kinerja, serta terakhir meliputi evaluasi dan perbaikan kinerja periode sebelumnya.

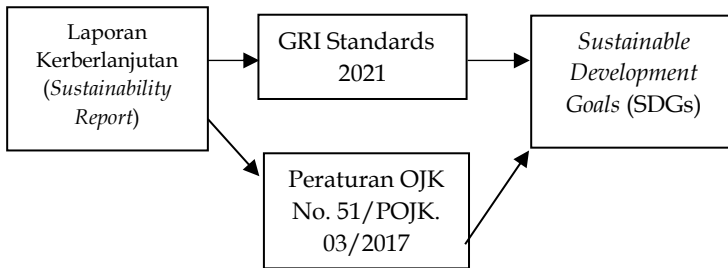
E. Pelaporan Keberlanjutan

Berdasarkan pada *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Reporting* (SR) adalah laporan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan mengenai dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan oleh operasional bisnis perusahaan (Nichola & Septiani, 2019). Pelaporan keberlanjutan merupakan cara bagi perusahaan untuk melaporkan permasalahan terkait faktor lingkungan, sosial dan etika dalam operasional yang dikerjakan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memperoleh dampak positif dari mengurangi emisi karbon dengan memperkenalkan panel surya, namun dapat memperoleh dampak negatif di wilayah lokal karena polusi dari kendaraan yang mengangkut barang dagangan perusahaan. Pelaporan berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk merefleksikan hal ini dan melaporkan secara transparan dampak positif dan negatifnya. "Pelaporan hijau" menyatakan bahwa tanggungjawab sosial dan reputasi transparan dapat meningkatkan kesadaran merk dan juga laba perusahaan (Emerick, 2024)

Saat ini *Sustainability Report* dapat menjadi tolak ukur kinerja keberlanjutan perusahaan. Di Indonesia, *Sustainability Report* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan

Perusahaan Publik. POJK tersebut menjelaskan bahwa *Sustainability Report* dipandang sebagai media emiten dan perusahaan menyajikan informasi kontribusi dan capaian terkait SDGs. Menurut pedoman dari POJK, *Sustainability Report* memiliki manfaat bagi internal perusahaan seperti penajaman visi dan strategi terkait aspek keberlanjutan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keberlanjutan serta memperkuat manajemen perusahaan dalam aspek keberlanjutan. Selain itu, manfaat dari sisi eksternal dapat meningkatkan beberapa aspek perusahaan antara lain daya saing, hubungan dengan pemangku kepentingan, citra, reputasi emiten dan perusahaan publik termasuk kepercayaan publik (Arifianti & Widianingsih, 2022). Menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat informasi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan jasa keuangan dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pelaporan keberlanjutan merupakan laporan yang disusun dan disajikan oleh perusahaan untuk mengungkapkan upaya menjadi perusahaan yang mempertanggungjawabkan kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini mencakup prinsip-prinsip dan standar pengungkapan yang dapat mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan yang terlibat mulai dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.



Gambar 5. 1 Dasar Acuan Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia
Sumber: (Mardika & Faisal, 2022)

Prinsip - Prinsip Pelaporan Keberlanjutan

Prinsip-prinsip pelaporan berperan penting dalam menciptakan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan dan hendaknya diterapkan oleh semua perusahaan ketika menyiapkan laporan keberlanjutan. Beberapa prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok:

1. Prinsip penentuan isi laporan yang menjelaskan proses untuk menentukan isi laporan yang akan dibahas, dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, ekspektasi konten, dan kepentingan substantif dari para *stakeholder*.
2. Prinsip-prinsip penentuan kualitas laporan memberikan panduan berupa strategi menjamin kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk susunan kata yang tepat. Kualitas informasi penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja dengan tepat dan mengambil tindakan yang tepat.

Laporan keberlanjutan dapat diterbitkan secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam laporan tahunan. Dengan demikian ada beberapa alasan perusahaan kemudian menyampaikan laporan keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunannya, di antaranya:

1. Laporan keberlanjutan digunakan sebagai perantara untuk melakukan komunikasi antara manajemen dan *stakeholder*

dalam penyampaian informasi tentang pembangunan berkelanjutan oleh suatu korporasi.

2. Menciptakan citra diri yang positif di kalangan para pemangku kepentingan.
3. Mencari legitimasi dari para pemangku kepentingan.

Manfaat Pelaporan Keberlanjutan:

1. Membuktikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pemahaman atas dampak sosial, lingkungan, ekonomi dan tata kelola perusahaan.
2. Sebagai bentuk transparansi sehingga *stakeholder* dapat mengetahui praktik bisnis yang dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.
3. Memiliki makna bagi perusahaan untuk mempelajari tentang area potensial untuk pengembangan dengan melihat kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan lain.
4. Sebagai bentuk kemampuan untuk membandingkan hasil kinerja dengan pesaing dan perusahaan sejenis (Emerick, 2024).

Hal-hal yang seharusnya termuat dalam laporan keberlanjutan menurut POJK No.51/03/2017, yaitu meliputi:

1. Penjelasan strategi keberlanjutan, yang merupakan refleksi visi misi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan
2. Ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan, menjelaskan kinerja perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi yang terintegrasi dengan portofolio produk atau jasa perusahaan
3. Profil singkat perusahaan
4. Penjelasan Direksi mengenai pencapaian kinerja, strategi dan tantangan di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi.
5. Tata kelola keberlanjutan, yang memuat komitmen perusahaan untuk menjalankan tata kelola sosial, lingkungan dan ekonomi.

6. Kinerja keberlanjutan, yang menjadi gambaran rinci tentang komitmen perusahaan dalam membangun budaya keberlanjutan dan menjelaskan budaya keberlanjutan tersebut kepada seluruh *stakeholder*.

Laporan keberlanjutan seharusnya juga mencakup penjelasan yang jelas dan ringkas tentang makna dari keberlanjutan bagi perusahaan dan seluruh aktivitasnya. Idealnya, informasi ini sejatinya dapat diukur secara objektif, sehingga *stakeholder* dapat memahami relevansi informasi tersebut dengan isu ESG bagi model bisnis perusahaan (Emerick, 2024). Selain itu, laporan keberlanjutan juga seharusnya mengakomodasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.

F. Pengungkapan dan Pengungkapan Keberlanjutan Berdasarkan GRI

Pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI bertujuan untuk memastikan transparansi tentang teknik suatu organisasi berkontribusi, terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar GRI memungkinkan organisasi untuk mengungkapkan kepada publik dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari kegiatan inti, dampak terhadap hak asasi manusia, dan strategi mengatasi dampak tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi mengenai dampaknya terhadap organisasi dan memperkuat akuntabilitas organisasi. Standar ini mencakup pengungkapan yang memungkinkan organisasi melaporkan informasi tentang dampaknya secara konsisten dan andal. Hal ini akan meningkatkan keterbandingan antar perusahaan dan organisasi internasional dan informasi yang disajikan dapat lebih berkualitas mengenai dampak sosial, lingkungan dan ekonomi. Dengan demikian memungkinkan pengguna informasi untuk melakukan penilaian dan membuat keputusan yang tepat mengenai dampak dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan POJK Nomor 51 Tahun 2017 untuk Perusahaan Keuangan dan Layanan Publik memuat pedoman standar baru untuk Inisiatif Pelaporan Global (GRI). *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda. MajalahCSR.id (2022) menyatakan bahwa kegiatan utama GRI berfokus untuk mengembangkan standar dan pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan, sehingga mencapai transparansi dalam pelaporan perusahaan. Sebelumnya mengacu pada GRI Standards 2020, kini diperbarui menjadi GRI Standards 2021. Standar referensi pelaporan yang diakui secara global terdiri dari beberapa standar, antara lain SASB 8000, A1000, dan standar lain. Namun, standar GRI menjadi pedoman pelaporan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Standar GRI terbaru adalah sistem modular yang terdiri dari tiga elemen utama. merevisi standar universal sebelumnya dan memperkenalkan bidang standar baru yang lebih mudah disesuaikan. Pedoman yang diperbarui ini memberikan standar universal yang lebih lengkap dan mengubah cara anda menulis kode. Sebelumnya, standar universal ditulis dalam kode 101-103, tetapi sekarang lebih sederhana yaitu cukup menggunakan saja kode nomor urutnya yaitu GRI 1, 2, dan 3.

GRI 1 atau “fundamental” menjelaskan tujuan dari Standar GRI, yang mengklarifikasi tentang konsep penting, dan menjelaskan strategi penggunaan standar GRI. GRI 1 juga memuat persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dengan pelaporan sesuai standar GRI. Selain itu, GRI 1 juga membuat spesifikasi prinsip yang mendasar bagi pelaporan yang berkualitas, seperti akurasi, keseimbangan dan dapat diuji. Sementara GRI 2 menggambarkan “pengungkapan umum”, atau pengungkapan identitas lembaga yang melaporkan keberlanjutan secara umum. GRI 2 memuat pengungkapan tentang struktur organisasi dan praktik pelaporan secara rinci, aktivitas operasional dan buruh atau pekerja, tata kelola, strategi, kebijakan, praktik dan hubungan dengan pemangku

kepentingan. GRI 2 memberikan pandangan mengenai profil dan skala usaha perusahaan dan membantu menyediakan konteks pemahaman akan dampak operasional perusahaan. Di sisi lain, GRI 3 menggambarkan strategi organisasi mengadopsi pendekatan manajemen terhadap isu-isu keberlanjutan yang muncul dan diterapkan dalam organisasi. Pada GRI 3, dijelaskan tahapan-tahapan perusahaan dapat menentukan topik yang paling relevan atas dampak operasionalnya, serta menggambarkan strategi standar sektor digunakan dalam proses pelaporan.

Hal baru berikutnya adalah adanya tambahan standar per sektor industri. Standar sektor GRI bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi dan kelengkapan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Di masa depan, GRI akan mengembangkan standarnya untuk 40 sektor industri, yang diawali dengan sektor yang paling tinggi dampak lingkungan, sosial dan ekonominya, seperti minyak dan gas alam, pertanian, akuakultur, dan perikanan, serta pertambangan. Pada standar sektor, perusahaan dapat mengikuti pedoman sesuai sektor bisnisnya. Standar sektor berisi bagian awal yang memberikan pandangan tentang karakteristik sektor, termasuk aktivitas dan hubungan bisnis yang dapat mengatasi dampak tersebut. Sementara bagian utama dari standar sektor memuat berbagai topik material yang memiliki kecenderungan pada sektor tertentu. Standar sektor memberikan gambaran tentang harapan *stakeholder* secara luas mengenai pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dalam sektor industri.

Selanjutnya, ada 31 standar topik yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memilih topik yang penting dan digunakan dalam pelaporan area standar sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Standar topik ini contohnya adalah keanekaragaman hayati, limbah, Kesehatan, keselamatan kerja, dan perlakuan nondiskriminatif. Masing-masing standar topik membantu memberikan pandangan terhadap pengungkapan yang spesifik dan strategi perusahaan mengatasi dampak yang terkait dengan topik tersebut. Hal ini tentu akan memudahkan

perusahaan untuk menganalisis materi keberlanjutan tentang pedoman tersebut. Namun, pemetaan lebih lanjut diperlukan agar dapat menghubungkan permasalahan keberlanjutan setiap unit bisnis dengan tepat. Pedoman Standar GRI 2021 berlaku mulai 1 Januari 2023, tetapi upaya implementasi diterapkan sebelum standar ini berlaku.

G. Penutup

Pengungkapan mengacu pada cara menjelaskan hal-hal bermanfaat yang dianggap penting bagi pengguna, selain yang disajikan dalam laporan keuangan (Suwardjono, 2008). Standar akuntansi keuangan telah menjelaskan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak utama yang menjadi fokus pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan juga difokuskan untuk investor dan kreditor. Namun, seiring perkembangan teknologi dan lingkungan serta tuntutan dari masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga meliputi informasi non keuangan secara kualitatif. Informasi kualitatif yang dimaksud adalah pengungkapan keberlanjutan, sehingga perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai tanggung jawabnya dalam memenuhi legitimasi dan kepentingan *stakeholder* dari aspek sosial lingkungan. Pengungkapan dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia sudah bersifat wajib bagi perusahaan bidang jasa keuangan dan perusahaan publik menurut Peraturan OJK No. 51/03/2017. Pengungkapan dan pelaporan ini juga hendaknya didasarkan pada standar GRI tahun 2021, sehingga dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, B. and Djakman, C.D. (2020) 'Persepsi Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sustainability Reporting', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), pp. 405–430.
- Arifianti, N.P. and Widianingsih, L.P. (2022) 'Kualitas Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris atas Perusahaan Pertambangan di Indonesia', *Akuntansi Dewantara*, 6(3), pp. 68–78.
- Chariri, A. and Ghozali, I. (2014) *Teori akuntansi: International Financial Reporting System (IFRS)*. 4th edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cosma, S. et al. (2020) 'Sustainable development and european banks: A non-financial disclosure analysis', *Sustainability (Switzerland)*, 12(15), pp. 1–19. doi:10.3390/su12156146.
- Emerick, D. (2024) *What is Sustainability Reporting?* Ottawa. Available at: <https://www.esgthereport.com/what-is-esg/the-g-in-esg/what-is-sustainability-reporting/>.
- Farida, A.L. (2022) 'Pengujian kinerja keuangan: Sustainable development goals sebagai intervening di Bursa Efek Indonesia', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), pp. 4790–4796. doi:10.32670/fairvalue.v4i10.1650.
- Fuente, J.A., Garcia-Sanchez, I.M. and Lozano, M.B. (2017) 'The Role of The Board of Directors in The Adoption of GRI Guidelines for The Disclosure of CSR Information', *Journal of Cleaner Production*, 141.
- Global Report Initiative (2021) *Standar Terkonsolidasi*. Available at: <https://www.globalreporting.org/>.
- Gunawan, J., Permatasari, P. and Tilt, C. (2019) 'Sustainable development goal disclosures: Do they support responsible consumption and production?', *Journal of Cleaner Production*,

246. doi:10.1016/j.jclepro.2019.118989.

Indonesia, R. (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LL SETNEG*. Available at: [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

Kepakisan, I.G.A.A.P.D. and Budiasih, I.G.A.N. (2022) 'Sustainability Report dan Manajemen Laba Dengan Good Corporate Governance Quality Sebagai Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), p. 3819. doi:10.24843/eja.2022.v32.i02.p17.

Lawati, H. Al and Hussainey, K. (2022) 'Does Sustainable Development Goals Disclosure Affect Corporate Financial Performance?', *Sustainability (Switzerland)*, 14(13), pp. 1-14. doi:10.3390/su14137815.

MajalahCSR.id (2022) *GRI Keluarkan Standard Terbaru untuk Pedoman Laporan Keberlanjutan*. Available at: <https://majalahcsr.id/gri-keluarkan-standard-terbaru-untuk-pedoman-laporan-keberlanjutan/>.

Mardika, W. and Faisal (2022) Analisis Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) PT. Gas Negara Tbk Tahun 2016-2020 Berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), pp. 1-15. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Nichola, A. and Septiani, A. (2019) 'Analisis Pengungkapan Indikator Kinerja Dalam Sustainability Reporting Perusahaan Pertambangan Besar Di Indonesia', *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), pp. 1-13. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Otoritas Jasa Keuangan (2017) *POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. Indonesia. Available at: [https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL POJK 51 - keuangan berkelanjutan](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan).

- Pizzi, S. *et al.* (2022) 'Voluntary disclosure of Sustainable Development Goals in mandatory non-financial reports: The moderating role of cultural dimension', *Journal of International Financial Management and Accounting*, 33(1), pp. 83–106. doi:10.1111/jifm.12139.
- Rao, K.K., Tilt, C.A. and Lester, L.H. (2012) 'Corporate governance and environmental reporting: an Australian study', *Corporate Governance*, 12(2), pp. 143–163.
- Said, S.N.R. and Ridwan, R.A. (2022) 'Peran Diversitas Gender Dalam Pengungkapan Sustainability Development Goals Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI', *Jurnal Mirai Management*, 7(3), pp. 321–329. doi:10.37531/mirai.v7i3.3467.
- Sekarlangit, L.D. and Wardhani, R. (2021) 'The Effect of The Characteristics and Activities of The Board of Directors on Sustainable Development Goal (SDG) Disclosures: Empirical Evidence from Southeast Asia', *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). doi:10.3390/su13148007.
- Spiceland, J.D. *et al.* (2009) *Intermediate Accounting*. 5th edn. New York: McGraw Hill.
- Suwardjono (2008) *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. 3rd edn. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- United Nations (2015) *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, *un.org*. Available at: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- United Nations (2020) *Take Action for The Sustainable Development Goals*, *un.org*. Available at: <https://sdgs.un.org/goals>.
- Wahyuningrum, I.F.S., Oktavilia, S. and Utami, S. (2022) 'The Effect of Company Characteristics and Gender Diversity on Disclosures Related to Sustainable Development Goals', *Sustainability (Switzerland)*, 14(20), pp. 1–13. doi:10.3390/su142013301.

Wang, J., Song, L. and Yao, S. (2013) 'The Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From China', *Journal of Applied Business Responsibility*, 29.

Zamponi, G. *et al.* (2022) 'Gender diversity and SDG disclosure: the mediating role of the sustainability committee', *Journal of Applied Accounting Research* [Preprint]. doi:10.1108/JAAR-06-2022-0151.

TENTANG PENULIS

Khairina Nur Izzaty, S.E., M.Si., Akt.

STIE Bank BPD Jateng



Penulis Lahir di Semarang pada bulan Maret tahun 1990, Penulis menyelesaikan studi strata 1 nya di Universitas Diponegoro program studi Akuntansi pada tahun 2011. Penulis kemudian menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan pada tahun 2012 dan studi strata 2 Magister Akuntansi pada tahun 2015 di Universitas Diponegoro. Penulis saat ini berkarir sebagai dosen tetap program studi akuntansi STIE Bank BPD Jateng, Semarang. Penulis aktif mengajar pada bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan sistem pengendalian manajemen. Sebagai dosen, penulis aktif melakukan penelitian yaitu fokus pada bidang akuntansi keuangan dengan tema kepatuhan perusahaan pada Standar Akuntansi Keuangan dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal-jurnal nasional, menulis buku ajar, serta aktif menjadi editor pada jurnal nasional terakreditasi.

BAB 6

AKUNTANSI KARBON DAN EMISI GAS RUMAH KACA

Prawita Yani, S.E., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia yang semakin dinamis, faktor lingkungan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan begitu, terjadinya perubahan iklim sangat mempengaruhi kondisi yang terjadi dalam ranah dunia usaha. Perubahan iklim global yang mengalami perubahan drastis sebagai akibat dari pemanasan ekstrim dan penggunaan industri secara berlebihan menyebabkan terjadinya perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Meski aktivitas yang terjadi meliputi rumah tangga maupun entitas yang lain, namun yang menjadi kontributor terbesar dari emisi pemanasan global adalah perusahaan yang bergerak di industri. Guna memastikan bahwa pelaku industri bisa menciptakan kondisi yang berkelanjutan, penciptaan nilai maupun pengaruhnya secara kuantitatif perlu diperhatikan. Dampak negatif terjadi bila terdapat sentimen negatif dari pemangku kepentingan eksternal yang akan membuat nilai perusahaan jatuh di pasar, sehingga pihak eksternal seperti regulator akan menjatuhkan sanksi bila ketentuan lingkungan tersebut tidak dipatuhi.

B. Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim yang terjadi akibat terlepasnya berbagai macam gas seperti karbondioksida kemudian memicu berbagai macam fenomena lingkungan. Dimulai dari pemanasan global hingga dengan dampak yang paling ekstrim seperti perubahan

iklim. Di belahan dunia, banyak terjadi kondisi yang tidak semestinya seperti es di kutub utara yang mencair sehingga menyebabkan banjir, serta musim yang tidak menentu sehingga terjadi peningkatan suhu yang terlampaui ekstrim. Hal ini berdampak pada gagalnya panen, ketidakmampuan petani untuk menghasilkan komoditas yang rutin dan berkualitas, memburuknya kesehatan manusia hingga dengan bencana kekeringan dan kelaparan. Perlu diketahui penamaan gas rumah kaca berasal dari ilustrasi lapisan atmosfer yang melindungi bumi selayaknya dalam bangunan rumah kaca yang terdapat pada tanaman yang dibudidayakan. Fenomena yang terjadi di dalam atmosfer belakangan ini adalah meningkatnya paparan pantulan sinar radiasi infra merah yang berasal dari sinar matahari ke atmosfer bumi yang pada akhirnya menimbulkan dampak berupa pemanasan global (Yuliana, 2017).

Lebih lanjut, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan yang sering terjadi merupakan beberapa dampak adanya pemanasan global. Dengan curah hujan yang sulit untuk diestimasi, pengairan pertanian dan perkebunan mengalami kendala dan menyebabkan gagal panen di beberapa belahan dunia.



Gambar 6.1 Produksi emisi gas rumah kaca terhadap atmosfer bumi
Sumber: (www.pasardana.id)

Gas rumah kaca berasal dari berbagai macam sumber seperti dari rumah tangga, industri kecil maupun industri dalam skala masif. Sebagai contoh dalam pembakaran sampah secara terbuka banyak menghasilkan gas berbahaya seperti CO, CO₂, CH₄, NO_x, SO₂, senyawa *volatile organic compound* (VOC), *Particulate Matter* 2.5 (PM_{2.5}), PM₁₀ yang menyebabkan pemanasan global (Das *et al.*, 2018). Terlebih, pengelolaan sampah rumah tangga saat ini masih menghadapi dilema karena masyarakat melakukan pembakaran sebagai metode yang paling efektif. Dampaknya proses tersebut dapat menghasilkan senyawa berbahaya yang akan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan memicu pemanasan global yang pada akhirnya akan berbahaya bagi lingkungan secara jangka panjang (Wahyudi *et al.*, 2019). Selain itu, jejak emisi dari rumah tangga di kawasan pemukiman seperti penggunaan bahan bakar untuk memasak juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (Novananda & Setiawan, 2015).

Bagi masyarakat Indonesia, makanan tempe dan tahu merupakan makanan pendamping nasi yang murah dan bergizi tetapi ikut menciptakan senyawa berbahaya. Dalam proses pengolahan tahu dan tempe yang dimulai dari penanaman kedelai yang menjadi sumber protein utama hingga menjadi 1 kilogram tahu. Air limbah yang dihasilkan dari proses angkut, budidaya kedelai merupakan kontributor utama yang menciptakan senyawa berbahaya yang menghasilkan karbondioksida. Dengan begitu ditunjukkan bahwa industri kecil juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca secara signifikan (Lingkungan *et al.*, 2022). Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pabrik yang merupakan simbol dari industrialisasi memegang peran dominan dalam penyumbang emisi gas rumah kaca. Termasuk dalam industri konstruksi jalan, proses pemanasan agregat menjadi kontributor terbesar dalam pabrik produksi aspal dengan menghasilkan sekitar 59,5% - 67,5% dari keseluruhan tahapan (Purboyo & Maha, 2019). Berbagai contoh tersebut menegaskan bahwa dari rumah tangga hingga industri besar menjadi penyumbang emisi gas

rumah kaca terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim.

C. Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

Pengaruh penciptaan nilai terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca banyak menghasilkan kesimpulan bahwa perlu dirancang suatu sistem akuntansi karbon yang berguna bagi panduan pengungkapan di laporan keuangan keberlanjutan. Selam aini, pengaturan terhadap pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela dengan menggunakan panduan yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan sebagai laporan tambahan di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2016 yang berarti pengungkapan tersebut melebihi apa yang diharuskan (Suwardjono, 2014). Pengungkapan secara sukarela merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen perusahaan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari setiap tahapan produksi. Dalam perkembangannya, laporan tambahan tersebut menjadi kewajiban yang diungkapkan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan atau dengan kata lain *environmental, social and governance (ESG) report*. Laporan Keberlanjutan menjadi suatu keharusan bagi semua lembaga jasa keuangan, emiten dan bagi perusahaan publik menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/ POJK.03/ 2017. Dinyatakan dalam lampiran bahwa angka II mengenai Isi Laporan Keberlanjutan di angka 2 huruf b mengenai aspek lingkungan hidup yang meliputi informasi tentang penggunaan energi, pengurangan emisi, pengurangan limbah dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari Laporan Keuangan.

Diketahui beberapa dampak positif sebagai dasar dari diterapkannya penyusunan laporan keberlanjutan antara lain:

1. Mendapat penilaian positif dari beberapa pengguna eksternal; sejumlah investor menilai adanya laporan keberlanjutan merupakan nilai tambah yang memudahkan pengambilan keputusan investasi. Menurut investor,

keberlanjutan jangka panjang merupakan faktor kunci yang menjamin keberlangsungan imbal balik dari hasil investasi yang ditanamkan (Florenca & Handoko, 2021).

2. Mendapat media eksposur yang bisa meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Hal itu sejalan dengan teori legitimasi bahwa dengan semakin gencarnya pengungkapan atas emisi karbon, maka perusahaan bisa semakin mengukuhkan legitimasinya dihadapan publik. Dengan demikian calon investor dan para pemegang saham akan lebih tertarik dalam menanamkan investasi maupun modal di perusahaan tersebut
3. Meningkatkan profitabilitas perusahaan karena meningkatnya kinerja lingkungan, maka dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca. Pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca dipandang sebagai bukti nyata adanya kinerja lingkungan. Para pemerhati pasar akan lebih memperhatikan hal tersebut, sehingga produk dari perusahaan akan lebih mendapat tempat di hati konsumen. Dengan demikian, pendapatan perusahaan akan lebih meningkat dan rasio profitabilitas perusahaan juga ikut tumbuh.
4. Meningkatkan efisiensi biaya lingkungan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi regulasi dari pemerintah yang menyangkut tentang keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai contoh berupa sanksi untuk penebangan pohon yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Dengan perhatian terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diharapkan bisa mengurangi biaya tersebut.

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan
 Efforts and Achievements of Emission Reduction



Gambar 6.2 Bagian emisi gas rumah kaca dari laporan keberlanjutan PT Unilever, Tbk.
 Sumber: (www.unilever.co.id)

D. Akuntansi Karbon

Akuntansi karbon mulai dikenal sejak 2008 dengan pengukuran emisi karbon di perusahaan dan cara menetapkan target untuk menguranginya. Pada tahun 2011, di Indonesia dikenal sebagai suatu proses pengukuran, pencatatan dan pelaporan karbon yang dihasilkan oleh perusahaan (Dwijayanti, 2011). Pada dasarnya sistem akuntansi ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh industri. Dalam penerapannya di Indonesia banyak dihasilkan oleh industri batubara. Akuntansi karbon sendiri belum diterapkan secara penuh di Indonesia, tetapi seiring mulai diberlakukannya pajak karbon yang tertunda karena kondisi global, maka dengan mengacu pada Peraturan OJK (POJK) No. 51 Tahun 2017, akuntansi karbon ini bisa diterapkan. Berbagai studi telah menguji efektifitas dari penerapan pajak karbon untuk industri di Indonesia. Mayoritas dari studi tersebut menyebutkan bahwa kesiapan perusahaan di Indonesia masih belum tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa mayoritas dari perusahaan tersebut belum melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan baik yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan maupun terpisah. Sebagian besar penyampaian laporan keberlanjutan diimplementasikan di situs perusahaan dalam fitur hubungan investor. Hal ini dimaksudkan untuk

menunjukkan itikad baik dari perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan investor dalam kaitannya dengan penciptaan nilai sebagai bukti nyata komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Hal itu dikarenakan belum ada standar khusus mengenai akuntansi karbon, pada penelitian yang dilakukan di tahun 2015, terdapat suatu acuan yang digunakan untuk merancang desain dari sistem akuntansi karbon yang dimulai dari upaya mengurangi emisi karbon. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk setiap tahapan dari berbagai industri selalu meninggalkan jejak karbon. Namun dalam setiap masalah ada beberapa solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi kondisi tersebut. Jejak karbon sebagai contoh timbul dari perpindahan atau distribusi bahan baku dari produsen ke pabrik pengolahan. Dengan demikian perpindahan tersebut banyak melibatkan berbagai peralatan dan juga tenaga manusia. Untuk menanggulangnya bisa dengan meminimalisir mobilitas manusia di dalam tahapan tersebut agar pegawai yang tidak terlibat langsung seperti bagian administrasi bisa bekerja dari rumah. Dengan demikian jejak karbon yang berasal dari transportasi pegawai administrasi yang dimulai dari rumah ke tempat kerja bisa dihilangkan. Untuk lebih lengkapnya, berikut disajikan tabel yang memuat berbagai cara untuk meminimalisir jejak karbon

Metode Reduksi Karbon bagi Entitas Bisnis

Mengubah bola lampu emisi rendah.	Mematikan komputer (tidak siaga)
Membayar pajak karbon.	Matikan lampu saat jam kerja selesai
Membangun pencakar.	Menghentikan pengerjaan tugas
Menekan panas bumi.	Pay the market / Membayar pasar
Menangkap karbon.	Berpikir di luar Kemasan
Biarkan karyawan bekerja dekat dengan rumah.	Perdagangan karbon untuk modal.
Membayar tagihan Anda Online.	Menetapkan anggaran karbon untuk organisasi (perusahaan).
Membuka jendela.	Membayar kesalahan penanganan karbon anda.
Meminta para ahli untuk Audit energi	Membuat satu perubahan yang tepat
Membeli tenaga hijau	Menanam pohon di daerah tropis.
Tinggalkan dasi (sehari-hari adalah hari biasa)	Gerakan hijau (kendaraan perusahaan berbahan bakar bio).
Terbang langsung ke lokasi	Lakukan Pembakaran Batubara dengan benar
Mengikuti standar emisi California	Menetapkan standar emisi karbon yang lebih tinggi.
Mengubah makanan menjadi bahan bakar (Bio bahan bakar)	Menerangi ruang publik dengan lampu hemat energi (LED).

Gambar 6.3 Metode reduksi karbon bagi entitas bisnis

Sumber: (Ratnatunga, 2008)

Dengan berbagai metode tersebut, dapat dirancang suatu gambaran sistem akuntansi karbon yang bisa diterapkan di industry sebagai berikut:

Ekstraksi empiris pengungkapan manajemen lingkungan dalam Sistem Reduksi Karbon gagasan Ratnatunga (2008)	Kode *)	Jumlah Pengungkapan	Rancangan Sistem Akuntansi dan Sistem Pelaporan Emisi Karbon	Kodifikasi Ulang **)
Mengubah bola lampu emisi rendah.	MPC 1	0	-	
Membayar pajak karbon.	MPC 2	0	-	
Membangun pencakar.	MPC 3	0	-	
Menekan panas bumi.	MPC 4	12	Penghematan energi secara menyeluruh	SREK6
Menangkap karbon.	MPC 5	34	Penangkapan karbon dengan teknologi produksi, penyuntikan karbon dalam bumi, ataupun proses fotosintesis alamiah	SREK1
Biarkan karyawan bekerja dekat dengan rumah.	MPC 6	0	-	
Membayar tagihan Anda Online.	MPC 7	0	-	
Membuka jendela.	MPC 8	0	-	
Meminta para ahli untuk Audit energi	MPC 9	1	Adanya pengendalian internal untuk audit energi	SREK11

Gambar 6.4 Rancangan sistem akuntansi dan pelaporan emisi Karbon

Sumber: (Shodiq & Febri, 2015)

Laporan keberlanjutan meliputi semua pengungkapan emisi karbon dan juga penerapan dari sistem akuntansi karbon. Dalam laporan berkelanjutan selaras dengan tujuan dari akuntansi karbon yaitu berupa pengukuran jejak karbon dalam rangka menyusun target untuk mencapai pengurangan emisi karbon di perusahaan. Dengan demikian, tujuan penciptaan nilai yang menjadi daya tarik investor akan semakin mudah tercapai dan strategi bisnis akan semakin mudah terealisasi. Selain itu, apabila penerapan pajak karbon diberlakukan, perusahaan sudah mempersiapkannya dengan baik melalui pelaporan rutin atas laporan keberlanjutan.

Kode	Rancangan Sistem Akuntansi dan Sistem Pelaporan Emisi Karbon	Kuantifikasi Pelaporan
SREK1	Penangkapan karbon dengan teknologi produksi, penyuntikan karbon dalam bumi, ataupun proses fotosintesis alamiah	Adanya satuan emisi CO2 dikendalikan yang dapat diukur dalam satuan cost
SREK2	Investasi lahan penangkapan karbon dengan proses fotosintesis alamiah	Adanya satuan jumlah hektare tanah atau satuan pohon untuk penangkapan CO2 yang dapat dikuantifikasi dalam cost
SREK3	Kendaraan dan peralatan aset bergerak menggunakan bahan bakar bio	Konversi cost penghematan emisi CO2 dengan menggunakan bahan bakar bio relatif terhadap bahan bakar fosil, atau jumlah emisi CO2 dari aset bergerak yang diungkapkan dalam bentuk cost
SREK4	Adanya Standar emisi karbon berdasar acuan tertinggi	Standar acuan yang digunakan dalam bentuk sistem akuntansi dengan output emisi yang dapat dikuantifikasi dalam cost

Gambar 6.5 Struktur sistem akuntansi dan kuantifikasi pelaporan emisi karbon

Sumber: (Shodiq & Febri, 2015)

E. Standar Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca

Untuk menilai konten yang terdapat dalam laporan keberlanjutan, diperlukan mekanisme verifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Pihak independen adalah yang terbebas dari konflik kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal. Auditor adalah pihak independen yang dimaksud dan tidak terkait dengan kepentingan pihak manapun. Dengan terbebasnya auditor, maka bisa dikatakan semua pendapat yang keluar darinya bisa memberikan keyakinan yang memadai bagi pengguna laporan keberlanjutan untuk bisa menilai dalam laporan tersebut sudah memberikan informasi yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Guna menjamin pemberlakuan proses verifikasi, disusunlah suatu standar yang berfungsi sebagai panduan untuk melakukan proses verifikasi yang berfungsi dalam memberikan keyakinan yang memadai. Disebut keyakinan yang memadai dikarenakan dalam proses pengerjaan mengumpulkan sampel dari bukti-bukti pendukung untuk disimpulkan dan diberikan pendapat. Dengan demikian kesimpulan yang berlaku adalah memberikan keyakinan dan bukan kepastian.

Di dalam standar perikatan asurans atau bisa dikatakan jasa dalam memberikan keyakinan, yang bertugas tidak harus auditor melainkan bisa praktisi. Kepakaran yang dibutuhkan tidak seperti layaknya yang dibutuhkan oleh auditor yang melakukan audit atas Laporan Keuangan. Hal ini kembali lagi kepada sifat dari Laporan Keberlanjutan yang sifatnya bisa diklasifikasikan sebagai laporan terpisah atau tidak dipisahkan dari Laporan Tahunan menurut POJK No. 51 Tahun 2017. Standar ini dinamakan Standar Perikatan Asurans Nomor 3410 mengenai Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) di Jakarta serta berlaku efektif untuk laporan asurans yang mencakup periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Khusus bagi entitas yang menerapkan sebelum tanggal pemberlakuan diperkenankan secara aturan.

Sementara, standar 3410 mengatur secara garis besar mengenai panduan untuk melaporkan laporan gas rumah kaca suatu entitas yang pada dasarnya merupakan bagian kecil dari laporan keberlanjutan. Standar ini mengatur mengenai keberlanjutan dari perikatan sebelumnya, seperti pengambilan sampel dan panduan dalam memberikan keyakinan yang dilakukan oleh praktisi. Dalam menjalankan proses verifikasi, praktisi memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan menjadi bukti untuk menilai perlakuan akuntansi karbon yang tercermin dalam laporan gas rumah kaca atau laporan keberlanjutan.

F. Penutup

Pemberlakuan pajak karbon tidaklah berlebihan mengingat dampak yang diciptakan oleh emisi gas rumah kaca dapat mengganggu eksistensi manusia. Hal itu bisa dilakukan melalui penerapan konsep akuntansi karbon dan pengungkapan emisi gas rumah kaca melalui laporan berkelanjutan oleh entitas bisnis. Berbagai usaha manusia dalam memerangi pemanasan global bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang mengurangi emisi tersebut. Dalam pelaksanaannya harus melalui kolaborasi antar pihak seperti regulator, perusahaan publik yang menjadi kontributor utama penghasil emisi karbon atau gas rumah kaca. Salah satu implementasi nyata adalah laporan keberlanjutan yang tidak cukup hanya diungkapkan, namun perlu untuk diverifikasi untuk menjamin konten dari laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan rantai prosedur yang sudah dijalankan secara maksimal dipercaya dapat mengurangi dampak buruk secara jangka panjang bagi eksistensi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Das, B., Bhave, P. V., Sapkota, A., & Byanju, R. M. (2018). Estimating emissions from open burning of municipal solid waste in municipalities of Nepal. *Waste Management*, 79, 481–490. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.013>
- Dwijayanti, S. (2011). Manfaat penerapan carbon accounting di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, kotemporer* Vol. 3 No. 1
- Farhana. S., Adelina. Y. E. (2019). Relevansi Nilai Laporan Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615-628. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36>
- Florescia, V., & Handoko, J. (2021). Uji Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Media Exposure Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Dengan Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 583–598. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.32412>
- Krisna Yuliana, D. (2017). Greenhouse gas emission level in indramayu district tingkat emisi gas rumah kaca di kabupaten indramayu. In *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana* (Vol. 12, Issue 2).
- Lingkungan, J. T., Kimia, R., Riset, B., & Nasional, I. (2022). *Analysis of Potential GHG Emissions from Tofu Industry and Its Mitigation in Indonesia Analisis Potensi Emisi Gas Rumah Kaca dari Industri Tahu dan Mitigasinya di Indonesia* ARY MAULIVA HADA PUTRI*, JOKO WALUYO. 23(1), 62–070.
- Purboyo, W., & Maha, I. (2019.). *Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Campuran Aspal Industri Konstruksi Jalan*.
- Ratnatunga, Janek, (2008), *Carbonomics: Strategic Management Accounting Issues*, JAMAR, Vol. 6 No. 1, h.1-10
- Shodiq, M. J. F., & Febri, Y. T. (2015). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Emisi Karbon: Dasar Pengembangan Standar Akuntansi Karbon (Studi eksplorasi pada perusahaan

manufaktur di BEI). *Simposium Nasional Akuntansi*.

Wahyudi, J., Perencanaan, B., Daerah, P., Pati, K., Raya, J., Km, P.-K., & Tengah, P. 59163 J. (2019). Emisi gas rumah kaca (grk) dari pembakaran terbuka sampah rumah tangga menggunakan model ipcc greenhouse gases emissions from municipal solid waste burning using ipcc model. In *Jurnal Litbang* (Issue 1).

Warren, J. (2008). Carbon Accounting. (Online).([http://www.scotlink.org/files /putlication1](http://www.scotlink.org/files/putlication1) .ILINKGuidetoCarbonAccount08.pdf

TENTANG PENULIS

Prawita Yani, S.E., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya



Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 03 Mei 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Profesi Akuntan (PPAk) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Trilogi pada tahun 2007 dan melanjutkan S2 Akuntansi di Universitas Indonesia yang diselesaikannya pada tahun 2010. Penulis menekuni dunia akuntansi sejak menjadi auditor pada salah satu Kantor Akuntan Publik selama 3 tahun dari 2007 sampai dengan 2010. Keberlanjutan karir penulis ditandai dengan pencapaian sebagai *Head of Finance and Accounting* di *Non-Government Organization* (NGO) di Jakarta. Motivasi penulis di bidang Pendidikan dimulai dengan kepindahan ke Surabaya tahun 2016 dan menjadi dosen sampai dengan sekarang. Karya yang sudah diterbitkan adalah publikasi di jurnal internasional dan nasional bereputasi.

BAB 7

AKUNTANSI SOSIAL DAN DAMPAK SOSIAL PERUSAHAAN

Dr. Muchlis, S.E., M.MT.

Universitas Muhammadiyah Surabaya

A. Pendahuluan

Filosofi pengelolaan bisnis saat ini telah mengalami banyak perubahan dari pola klasik yang hanya berpijak pada pemilik modal dan kreditur untuk mencapai laba, beralih ke pola modern yang berfokus pada pemilik modal dan kreditur dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan (Belkoui, 2006). Menurut pola manajemen kontemporer, dalam menjalankan operasionalnya, sebuah perusahaan harus bisa berinteraksi dengan dampak sosial lingkungan dan ekonomi. Hal itu disebabkan sebagai entitas bisnis, perusahaan harus dapat merespon apa yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya agar komunikasi antara bisnis dan lingkungan sosialnya dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dengan berkembangnya gagasan manajemen, akuntan juga berbicara tentang strategi masalah tanggung jawab sosial ini dapat diterapkan dalam akuntansi. Akibatnya, tujuan pelaporan keuangan telah bergeser ke arah perlunya pelaporan yang berasal dari luar organisasi perusahaan untuk memberikan informasi kepada aspek sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep utama yang melandasi pengembangan akuntansi sosial, juga dikenal sebagai akuntansi sosial, sebenarnya adalah keinginan untuk memperluas tanggung jawab perusahaan.

Selama perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan, maka akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan membutuhkan investor atau kreditor untuk memenuhi dana yang diperlukan, pemerintah untuk menjamin legalitas bisnis, dan masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam melakukan aktivitas usahanya yang tidak hanya pemilik modal (*stockholders*), tetapi juga terhadap *stakeholder* lainnya, seperti karyawan, *supplier*, pelanggan, pemerintah, dan organisasi lainnya.

Perusahaan harus selalu mengimbangi keuntungan finansial dengan tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas konsekuensi apabila operasinya memengaruhi lingkungan. Untuk menghindari konsekuensi yang merugikan dan membahayakan lingkungan sosialnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun faktanya banyak bisnis yang tidak melakukan tanggung jawab sosial lingkungan. Mayoritas perusahaan masih banyak yang menciptakan polusi, kerusakan lingkungan, kerugian karyawan dan masyarakat. Besarnya dana yang harus dikeluarkan adalah salah satu alasan untuk menolak dan mengabaikan konsep tanggung jawab sosial lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus didorong agar bisa peduli dengan permasalahan sosial dan lingkungan dengan melaporkan kinerja sosial lingkungannya kepada publik.

B. Akuntansi Sosial

Akuntansi dikenal dalam dunia bisnis sebagai alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan penyedia informasi. Pemakai menerima informasi dari transaksi perusahaan melalui laporan keuangan. Akuntansi konvensional menganggap informasi dalam laporan keuangan sebagai hasil dari transaksi bisnis baik dua atau lebih entitas, tetapi yang mengabaikan hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial (Lines, 2005). Dengan demikian pengguna

laporan keuangan mendapatkan gambaran yang kurang lengkap tentang tanggung jawab sosial perusahaan karena metode akuntansi. Para ahli akuntansi telah berusaha mengembangkan akuntansi secara konsisten. Salah satu ide yang muncul adalah akuntansi sosial (makro) untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan akuntansi lingkungan (mikro) untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Sementara ciri akuntansi kontemporer adalah laporan sosial dan lingkungan, yang mengungkap dan melaporkan konsep kualitatif seperti perbaikan lingkungan, kesejahteraan, dan kualitas hidup (Hopfenbeck, 1992).

C. Mengukur Dampak Akuntansi Sosial

Dua dampak timbul dari interaksi antara bisnis dan lingkungan sosialnya. Dampak positif dikenal sebagai manfaat sosial dan dampak negatif dikenal sebagai pengorbanan sosial. Sulit untuk mengukur kedua dampak tersebut. Masalah pengukuran akuntansi sosial sangat sulit karena, dibandingkan dengan transaksi biasa yang dapat dicatat dan berdampak langsung pada posisi keuangan, akuntansi sosial memerlukan pengukuran terlebih dahulu dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan (Lines, 2005). Beberapa teknik pengukuran akuntansi sosial adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan penilaian dengan menghitung *Opportunity cost approach*.
2. Menggunakan daftar kuesioner.
3. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung kerugian masyarakat.
4. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.

D. Pelaporan Akuntansi Sosial

Menurut Belkoui (2006), pelaporan akuntansi sosial mencakup informasi tentang efek positif atau negatif perusahaan. Dasar pelaporan ini adalah relevansi informasi, dan

relevansi ini bergantung pada orang yang menggunakannya. Semakin banyak perusahaan yang melaporkan tanggung jawab sosial menunjukkan peningkatan kebutuhan akan informasi ini. Pelaporan ini sudah umum di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Jepang (Soewarjono, 2005). Metode pelaporan akuntansi sosial mencakup:

1. Praktik sederhana adalah bahwa laporan terdiri dari penjelasan akuntansi sosial tanpa data kuantitatif, baik dalam satuan uang maupun yang lainnya.
2. Praktik yang lebih maju melibatkan laporan yang mencakup penjelasan akuntansi sosial dan data kuantitatif.
3. Perusahaan juga menyusun laporan dalam bentuk neraca, yang merupakan praktik yang paling maju.

Dengan pasar modal yang semakin berkembang, bisnis melaporkan dan mengungkapkan aktifitas sosial untuk memberi tahu pemilik modal, calon investor, dan pihak luar lainnya yang juga berkepentingan. Negara-negara Eropa barat, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia telah menerapkan praktik pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan juga didorong untuk secara sukarela mengungkapkan lingkungan sosialnya secara berkala. Hal ini memungkinkan korporasi untuk menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) laporan tahunan perusahaan, yang menunjukkan kepedulian sosial dan kepedulian perusahaan (Gray, 1997).

E. Penerapan Akuntansi Sosial di Indonesia

Sejak adanya krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1997, Indonesia menghadapi krisis yang mencakup hampir semua aspek kehidupan. Jika melihat dari perspektif ekonomi, saat itu sendi-sendi perekonomian investasi, produksi, dan distribusi berhenti beroperasi, yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan global, peningkatan angka pengangguran, penurunan pendapatan perkapita, dan penurunan daya beli masyarakat, sehingga terjadi peningkatan

jumlah garis kemiskinan. Selama puncak krisis, suku bunga perbankan masih tinggi di atas 60%. Selain itu, aturan likuiditas yang ketat disebabkan oleh adanya akumulasi pada jumlah kredit yang macet oleh perusahaan dan anak perusahaan, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan likuidasi, rekapitalisasi dan restrukturisasi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan banyak hal yang tidak pasti, menyebabkan indikator ekonomi di antaranya seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan lainnya sangat sensitif terhadap masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan politik dapat memicu perasaan pasar yang kuat tentang instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini pasti akan berdampak negatif pada peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama untuk menarik kepercayaan para penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak ada bukti yang mendukung janji pemerintah untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, dan keamanan di seluruh dunia. Bahkan beberapa investor asing berencana mengalihkan investasinya ke negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja, yang dianggap lebih cocok untuk berinvestasi.

Contohnya adalah pabrik sepatu di Tangerang, Banten, dan Sidoarjo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia masih memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis. Perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak dapat menghindari masalah sosial yang dihadapinya. Bisnis mungkin tidak berfokus pada masalah sosial karena ada faktor lain seperti investasi, permodalan, produksi, dan pemasaran yang berkaitan langsung dengan operasi bisnis. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh hubungan antara bisnis dan lingkungan yang sedang mengalami krisis sosial tidak dapat dihindari.

F. Peran Akuntansi Sosial dalam Pengungkapan di Indonesia

Situasi dan kondisi tersebut mengharuskan suatu organisasi untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhan lingkungan sosialnya, yang diikuti dengan pengungkapan dan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menghasilkan sebuah laporan yang menjelaskan semua elemen dalam organisasi. Dengan demikian akuntansi bisa menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya. Secara teoritis, akuntansi sosial mengatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan sosial yang terdiri dari masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah, dan pihak lain. Lingkungan sosial ini dapat membantu operasi perusahaan karena perubahan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran ini, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengakses lingkungan sosialnya. Setelah itu, perusahaan perlu mendapatkan informasi secara teratur untuk menindaklanjuti dan mengukur keprihatinan tersebut. Diharapkan informasi ini akan bermanfaat bagi semua pihak (pemodal, *stakeholder*, dan kreditur). Aplikasi akuntansi sosial dimulai dengan aktifitas sosial yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis dan disusun sesuai dengan prinsip, teknik, dan ide akuntansi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kemudian kebijakan terhadap aktivitas dan lingkungan sosial entitas bisnis dapat dibentuk oleh perusahaan. Permasalahan akuntansi sosial ini dapat juga dihubungkan dengan prinsip *good corporate governance* (GCG), yang menjadi isu penting dalam pengelolaan perusahaan saat ini, khususnya pada prinsip yang membahas tentang entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap *stakeholder* dan lingkungan bisnisnya. Prinsip *good corporate governance* yang baik adalah mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat laporan bukan hanya berisi tentang hal yang kurang baik tetapi juga tentang hal yang baik pula. Saat ini, tuntutan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi masalah global. Perusahaan multinasional yang beroperasi di

Indonesia terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan motif bisnisnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan.

G. Kesimpulan

Akuntansi sosial masih menjadi subjek kontroversial dalam akuntansi karena masih ada perdebatan tentang seberapa besar perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Beberapa pakar akuntansi telah menggambarkan akuntansi sosial sebagai proses untuk mengukur, mengontrol, dan melaporkan hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Sementara manfaat sosial dan pengorbanan sosial dari dapat diukur dengan menggunakan penilaian pengganti, survei, keputusan pengadilan, dan metode lainnya yang disarankan oleh para ahli dan bukti empiris praktik akuntansi sosial di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, perusahaan besar sudah menjadi kebiasaan di negara-negara maju untuk melaporkan dan mengungkapkan kepedulian sosialnya kepada para pemakai laporan keuangan. Kendati demikian, untuk konteks Indonesia, akuntansi sosial masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan kesadaran dunia bisnis yang rendah. Selain itu, karena perusahaan di Indonesia dianggap hanya berfokus pada *shareholder* dan utang, praktik pengungkapan sosial perusahaan masih sangat rendah. Pada akhirnya untuk menjamin iklim investasi yang sehat dan stabilitas ekonomi yang tangguh, akuntansi sosial perlu dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan juga dapat berkontribusi untuk mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan yang masih banyak dihadapi oleh perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkoui, A. R. (2006). *Teori Akuntansi*.
- Gray, R., Day, C., Owen, D., Evans, R., Zadek, S. (1997). Struggling with the praxis of social accounting Stakeholders, accountability, audits andn Procedures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10.
- Hopfenbeck, W. (1992). *The Green Management Revolution: Lessons In Environmental Excellence*.
- Lines, R. (2005). How social accounts and participation during change affect organizational learning. *Journal of Workplace Learning*, 17.
- Soewarjono. (2005). *“Teori Akuntansi:Perekayasaan Pelaporan keuangan”* (3 ed.): BPFE Yogyakarta Anggota IKAPI.

TENTANG PENULIS

Dr. Muchlis, S.E., M.MT.

Universitas Muhammadiyah Surabaya



lahir di kota Ampenan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menjadi dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya tahun 1997, Magister Manajemen Teknologi (M.MT) Bidang Teknologi Informasi pada Institut Teknologi

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 2016, dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada tahun 2021. Bidang keahlian penulis adalah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Selain tercermin dalam peminatan saat studi, juga didukung dalam aktivitas pengajaran dengan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Manajemen. Penulis juga memiliki pengalaman dalam berbagai proyek pengembangan sistem informasi pada perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Email: muchlis@um-surabaya.ac.id

BAB 8

AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN KONSERVASI BIODIVERSITAS

**Dr. Payamta, CPA., M.Si., Ak. CA., CPI., CGRPCA., CRA., CRP.,
Asean CPA.
UNS**

A. Definisi Akuntansi Lingkungan dan Biodiversitas

Akuntansi lingkungan merupakan disiplin ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan informasi ekonomi dan keuangan yang terkait dengan aspek lingkungan. Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, serta memberikan dasar informasi bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Akuntansi lingkungan, sering kali disebut juga sebagai akuntansi keberlanjutan yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan informasi ekonomi dan keuangan yang terkait dengan aspek lingkungan. Istilah padanannya, yakni akuntansi keberlanjutan, merangkul praktik akuntansi yang menekankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sering kali mencakup aspek-aspek lingkungan dalam pemantauan dan pelaporan.

Sementara ranah cabang akuntansi lingkungan seperti akuntansi biodiversitas yang merupakan sub-disiplin secara khusus menyoroti pengungkapan informasi terkait keanekaragaman hayati. Fokusnya adalah pada penilaian dampak kegiatan ekonomi terhadap biodiversitas dan upaya untuk mengukur, melaporkan, dan memitigasi dampak tersebut. Diketahui pula ada akuntansi karbon yang terfokus pada identifikasi, pengukuran, dan pelaporan emisi gas rumah kaca, dengan upaya untuk mengelola dan memitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, akuntansi limbah mencakup pemantauan dan pelaporan produksi limbah, pengelolaan limbah, serta dampaknya terhadap lingkungan, dengan tujuan mengurangi limbah dan mendorong praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Akuntansi air menyusun informasi terkait penggunaan dan dampak pengelolaan air, mencakup pengukuran pengambilan air, pengelolaan limbah cair, dan dampak terhadap sumber daya air. Terakhir, akuntansi energi berkaitan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan penggunaan energi, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, cabang-cabang ini saling terkait dan bersinergi untuk menyediakan informasi keuangan dan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan.

Biodiversitas adalah keragaman kehidupan di planet ini, termasuk keragaman spesies, genetik, dan ekosistem. Akuntansi biodiversitas adalah proses mengukur dan mengevaluasi keragaman kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menghitung jumlah spesies, mengukur keragaman genetik, atau menilai kesehatan ekosistem. Akuntansi biodiversitas merupakan bagian integral dari akuntansi lingkungan yang khusus fokus pada identifikasi, pengukuran, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan informasi ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Dalam kerangka ini, akuntansi biodiversitas menitikberatkan pada pengungkapan aspek-aspek keanekaragaman hayati yang terpengaruh oleh kegiatan

ekonomi suatu entitas atau organisasi. Tujuan utama dari akuntansi biodiversitas adalah untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini melibatkan penilaian dan pemantauan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap spesies, ekosistem, dan biodiversitas secara keseluruhan. Selain itu, akuntansi biodiversitas juga berupaya mengukur, melaporkan, serta memitigasi dampak negatif.

Melalui pengungkapan informasi terkait biodiversitas, akuntansi biodiversitas memberikan kontribusi penting terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Informasi yang dihasilkan melalui praktik akuntansi ini dapat membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum, untuk membuat keputusan yang berkelanjutan dan mendukung konservasi alam. Seiring dengan perkembangan kesadaran global tentang pentingnya keanekaragaman hayati, akuntansi biodiversitas menjadi instrumen kritis dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam dunia akuntansi lingkungan, konsep dasar pertama yang memegang peranan utama adalah identifikasi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Pada tahap ini, entitas bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek-aspek lingkungan yang terpengaruh oleh operasionalnya. Mulai dari jejak karbon hingga dampak terhadap keanekaragaman hayati, identifikasi ini menjadi landasan untuk menjalankan praktik akuntansi lingkungan secara holistik. Setelah berhasil mengidentifikasi dampak tersebut, langkah selanjutnya melibatkan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Pemantauan yang cermat dan pengukuran yang akurat menjadi kunci untuk menilai besarnya dampak yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi suatu entitas. Hal ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang pemahaman mendalam tentang entitas yang berinteraksi dengan ekosistem sekitarnya.

Konsep berikutnya adalah pengakuan dampak lingkungan dalam catatan keuangan entitas. Dampak ini dapat tercermin dalam bentuk beban atau kewajiban lingkungan, menciptakan representasi akurat dalam laporan keuangan. Pengakuan ini tidak hanya menunjukkan komitmen finansial entitas terhadap tanggung jawab lingkungan, tetapi juga mencerminkan keseriusan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya, akuntansi lingkungan mengarah pada penyusunan laporan yang mencakup informasi lengkap tentang dampak lingkungan. Laporan ini bukan hanya sekadar kumpulan angka, tetapi juga narasi yang merinci tentang entitas yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Laporan ini, disusun secara periodik, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai upaya untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Terakhir, konsep pengungkapan informasi membawa dimensi komunikasi yang kuat. Informasi tentang dampak lingkungan disajikan secara jelas dan komprehensif kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Pengungkapan ini bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan memotivasi perubahan positif dalam praktik bisnis menuju arah yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, praktik akuntansi lingkungan tidak hanya mencerminkan kewajiban, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan menuju hubungan yang lebih harmonis antara bisnis dan lingkungan.

B. Tujuan Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Biodiversitas

1. Tujuan Akuntansi Lingkungan.

a. Pemahaman Dampak Lingkungan.

Salah satu tujuan utama akuntansi lingkungan adalah memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengakuan

dampak tersebut agar entitas dapat memahami kontribusinya terhadap masalah lingkungan.

b. Pengelolaan Risiko Lingkungan.

Akuntansi lingkungan bertujuan untuk membantu entitas mengelola risiko-risiko lingkungan yang mungkin timbul dari operasi bisnisnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak, entitas dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerugian.

c. Pemenuhan Kewajiban Hukum dan Etika.

Tujuan lain adalah memastikan bahwa entitas memenuhi kewajiban hukum dan etika terkait dengan lingkungan. Akuntansi lingkungan memberikan dasar untuk mematuhi regulasi lingkungan dan mempraktikkan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Mendorong transparansi dan akuntabilitas di antara entitas dan pemangku kepentingan. Dengan memberikan informasi terkait dampak lingkungan secara terbuka, entitas dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan memberikan dasar bagi pertanggungjawaban.

e. Pengambilan Keputusan Berkelanjutan

Memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Akuntansi lingkungan membantu entitas untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, menciptakan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan.

Contoh praktik akuntansi lingkungan melibatkan:

a. Pencatatan biaya lingkungan

Misalnya, mencatat biaya pengelolaan limbah, biaya restorasi lahan, atau biaya pengendalian emisi.

b. Pengungkapan informasi lingkungan

Menyajikan informasi dalam laporan keuangan terkait dampak lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam atau proyek-proyek berkelanjutan yang dijalankan oleh entitas.

c. Pencatatan aset dan kewajiban lingkungan

Memasukkan informasi tentang aset lingkungan seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan kewajiban lingkungan seperti tanggung jawab reklamasi lingkungan.

Mengintegrasikan konsep akuntansi biodiversitas dalam kerangka akuntansi lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama-tama, praktik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap masalah keanekaragaman hayati. Dengan mengevaluasi dampak kegiatan ekonomi terhadap spesies dan ekosistem, akuntansi biodiversitas berperan sebagai instrumen edukasi yang efektif, membantu entitas dan pemangku kepentingan memahami secara lebih mendalam kontribusi dan tanggung jawab mereka terhadap keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, akuntansi biodiversitas juga menjadi alat penilaian kinerja perusahaan dan organisasi dalam konteks keberlanjutan. Informasi yang dihasilkan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas berhasil melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasinya. Hal ini menciptakan dorongan bagi entitas untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, akuntansi biodiversitas memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Dengan menyediakan informasi terperinci tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap biodiversitas, entitas dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang lebih bijaksana, penerapan praktik berkelanjutan,

dan investasi dalam inisiatif pelestarian yang dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang.

2. Tujuan Akuntansi Biodiversitas

a. Pemahaman Dampak pada Keanekaragaman Hayati

Akuntansi biodiversitas bertujuan untuk memahami dan mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini mencakup identifikasi spesies atau ekosistem yang mungkin terpengaruh dan mengukur dampaknya.

b. Pengukuran Kekayaan Hayati dan Ekosistem

Melibatkan pengukuran nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati dan ekosistem. Tujuannya adalah menghargai kontribusi ekosistem alam dalam mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi.

c. Pemeliharaan dan Pemulihan Biodiversitas

Memberikan informasi yang mendukung upaya pemeliharaan dan pemulihan biodiversitas. Akuntansi biodiversitas dapat membantu mengidentifikasi proyek-proyek atau inisiatif yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

d. Pengungkapan Dampak pada Biodiversitas

Mengungkapkan informasi terkait dampak pada biodiversitas dalam laporan keuangan atau laporan berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pengukuran perubahan dalam keragaman genetik atau penurunan populasi spesies tertentu.

e. Edukasi dan Kesadaran

Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya biodiversitas. Akuntansi biodiversitas dapat membantu mengkomunikasikan nilai-nilai lingkungan kepada para pemangku kepentingan.

Contoh praktik akuntansi biodiversitas melibatkan:

a. Penilaian dampak pada spesies.

Menilai dampak kegiatan ekonomi pada spesies tertentu dan melibatkan informasi tersebut dalam catatan keuangan.

b. Pencatatan nilai ekonomi ekosistem

Memasukkan nilai ekonomi ekosistem seperti hutan, air tanah, atau lahan pertanian dalam laporan keuangan.

c. Pemantauan populasi dan keragaman genetic

Menggunakan metrik-metrik ini untuk mengukur dampak pada biodiversitas dan melaporkannya secara terbuka.

3. Latar Belakang Akuntansi Lingkungan dan Biodiversitas

Keanekaragaman hayati, sebagai karya seni alam yang luar biasa, memiliki peran integral dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan berbagai manfaat esensial bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Edward O. Wilson, "Keanekaragaman hayati adalah karya keajaiban alam, dan setiap spesies adalah mata-mata ciptaan paling tinggi." Hal ini bukan hanya tentang keindahan dan keragaman warna yang menghiasi hutan dan lautan, tetapi juga tentang interaksi kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya. Namun, sayangnya, karya keajaiban ini sedang menghadapi tantangan serius. Degradasi habitat, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim merusak keberlanjutan keanekaragaman hayati. Sebagai imbalannya, publik saat ini tengah menghadapi risiko kehilangan keanekaragaman spesies dengan laju yang mengkhawatirkan. Hal itu seperti diutarakan oleh Rachel Carson, "Kehidupan ini adalah keajaiban yang belum dapat kita pahami sepenuhnya, dan berada di bawah ancaman yang belum kita bayangkan."

Dalam menghadapi tantangan ini, akuntansi biodiversitas muncul sebagai alat penting yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk melindungi

keanekaragaman hayati. Dengan mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak kegiatan ekonomi terhadap biodiversitas, akuntansi biodiversitas membuka pintu untuk pemahaman lebih mendalam tentang strategi setiap langkah manusia untuk mempengaruhi kehidupan di planet. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Sylvia Earle, "Kita harus menyadari bahwa kita semua hidup di dunia yang sangat terkait, dan kita harus belajar untuk hidup dengan cara yang merespек dan melibatkan kehidupan lainnya."

Sebagai suatu cara untuk memberikan jawaban terhadap fenomena ini, akuntansi lingkungan dan biodiversitas menjadi peta jalan yang dapat membimbing untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan keajaiban kehidupan. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kemudian dapat membentuk cerita baru yang menggambarkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan keanekaragaman hayati. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran global, sejatinya publik harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah menuju ke depan adalah langkah yang melibatkan, melindungi, dan merayakan kehidupan di semua bentuknya. Sebagaimana dituturkan oleh Jane Goodall, "Kita tidak hidup di planet ini sendiri. Kita adalah bagian dari web kehidupan, dan setiap spesies memiliki peran, setiap spesies berarti sesuatu."

a. Regulasi dan Standar Akuntansi Biodiversitas

Standar untuk akuntansi lingkungan dan biodiversitas dapat mencakup pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa entitas bisnis mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan secara transparan semua aspek keuangan yang terkait dengan dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Standar-standar ini dapat mencakup pengukuran emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, dampak terhadap habitat, dan tanggung jawab perusahaan terhadap

restorasi ekosistem yang terpengaruh oleh kegiatan bisnis. Sebagai bagian dari standar tersebut, juga mungkin diperlukan disiplin ilmu seperti akuntansi karbon dan akuntansi ekosistem. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan, seperti investor dan masyarakat umum, dapat mengakses informasi yang jelas dan terverifikasi tentang kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, akuntansi lingkungan dan biodiversitas menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem global. Pada tataran global, upaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam praktik akuntansi telah tercermin dalam berbagai regulasi dan standar. Salah satu inisiatif utama adalah Standar Pelaporan Keberlanjutan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI menyediakan panduan terkait pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk isu-isu lingkungan. Organisasi yang menerapkan GRI diharapkan untuk menyajikan laporan yang komprehensif mengenai dampak positif dan negatif mereka terhadap lingkungan.

Sementara, di tingkat internasional, *International Integrated Reporting Council* (IIRC) telah mengembangkan Kerangka Pelaporan Terpadu (*Integrated Reporting Framework*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan keberlanjutan dalam satu laporan. Hal ini menciptakan landasan bagi perusahaan untuk menggambarkan kinerja dengan cara yang mencakup dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi bisnis. Di Indonesia, berbagai regulasi dan inisiatif telah diimplementasikan untuk mendorong praktik akuntansi lingkungan. Salah satu regulasi yang signifikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan. Peraturan ini mengamankan perusahaan untuk menyusun dan melaporkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, mencakup aspek-aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, Indonesia telah memulai upaya untuk mengadopsi Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI sebagai panduan pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan komitmen global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bisnis. Secara keseluruhan, baik di tingkat global maupun di Indonesia, terdapat semakin banyak upaya dan regulasi yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam praktik akuntansi. Hal ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga mengarah pada penerapan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (PP No. 47/2012) di Indonesia memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berikut adalah beberapa ketentuan dan pasal terkait dalam PP No. 47/2012 berikut ini.

- 1) Pasal 4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup dan sosial, serta melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Pasal 5. Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5, perlunya perusahaan menyusun rencana aksi dan program, serta penyampaian laporan pelaksanaan kepada instansi pemerintah yang berwenang.

- 3) Pasal 6. Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan limbah.
- 4) Pasal 7. Keterlibatan masyarakat. Perusahaan wajib melibatkan masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup dan sosial melalui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 5) Pasal 10. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada instansi pemerintah yang berwenang secara berkala.
- 6) Pasal 12. Sanksi administratif. Menyatakan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk denda dan pembekuan izin.

Sementara, diketahui pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia, yang mencakup aspek pelibatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan pelaporan secara berkala. Selanjutnya, penyelenggaraan dan pelaksanaan lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan (PP No. 47/2012) di Indonesia berlaku bagi berbagai jenis perusahaan. Ketentuan ini mencakup perusahaan dalam berbagai sektor dan industri. Sebagian besar perusahaan, terutama yang beroperasi di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Contoh perusahaan yang tercakup dalam regulasi ini meliputi:

- 1) Perusahaan manufaktur. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan manufaktur dan produksi barang-barang konsumen atau industri.
- 2) Perusahaan pertambangan. Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, termasuk pertambangan batubara, logam, atau mineral lainnya.
- 3) Perusahaan energi. Perusahaan yang terlibat dalam produksi atau distribusi energi, seperti perusahaan listrik atau perusahaan minyak dan gas.
- 4) Perusahaan jasa. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa, termasuk sektor keuangan, teknologi informasi, kesehatan, dan lainnya.
- 5) Perusahaan konstruksi. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan konstruksi dan pembangunan infrastruktur.
- 6) Perusahaan pertanian dan Perkebunan. Perusahaan yang beroperasi di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk perusahaan kelapa sawit atau perusahaan pertanian lainnya.
- 7) Perusahaan transportasi. Perusahaan yang menyediakan layanan transportasi, termasuk perusahaan penerbangan, perusahaan pelayaran, atau perusahaan logistik.
- 8) Perusahaan retail dan distribusi. Perusahaan yang bergerak di sektor ritel dan distribusi, termasuk pusat perbelanjaan, toko ritel, dan distributor.

Peraturan ini mencakup berbagai sektor industri, dan ketentuannya dirancang untuk memastikan bahwa setiap perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab

sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di berbagai bidang harus memahami dan mematuhi ketentuan dalam PP No. 47/2012 sesuai dengan sifat dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional bisnis. Pada saat ini, belum ada standar akuntansi biodiversitas yang bersifat global, tetapi beberapa negara dan organisasi internasional telah berusaha untuk mengatasi kekosongan ini melalui pengembangan regulasi dan standar terkait. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif mengenai keanekaragaman hayati. Kendati demikian beberapa inisiatif telah diambil oleh organisasi internasional terkemuka. *International Integrated Reporting Council (IIRC)* dan *Global Reporting Initiative (GRI)* masing-masing mengembangkan kerangka kerja dan standar pelaporan yang mencakup pengungkapan informasi terkait dengan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun *International Financial Reporting Standards (IFRS)* belum memiliki standar akuntansi biodiversitas secara khusus, beberapa standar IFRS telah digunakan untuk mengukur dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Standar IFRS seperti IFRS 13 (Pengukuran Nilai Wajar), IFRS 9 (Instrumen Keuangan), dan IFRS 16 (*Leasing*) dapat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan melaporkan nilai serta dampak kegiatan ekonomi pada aspek-aspek lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Kaitannya dengan standar akuntansi lingkungan terletak pada pendekatan holistik untuk memasukkan isu-isu lingkungan dalam laporan keuangan. Standar-standar tersebut mencakup informasi terkait dampak sosial, lingkungan dan ekonomi, yang mencakup keanekaragaman hayati sebagai salah satu aspek lingkungan yang signifikan. Oleh

karena itu, meskipun belum ada standar khusus untuk akuntansi biodiversitas, pengembangan dan penerapan standar akuntansi lingkungan dapat memberikan kerangka kerja awal untuk melibatkan isu keanekaragaman hayati dalam pelaporan keuangan perusahaan.

b. Implementasi Akuntansi Lingkungan

Implementasi akuntansi biodiversitas menjadi suatu langkah krusial dalam menanggapi tantangan terkait keanekaragaman hayati yang semakin mendesak. Berbagai pihak, mulai dari perusahaan hingga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, memiliki peran penting dalam menerapkan praktik ini. Bagi perusahaan, akuntansi biodiversitas bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk memahami dan mengelola dampak operasional terhadap keanekaragaman hayati. Dengan mengukur dan melaporkan kontribusinya terhadap keanekaragaman hayati, perusahaan dapat menciptakan visibilitas yang lebih baik atas upaya konservasi dan praktik berkelanjutan yang diadopsinya. Sementara itu, pemerintah memegang peran sentral dalam melestarikan keanekaragaman hayati melalui kebijakan dan programnya. Implementasi akuntansi biodiversitas oleh pemerintah memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap dampak kebijakan lingkungan dan program pelestarian alam yang diterapkan. Informasi ini tidak hanya menjadi dasar untuk evaluasi keberhasilan kebijakan, tetapi juga untuk menyusun strategi lebih lanjut dalam melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati yang terancam.

Organisasi non-pemerintah, sebagai garda terdepan dalam pelestarian lingkungan, juga memiliki peran krusial. Melalui implementasi akuntansi biodiversitas, korporasi dapat menyajikan data yang kuat mengenai kontribusi positif atau negatif terhadap

keanekaragaman hayati dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi non-pemerintah dalam mencapai tujuan pelestarian dan memberikan dukungan nyata terhadap upaya global untuk melindungi kehidupan. Dengan demikian, implementasi akuntansi biodiversitas bukan sekadar alat pengukur, tetapi juga pendorong perubahan positif menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kegiatan manusia dan kehidupan di bumi.

Implementasi sistem akuntansi lingkungan melibatkan serangkaian langkah dan proses untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak kegiatan suatu entitas terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam implementasi sistem akuntansi lingkungan, beserta contoh konkret:

1) Identifikasi aspek lingkungan yang signifikan.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan yang signifikan yang dipengaruhi oleh kegiatan entitas. Contoh: perusahaan manufaktur mengidentifikasi emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan produksi limbah sebagai aspek lingkungan kritis.

2) Pengukuran dan pencatatan.

Implementasi sistem melibatkan pengukuran dampak lingkungan dan pencatatan data terkait. Contoh: perusahaan mengukur jumlah air yang digunakan setiap tahun dan mencatatnya dalam sistem akuntansi.

3) Pengakuan dalam laporan keuangan.

Dampak lingkungan yang terukur kemudian diakui dalam laporan keuangan, baik sebagai beban atau kewajiban lingkungan. Contoh: perusahaan

mencatat biaya pengelolaan limbah sebagai beban lingkungan dalam laporan keuangannya.

4) Pelaporan dan pengungkapan.

Melibatkan penyusunan laporan lingkungan yang komprehensif, yang mencakup informasi tentang dampak, kebijakan lingkungan, dan upaya mitigasi. Contoh: perusahaan menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup informasi tentang pengurangan emisi karbon dan inisiatif keanekaragaman hayati.

5) Pelibatan pemangku kepentingan.

Sistem akuntansi lingkungan juga mencakup pelibatan pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, dalam proses pengukuran dan pelaporan. Contoh: perusahaan mengadakan forum keterbukaan untuk mendengar masukan masyarakat terkait dampak lingkungan.

6) Monitoring dan evaluasi.

Sistem perlu terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan bahwa pengukuran dan pelaporan dilakukan dengan akurat dan efektif. Contoh: perusahaan mengadopsi sistem pemantauan otomatis untuk mengukur emisi gas secara real-time.

7) Perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak positif terhadap lingkungan. Contoh: perusahaan mengadopsi teknologi hijau untuk mengurangi jejak karbonnya.

Implementasi sistem akuntansi lingkungan tidak hanya mematuhi regulasi dan standar, tetapi juga menciptakan dasar untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi, entitas dapat lebih baik mengelola dampaknya

terhadap lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan global. Keputusan untuk merancang sistem akuntansi lingkungan sebagai entitas terpisah atau terintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan perusahaan yang sudah dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mungkin menjadi faktor penentu:

1) Keberlanjutan dan keterpaduan.

Integrasi sistem akuntansi lingkungan ke dalam sistem akuntansi keuangan dapat meningkatkan keterpaduan informasi keuangan dan keberlanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan data keuangan dan lingkungan untuk memberikan pandangan holistik tentang kinerja perusahaan.

2) Efisiensi operasional.

Bila perusahaan telah memiliki sistem akuntansi keuangan yang kuat, memodifikasi atau mengintegrasikan modul akuntansi lingkungan mungkin lebih efisien daripada membangun sistem terpisah. Hal ini dapat mengurangi biaya implementasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

3) Kepatuhan dan pelaporan.

Integrasi sistem dapat mempermudah pemenuhan persyaratan kepatuhan dan pelaporan terkait keberlanjutan lingkungan. Informasi lingkungan dapat dengan mudah disertakan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan secara bersamaan.

4) Pengelolaan risiko.

Integrasi sistem memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko keuangan dan risiko lingkungan secara terpadu. Hal ini dapat membantu dalam identifikasi dampak potensial terhadap keuangan perusahaan sebagai akibat dari perubahan

regulasi lingkungan atau perubahan kondisi lingkungan.

5) Kebutuhan pengguna

Jika pengguna informasi keuangan dan lingkungan bersifat terpisah, mungkin lebih bermanfaat untuk memiliki sistem yang terpisah. Namun, jika pemangku kepentingan perusahaan membutuhkan informasi yang terintegrasi, maka integrasi sistem menjadi lebih penting.

6) Kompleksitas dan skala bisnis.

Bagi perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang kompleks dan luas, terkadang lebih efektif untuk memisahkan sistem akuntansi lingkungan untuk fokus pada kegiatan yang sangat khusus dan berdampak besar.

7) Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi.

Keputusan untuk merancang sistem terpisah atau terintegrasi dapat dipengaruhi oleh tingkat fleksibilitas yang diperlukan. Beberapa perusahaan mungkin memilih sistem terpisah agar dapat dengan mudah mengadaptasi perubahan dalam persyaratan lingkungan atau keuangan.

Setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan konteks unik, sehingga keputusan untuk merancang sistem akuntansi lingkungan terpisah atau mengintegrasikannya sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, dan kondisi lingkungan yang berlaku.

c. Siklus Akuntansi Lingkungan dan Laporan Akuntansi Lingkungan

Siklus akuntansi lingkungan melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan, dan memantau dampak kegiatan suatu entitas terhadap lingkungan. Siklus akuntansi

lingkungan memulai perjalanannya dengan tahap identifikasi, dari semua dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan manusia diidentifikasi dengan cermat. Dalam tahap ini, transaksi-transaksi yang mencerminkan dampak lingkungan, baik dalam bentuk biaya, manfaat, atau risiko, diakui dan dicatat. Sebagai contoh, biaya lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah, biaya remediasi, atau biaya akibat kecelakaan lingkungan diidentifikasi sebagai elemen-elemen yang relevan untuk dicatat dalam sistem akuntansi. Setelah tahap identifikasi, perjalanan siklus berlanjut ke tahap pengukuran, sehingga dampak lingkungan yang telah diidentifikasi diukur dengan berbagai metode. Pengukuran ini melibatkan penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap dampak lingkungan.

Contohnya, metode biaya dapat digunakan untuk mengukur biaya pengelolaan limbah atau biaya remediasi, sementara metode nilai dapat digunakan untuk menilai manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tahap identifikasi dan pengukuran ini tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk memahami dampak ekonomi dan keuangan kegiatan lingkungannya, tetapi juga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat dengan cermat dampak lingkungan, perusahaan dapat memberikan transparansi yang lebih besar terhadap tanggung jawab sosialnya dan memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan secara ekologis.

Berikut adalah contoh pencatatan transaksi dalam siklus akuntansi lingkungan:

- 1) Identifikasi dampak lingkungan. Perusahaan ABC menentukan bahwa kegiatan produksinya memiliki dampak terhadap emisi karbon dioksida. Identifikasi

ini didasarkan pada audit lingkungan yang dilakukan secara teratur.

- 2) Pengukuran dampak. Tim lingkungan perusahaan mengukur jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan produksi selama bulan tersebut. Hasilnya adalah 5.000 ton CO₂.
- 3) Pengakuan dalam jurnal. Dampak lingkungan diakui dalam jurnal akuntansi. Contohnya, "Debit, Beban Lingkungan (Pencemaran Karbon) 5.000" dan "Kredit, Kewajiban Lingkungan (Karbonsidi)".
- 4) Pelaporan dalam laporan keuangan. Informasi tentang emisi karbon dioksida dicantumkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan tersebut menyajikan data tentang upaya perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi. Perusahaan terus memantau dan mengevaluasi upaya pengurangan emisi karbonnya. Jika ada program baru yang diimplementasikan untuk mengurangi emisi, ini dicatat dan dievaluasi.
- 6) Perbaikan berkelanjutan. Setelah evaluasi, perusahaan memutuskan untuk mengadopsi teknologi hijau dalam produksinya untuk mengurangi emisi karbon. Biaya implementasi teknologi ini dicatat dalam jurnal dan dicantumkan dalam laporan keuangan.
- 7) Pelibatan pemangku kepentingan. Perusahaan mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk membahas dan mendengarkan masukan terkait dampak lingkungan dan upaya perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Siklus ini terus berlanjut, sehingga perusahaan secara berkelanjutan bisa mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan, dan memantau dampak lingkungan kegiatan operasionalnya. Langkah-langkah ini membantu perusahaan dalam pengelolaan dan

mitigasi dampaknya terhadap lingkungan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal keberlanjutan lingkungan. Siklus akuntansi lingkungan melibatkan beberapa tahap yang saling terkait untuk mengelola dampak lingkungan secara ekonomi dan keuangan. Tahap pertama, identifikasi, mengarah pada pengenalan dampak lingkungan yang dapat berupa biaya, manfaat, atau risiko. Dalam konteks ini, perusahaan menggunakan metode biaya untuk mengukur biaya pengelolaan limbah, metode nilai untuk menilai manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan metode penilaian untuk mengukur risiko kerusakan lingkungan. Setelah tahap pengukuran, langkah selanjutnya adalah pengakuan, sehingga dampak lingkungan yang telah diukur dinilai untuk menentukan apakah akan diakui sebagai aset, kewajiban, pendapatan, atau beban. Sebagai contoh, biaya pengelolaan limbah yang dapat diidentifikasi langsung diakui sebagai beban, sementara biaya remediasi yang tidak dapat diidentifikasi langsung diakui sebagai aset dan diamortisasi selama masa manfaatnya.

Tahap pelaporan melibatkan penyajian dampak lingkungan yang telah diakui dalam laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi dan neraca. Sebagai contoh, biaya lingkungan yang diakui sebagai beban dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan biaya lingkungan yang diakui sebagai aset dilaporkan dalam neraca. Pengungkapan, sebagai tahap terakhir, melibatkan pengungkapan informasi tambahan tentang dampak lingkungan. Informasi ini dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, laporan tahunan, atau laporan keberlanjutan. Contohnya, catatan atas laporan keuangan dapat memuat informasi tentang metode pengukuran dampak lingkungan, jumlah biaya lingkungan yang diakui, dan keterangan tentang manfaat lingkungan yang tidak diakui secara ekonomi. Dengan mengikuti siklus ini,

perusahaan dapat memberikan transparansi yang lebih besar terhadap dampak lingkungan kegiatan operasionalnya. Hal ini tidak hanya memenuhi persyaratan pelaporan, tetapi juga menciptakan dasar untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan.

Berikut adalah siklus akuntansi lingkungan:

- 1) Identifikasi
- 2) Pengukuran
- 3) Pengakuan
- 4) Pelaporan
- 5) Pengungkapan

Contoh Pencatatan Transaksi dalam Siklus Akuntansi Lingkungan

- 1) Transaksi: Perusahaan ABC mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000 untuk pengelolaan limbah.
- 2) Pengukuran: Biaya pengelolaan limbah diukur dengan menggunakan metode biaya aktual.
- 3) Pengakuan: Biaya pengelolaan limbah diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
- 4) Pelaporan: Biaya pengelolaan limbah dilaporkan dalam laporan laba rugi.
- 5) Pengungkapan: Informasi tentang biaya pengelolaan limbah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti jumlah biaya, metode pengukuran dampak lingkungan, dan informasi tentang manfaat lingkungan yang tidak diakui.

Pelaporan Akuntansi Lingkungan Perusahaan ABC Tahun 2023

Laporan Laba Rugi

Perusahaan ABC melaporkan biaya lingkungan sebesar Rp10.000.000 dalam laporan laba ruginya tahun 2023. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari biaya pengelolaan

limbah sebesar Rp8.000.000 dan biaya remediasi sebesar Rp2.000.000.

Neraca

Perusahaan ABC melaporkan aset lingkungan sebesar Rp15.000.000 dalam neracanya tahun 2023. Aset lingkungan tersebut terdiri dari aset pemulihan lingkungan sebesar Rp10.000.000 dan aset sumber daya alam sebesar Rp5.000.000.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Perusahaan ABC mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungannya dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2023. Informasi yang diungkapkan meliputi:

- 1) Jumlah biaya lingkungan yang diakui sebagai beban.
- 2) Metode pengukuran dampak lingkungan.
- 3) Informasi tentang manfaat lingkungan yang tidak diakui.

Berikut adalah contoh pengungkapan informasi tentang dampak lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan ABC:

Biaya Lingkungan

Perusahaan ABC mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp10.000.000 pada tahun 2023. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya pengelolaan limbah sebesar Rp8.000.000
- 2) Biaya remediasi sebesar Rp2.000.000

Biaya pengelolaan limbah adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya remediasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Metode pengukuran

dampak lingkungan yang digunakan oleh perusahaan ABC adalah metode biaya. Metode biaya mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan biaya aktual. Manfaat lingkungan yang tidak diakui oleh perusahaan ABC adalah manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Manfaat lingkungan yang tidak diakui tidak dapat direalisasi secara ekonomi.

Laporan Keberlanjutan

Perusahaan ABC juga melaporkan informasi tentang dampak lingkungan dalam laporan keberlanjutannya tahun 2023. Laporan keberlanjutan berisi informasi yang lebih luas tentang dampak lingkungan perusahaan, termasuk informasi tentang risiko lingkungan dan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Berikut adalah contoh pengungkapan informasi tentang dampak lingkungan dalam laporan keberlanjutan Perusahaan ABC:

Dampak Lingkungan

Perusahaan ABC menyadari pentingnya mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungannya dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

- 1) Pada tahun 2023, perusahaan ABC mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp10.000.000. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari biaya pengelolaan limbah sebesar Rp8.000.000 dan biaya remediasi sebesar Rp2.000.000.
- 2) Perusahaan ABC juga menghadapi beberapa risiko lingkungan, seperti risiko kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko lingkungan tersebut, seperti menerapkan

praktik pengelolaan limbah yang lebih baik dan melakukan remediasi terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

- 3) Perusahaan ABC berkomitmen untuk terus mengurangi dampak lingkungan dan melindungi lingkungan. Perusahaan akan terus berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan.

Kasus: Pelaporan Akuntansi Lingkungan PT Aneka Tambang Tahun 2022

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTAM) adalah perusahaan tambang multimineral terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati.

Dalam laporan keuangannya tahun 2022, PT ANTAM melaporkan biaya lingkungan sebesar Rp1,2 triliun. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya pengelolaan limbah sebesar Rp1 triliun.
- 2) Biaya remediasi sebesar Rp200 miliar.

Biaya pengelolaan limbah meliputi biaya pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah udara. Biaya remediasi meliputi biaya perbaikan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

PT ANTAM juga melaporkan aset lingkungan sebesar Rp2,3 triliun dalam neracanya tahun 2022. Aset lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Aset pemulihan lingkungan sebesar Rp1,5 triliun.
- 2) Aset sumber daya alam sebesar Rp800 miliar.

Aset pemulihan lingkungan meliputi aset yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Aset sumber daya alam meliputi aset

yang berupa sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan.

PT ANTAM mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungannya dalam catatan atas laporan keuangannya tahun 2022. Informasi yang diungkapkan meliputi:

- 1) Jumlah biaya lingkungan yang diakui sebagai beban.
- 2) Metode pengukuran dampak lingkungan.
- 3) Informasi tentang manfaat lingkungan yang tidak diakui.

Berikut adalah contoh pengungkapan informasi tentang dampak lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan PT Aneka Tambang:

Biaya Lingkungan

PT Aneka Tambang mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2022. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya pengelolaan limbah sebesar Rp1 triliun
- 2) Biaya remediasi sebesar Rp200 miliar

Biaya pengelolaan limbah adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya remediasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Metode pengukuran dampak lingkungan yang digunakan oleh PT Aneka Tambang adalah metode biaya. Metode biaya mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan biaya aktual. Manfaat lingkungan yang tidak diakui oleh PT Aneka Tambang adalah manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Manfaat lingkungan yang tidak diakui tidak dapat direalisasi secara ekonomi.

Pelaporan Akuntansi Biodiversitas PT Aneka Tambang Tahun 2022

Selain melaporkan biaya lingkungan, ANTAM juga melaporkan informasi tentang keanekaragaman hayati dalam laporan keberlanjutannya tahun 2022. Laporan keberlanjutan berisi informasi yang lebih luas tentang dampak lingkungan perusahaan, termasuk informasi tentang risiko lingkungan dan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Berikut adalah contoh pengungkapan informasi tentang keanekaragaman hayati dalam laporan keberlanjutan PT Aneka Tambang:

Keanekaragaman Hayati

PT Aneka Tambang menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah operasinya.

Pada tahun 2022, PT Aneka Tambang melakukan berbagai upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan konservasi flora dan fauna.
- 2) Melakukan rehabilitasi lahan.
- 3) Membangun kawasan lindung.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati di wilayah operasi PT Aneka Tambang. Beberapa contoh dampak positif tersebut antara lain:

- 1) Populasi burung meningkat.
- 2) Populasi tanaman langka meningkat.
- 3) Keanekaragaman ekosistem meningkat.

PT Aneka Tambang berkomitmen untuk terus meningkatkan upayanya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Perusahaan akan terus

berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. PT Aneka Tambang telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati. Perusahaan telah melaporkan biaya lingkungan dan informasi tentang keanekaragaman hayati dalam laporan keuangan serta laporan keberlanjutannya.

Kasus 2. Pelaporan Akuntansi Lingkungan PT Tambang Timah Tahun 2022

PT Tambang Timah (Persero) Tbk. (TINS) adalah perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati.

Dalam laporan keuangannya tahun 2022, TINS melaporkan biaya lingkungan sebesar Rp1,4 triliun. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya pengelolaan limbah sebesar Rp1,2 triliun
- 2) Biaya remediasi sebesar Rp200 miliar.

Biaya pengelolaan limbah meliputi biaya pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah udara. Biaya remediasi meliputi biaya perbaikan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

TINS juga melaporkan aset lingkungan sebesar Rp2,5 triliun dalam neracanya tahun 2022. Aset lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Aset pemulihan lingkungan sebesar Rp1,5 triliun.
- 2) Aset sumber daya alam sebesar Rp1 triliun.

Aset pemulihan lingkungan meliputi aset yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Aset sumber daya alam meliputi aset

yang berupa sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan.

TINS mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungannya dalam catatan atas laporan keuangannya tahun 2022. Informasi yang diungkapkan meliputi:

- 1) Jumlah biaya lingkungan yang diakui sebagai beban
- 2) Metode pengukuran dampak lingkungan
- 3) Informasi tentang manfaat lingkungan yang tidak diakui

Berikut adalah contoh pengungkapan informasi tentang dampak lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan PT Tambang Timah:

Biaya Lingkungan

PT Tambang Timah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2022. Biaya lingkungan tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya pengelolaan limbah sebesar Rp1,2 triliun.
- 2) Biaya remediasi sebesar Rp200 miliar.

Biaya pengelolaan limbah adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya remediasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Pengukuran dampak lingkungan yang digunakan oleh PT Tambang Timah adalah metode biaya. Metode biaya mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan biaya aktual. Manfaat lingkungan yang tidak diakui oleh PT Tambang Timah adalah manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Manfaat lingkungan yang tidak diakui tidak dapat direalisasi secara ekonomi.

Pelaporan Akuntansi Biodiversitas PT Tambang Timah Tahun 2022

Selain melaporkan biaya lingkungan, PT Tambang Timah juga melaporkan informasi tentang keanekaragaman hayati dalam laporan keberlanjutannya tahun 2022. Laporan keberlanjutan berisi informasi yang lebih luas tentang dampak lingkungan perusahaan, termasuk informasi tentang risiko lingkungan dan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Keanekaragaman Hayati

PT Tambang Timah menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah operasinya. Pada tahun 2022, PT Tambang Timah melakukan berbagai upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan konservasi flora dan fauna.
- 2) Melakukan rehabilitasi lahan.
- 3) Membangun kawasan lindung.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati di wilayah operasi PT Tambang Timah. Beberapa contoh dampak positif tersebut antara lain:

- 1) Populasi burung meningkat.
- 2) Populasi tanaman langka meningkat.
- 3) Keanekaragaman ekosistem meningkat.

PT Tambang Timah berkomitmen untuk terus meningkatkan upayanya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Perusahaan akan terus berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. PT Tambang Timah telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati.

Perusahaan telah melaporkan biaya lingkungan dan informasi tentang keanekaragaman hayati dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutannya.

Perbandingan Pelaporan Akuntansi Lingkungan PT Aneka Tambang dan PT Tambang Timah

Secara umum, pelaporan akuntansi lingkungan PT Aneka Tambang dan PT Tambang Timah memiliki kesamaan. Kedua perusahaan tersebut melaporkan biaya lingkungan dan aset lingkungan dalam laporan keuangannya. Kedua perusahaan tersebut juga mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungannya dalam catatan atas laporan keuangan dan laporan keberlanjutannya. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara pelaporan akuntansi lingkungan kedua perusahaan tersebut. Perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Jumlah biaya lingkungan. PT Aneka Tambang melaporkan biaya lingkungan sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan PT Tambang Timah melaporkan biaya lingkungan sebesar Rp1,4 triliun. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan skala dan jenis kegiatan operasional kedua perusahaan tersebut.
- 2) Metode pengukuran biaya lingkungan. PT Aneka Tambang menggunakan metode biaya aktual untuk mengukur biaya lingkungannya, sedangkan PT Tambang Timah menggunakan metode biaya historis.
- 3) Informasi tentang dampak lingkungan. PT Aneka Tambang mengungkapkan informasi yang lebih luas tentang dampak lingkungannya, termasuk informasi tentang risiko lingkungan dan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya. PT Tambang Timah hanya mengungkapkan informasi yang lebih terbatas tentang dampak lingkungannya.

Berikut adalah tabel perbandingan pelaporan akuntansi lingkungan PT Aneka Tambang dan PT Tambang Timah:

Aspek	PT Aneka Tambang	PT Tambang Timah
Biaya lingkungan	Rp1,2 triliun	Rp1,4 triliun
Metode pengukuran biaya lingkungan	Metode biaya aktual	Metode biaya historis
Informasi tentang dampak lingkungan	Lebih luas	Lebih terbatas

d. Konservasi Biodiversitas

Keanekaragaman hayati memainkan peran integral dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam yang vital, dan melestarikan kekayaan budaya. Melibatkan masyarakat serta melindungi habitat dan spesies menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga biodiversitas. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga warisan alamnya. Langkah-langkah seperti menetapkan kawasan konservasi, melakukan penelitian, dan meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan langkah yang tepat. Tetapi, implementasi dan konsistensi dalam menjalankan program-program ini juga menjadi kunci keberhasilan. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi. Pendidikan dan penyuluhan masyarakat perlu terus ditingkatkan, sehingga kesadaran akan pentingnya biodiversitas dapat menjadi bagian integral dari perilaku sehari-hari. Upaya konservasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama lintas sektor dan pemahaman bersama tentang kepentingan konservasi dapat

memperkuat upaya pelestarian biodiversitas. Strategi konservasi biodiversitas, dapat dilakukan baik dalam konteks *in-situ* maupun *ex-situ*. Konservasi *in-situ* menekankan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di habitat aslinya, sementara konservasi *ex-situ* melibatkan upaya di luar habitat asli spesies untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Pentingnya menetapkan kawasan konservasi seperti taman nasional, taman hutan raya, cagar alam, dan suaka margasatwa tidak hanya memberikan tempat aman bagi flora dan fauna tetapi juga menciptakan peluang untuk penelitian dan pendidikan. Reboisasi juga merupakan langkah penting untuk memulihkan habitat yang rusak dan mempromosikan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan pendekatan integral yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Prinsip-prinsip seperti *agroforestry*, *silvopasture*, dan perikanan ramah lingkungan adalah contoh pendekatan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di sisi *ex-situ*, penangkaran, rehabilitasi, dan bank gen memberikan dukungan tambahan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Penangkaran membantu melindungi dan mempertahankan spesies yang terancam punah di luar habitat aslinya, sementara rehabilitasi dapat membantu satwa liar yang terluka atau cacat untuk kembali ke habitat alaminya. Bank gen berperan sebagai cadangan genetik untuk spesies yang mungkin menghadapi risiko kepunahan di habitat alaminya. Penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara konservasi *in-situ* dan *ex-situ*, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pihak diperlukan untuk menjaga keanekaragaman hayati agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Hambatan dan Tantangan Akuntansi Biodiversitas

Akuntansi biodiversitas adalah proses identifikasi, pengukuran, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan informasi ekonomi dan keuangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Akuntansi biodiversitas memiliki potensi untuk menjadi alat yang penting dalam melindungi keanekaragaman hayati. Namun, akuntansi biodiversitas juga menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, antara lain:

1) Kompleksitas.

Keanekaragaman hayati merupakan sistem yang kompleks dan sulit untuk diukur. Keanekaragaman hayati terdiri dari berbagai elemen, seperti spesies, ekosistem, dan jasa ekosistem. Masing-masing elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuat pengukuran keanekaragaman hayati menjadi sulit dan kompleks.

2) Ketidakpastian.

Terdapat ketidakpastian dalam memperkirakan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati dapat bersifat langsung, seperti perusakan habitat, dan tidak langsung, seperti perubahan iklim. Ketidakpastian dalam memperkirakan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati membuat akuntansi biodiversitas menjadi sulit diterapkan.

3) Kurang tersedianya data.

Data tentang keanekaragaman hayati masih kurang tersedia, terutama di negara-negara berkembang. Data tentang keanekaragaman hayati diperlukan untuk mengukur dan melaporkan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Kurangnya tersedianya data tentang keanekaragaman

hayati membuat akuntansi biodiversitas menjadi sulit diterapkan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan akuntansi biodiversitas:

- 1) Pengembangan metode pengukuran keanekaragaman hayati yang lebih akurat dan tepat. Metode pengukuran keanekaragaman hayati yang lebih akurat dan tepat dapat membantu mengatasi kompleksitas dalam pengukuran keanekaragaman hayati.
- 2) Pengembangan model yang dapat digunakan untuk memperkirakan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Model yang dapat memperkirakan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati dapat membantu mengatasi ketidakpastian dalam memperkirakan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati.
- 3) Peningkatan upaya pengumpulan data tentang keanekaragaman hayati. Peningkatan upaya pengumpulan data tentang keanekaragaman hayati dapat membantu mengatasi kurangnya tersedianya data tentang keanekaragaman hayati.

Pengembangan akuntansi biodiversitas merupakan proses yang berkelanjutan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi akuntansi biodiversitas dapat diatasi dengan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan pemerintah.

Metode Pengukuran Dampak Lingkungan

Metode pengukuran dampak lingkungan adalah metode yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Metode pengukuran dampak lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) **Metode biaya.** Metode ini mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan biaya. Metode biaya mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
- 2) **Metode nilai.** Metode ini mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan nilai. Metode nilai mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan nilai ekonomi dari sumber daya alam dan jasa ekosistem yang hilang atau rusak.
- 3) **Metode penilaian.** Metode ini mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan penilaian. Metode penilaian mengukur dampak lingkungan dengan menggunakan teknik penilaian, seperti penilaian ekonomi lingkungan.

Perkembangan Akuntansi Biodiversitas di Indonesia

Akuntansi biodiversitas masih dalam tahap awal perkembangannya di Indonesia. Beberapa perusahaan dan organisasi di Indonesia mulai menerapkan akuntansi biodiversitas, tetapi belum ada regulasi atau standar akuntansi biodiversitas yang bersifat nasional. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Konservasi Keanekaragaman Hayati 2018-2028. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan perlunya penerapan akuntansi biodiversitas di Indonesia.

Untuk mendukung penerapan akuntansi biodiversitas di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Pembentukan tim kerja nasional untuk mengembangkan akuntansi biodiversitas. Tim kerja nasional tersebut terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi.
- 2) Penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan dan organisasi yang ingin menerapkan akuntansi biodiversitas.
- 3) Pengembangan standar akuntansi biodiversitas yang bersifat nasional.

C. Penutup

Akuntansi lingkungan dan akuntansi biodiversitas memainkan peran krusial dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Akuntansi lingkungan terfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas manusia, sementara akuntansi biodiversitas memusatkan perhatian pada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Pengembangan akuntansi biodiversitas di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong penerapan akuntansi biodiversitas di Indonesia sebagai upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kedua bidang akuntansi ini memiliki potensi besar sebagai alat utama dalam upaya melindungi lingkungan. Akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan dan organisasi untuk mengurangi dampak lingkungan, sementara akuntansi biodiversitas dapat berperan dalam melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun demikian, ada beberapa hambatanya, di antaranya: kompleksitas, ketidakpastian, dan kurangnya data merupakan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua bidang akuntansi.

Untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi lingkungan, perlu ada upaya bersama untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Pengembangan akuntansi lingkungan dan akuntansi biodiversitas bukanlah proses yang instan. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan praktisi sangat diperlukan untuk terus mengatasi hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh kedua bidang ini. Berbagai rekomendasi dapat diusulkan untuk mendukung pengembangan akuntansi lingkungan dan akuntansi biodiversitas:

1. **Pengembangan metode pengukuran yang lebih akurat dan tepat.** Perlu adanya upaya dalam mengembangkan metode pengukuran yang lebih akurat dan tepat untuk mengatasi kompleksitas dalam pengukuran dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati.
2. **Pengembangan model perkiraan dampak.** Model yang dapat memperkirakan dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati perlu dikembangkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengukuran dampak tersebut.
3. **Peningkatan pengumpulan data.** Upaya perbaikan dan peningkatan dalam pengumpulan data mengenai dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati dapat membantu mengatasi kurangnya tersedianya data.

Dengan mengatasi hambatan dan tantangan tersebut, akuntansi lingkungan dan akuntansi biodiversitas dapat menjadi alat yang semakin efektif dan relevan dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sinergi antara pemerintah, lembaga akademis, dan praktisi adalah kunci untuk mencapai kemajuan akuntansi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, B. P., & Shrestha, M. (2021). Accounting for biodiversity: A review of the literature. *Sustainable Development*, 29(1), 180-192.
- Bebbington, J., Gray, R., & Walters, D. (2017). Accounting for sustainability: *Practical insights*. London, UK: Routledge.
- Carson, R. (1962). "Silent Spring." Houghton Mifflin.
- Earle, S. (1995). "Sea Change: A Message of the Oceans." Ballantine Books.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2023). *GRI Sustainability Reporting Standards*. Amsterdam, Netherlands: GRI.
- Goodall, J. (1990). "Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe." Houghton Mifflin Harcourt.
- International Federation of Accountants (IFAC). (2011). *Sustainability reporting: A guide for establishing an effective process*. New York, NY: IFAC.
- International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). *The international integrated reporting framework*. London, UK: IIRC.
- Jones, M. J., & Solomon, J. (2013). Accounting for biodiversity: An emerging field of practice. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 1-17.
- Wilson, E. O. (1992). "The Diversity of Life." Harvard University Press.

TENTANG PENULIS

Payamta, CPA., M.Si., Ak. CA., CPI., CGRPCA., CRA., CRP., Asean CPA.



Adalah dosen Jurusan Akuntansi FEB UNS Anggota Pimpinan Satuan Pengawas Intern UNS (2023-sekarang). Beliau aktif mengajar di Program S1 Akuntansi, Program Magister Akuntansi, dan Magister Manajemen, serta Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS. Aktif mengajar dan meneliti sejak tahun 1992. Mata kuliah yang diampu di antaranya: Bidang Auditing dan Riset Auditing, Akuntansi Sektor Publik, Audit Keuangan Negara, dan Teori Akuntansi & Pelaporan Berkelanjutan (APK).

Beliau adalah alumni dari SMA 2 Klaten (1986), Lulus Program Sarjana Akuntansi FEB UNS (1991), Lulus Program Magister Sain Akuntansi UGM (1998), dan Lulus Doktor dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (2009). Lulus dari Pendidikan Profesi Akuntan Publik dengan sebutan *Certified Public Accountant* (CPA) dari IAPI (2009); *Certified Professional Investigator* (IAPI:2017); *Chartered Accountant* (IAI:2010), Lulus sertifikasi bidang Manajemen Risiko(CRA&CRP, 2020), Setiap tahun minimal memperoleh 40 Satuan Kredit Poin dari keikutsertaan dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan IAPI.

Sebagai seorang praktisi Akuntan Publik dan sekaligus Pendiri dan Pemilik dari **Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA** (2010). Ketua Pengawas Auditor Indonesia (OAI) Solusi Manajemen Nusantara (2021-sekarang). Beliau tercatat sebagai auditor bank pada Bank Indonesia (2012) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Auditor terdaftar pada Badan Pemeriksaan keuangan (2013-sekarang). Beliau aktif sebagai konsultan Badan Layanan Umum dari berbagai Rumah sakit dan Puskesmas. Beberapa buku yang pernah ditulis di antaranya: Buku Auditing, Auditing Internal Berbasis Risiko, Akuntansi dan Pelaporan keuangan Berkelanjutan (APK), Akuntansi Pemerintahan, Panduan *Accurate Accounting Software* untuk Usaha Dagang, Koperasi dan Aspek Akuntansinya

BAB 9

KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN NILAI PERUSAHAAN

Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

A. Pendahuluan

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) merupakan pendekatan yang mengkombinasi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) tersebut menjadi pendekatan dari sektor jasa keuangan dalam rangka mendukung implementasi *The Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. SDGs tersebut mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. Secara garis besar, terdapat 3 bidang dalam SDGs yang memiliki karakteristik berbeda yang dapat disatukan dalam satu rumpun yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa 3 bidang tersebut secara terintegrasi memenuhi konsep "*Sustainable Finance*" atau keuangan berkelanjutan. *Sustainable finance* tersebut menjadi pendekatan yang relatif baru, mempertimbangkan faktor lingkungan (perubahan iklim) maupun faktor sosial yang kemungkinan dapat meningkatkan risiko keuangan yang dihadapi lembaga keuangan.

Di Indonesia, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) menunjukkan adanya dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan dalam rangka capaian pertumbuhan berkelanjutan atas keselarasan dari kepentingan sosial, lingkungan dan ekonomi. Keuangan berkelanjutan menggambarkan sistem keuangan dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan mempertimbangkan pengaruh faktor sosial dan tata kelola perusahaan, mencakup ketidaksetaraan, hak asasi manusia, struktur manajemen, dan remunerasi eksekutif. Selanjutnya, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) mencakup integrasi atas 3 dimensi utama yang dikenal dengan *Triple Bottom Line* (TBL) atau tiga pilar keberlanjutan yaitu:

1. *Profit* (Keuntungan)

Dimensi profit atau keuntungan finansial merupakan faktor penting dalam keuangan berkelanjutan. Keuntungan tersebut tidak hanya diukur dari kajian perspektif finansial saja, tetapi juga dikaji atas dampak sosial dan lingkungan dari investasi atau aktivitas bisnis yang dilakukan. Manajemen perusahaan dan investor seringkali mempertimbangkan berbagai keuntungan yang bersifat jangka panjang, menghindari terjadinya praktik bisnis yang merugikan lingkungan atau masyarakat, dan meningkatkan respon pasar yang diukur melalui nilai perusahaan.

2. *Planet* (Lingkungan/Bumi)

Dimensi planet atau lingkungan dalam keuangan berkelanjutan memfokuskan pada perlindungan serta pengelolaan atas sumber daya alam yang dimiliki. Manajemen perusahaan dan investor dapat mengambil langkah berkelanjutan dalam operasionalnya, di antaranya pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang terbarukan, dan pengelolaan limbah. Saat ini perusahaan menekankan pada investasi pada usaha-usaha yang mendukung adanya energi bersih dan perlindungan terhadap lingkungan.

3. *People* (Masyarakat)

Dimensi sosial dalam keuangan berkelanjutan memfokuskan pada dampak positif pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, meliputi perlindungan hak asasi manusia, lingkungan kerja yang aman, keadilan sosial, serta partisipasi dalam komunitas lokal. Perusahaan menekankan pada pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar di tempat mereka beroperasi.

B. Manfaat Keuangan Kerkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Pemenuhan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya dukungan yang menyeluruh dari sektor jasa keuangan dalam rangka penciptaan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara menyelaraskan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
2. Ketersediaan pembiayaan atas investasi dengan mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan *governance* (tata kelola).
3. Terdapat sistem keuangan yang mempertimbangkan interaksi antara imbal hasil dan risiko yang dihadapi atas keseimbangan dari faktor keuangan, sosial, lingkungan dan ekonomi yang mendukung tercapainya *sustainable development goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan).

Selain memberi dampak positif pada lingkungan dan masyarakat, keuangan berkelanjutan juga memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, dan masyarakat. Manfaat pendekatan keuangan keberlanjutan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) perusahaan yang disingkat dengan ESG yaitu: (1) Risiko dan peluang yang lebih baik. Melalui analisis ESG, perusahaan dan investor dapat mengidentifikasi potensi peluang dan risiko yang mempengaruhi kinerja jangka panjang, di antaranya risiko lingkungan, risiko reputasi, dan risiko sosial (isu hak asasi manusia). (2) Peningkatan kinerja dalam jangka

panjang. Perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan kemungkinan memiliki kinerja dalam jangka panjang yang lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya stabilitas atas pendapatan dan profitabilitas yang tinggi, karena perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik dan mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih baik. (3) Akses pembiayaan lebih mudah. Perusahaan yang memfokuskan pada keberlanjutan cenderung mendapat akses pembiayaan yang lebih mudah. Investor dan kreditor akan lebih mendukung perusahaan yang operasionalnya berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. (4) Peningkatan reputasi dan *branding*. Praktik keberlanjutan yang baik akan mampu meningkatkan reputasi sebuah perusahaan dan juga meningkatkan *branding* (citra merek). Konsumen, investor, dan masyarakat menghargai perusahaan yang berkomitmen terhadap pemenuhan keberlanjutan dan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial).

(5) Daya tarik investor. Perusahaan yang memfokuskan kinerja berbasis ESG akan mampu menarik investor atas investasi yang bersifat berkelanjutan. (6) Inovasi dan efisiensi operasional. Praktik keberlanjutan mampu mendukung perusahaan untuk terus menciptakan inovasi baik dalam proses maupun produk perusahaan. Inovasi dapat berupa penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien serta mendukung penghematan biaya yang bersifat jangka panjang. (7) Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Perusahaan yang memperhatikan isu sosial dan lingkungan akan meningkatkan ketertarikan karyawan dalam menentukan lingkungan kerja yang nyaman, untuk selanjutnya mampu meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. (8) Mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui investasi keuangan berkelanjutan, maka perusahaan dan investor berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat. (9) Memenuhi adanya tuntutan pasar dan regulasi. Adanya tuntutan bahwa perusahaan harus mampu mendorong terpenuhinya praktik keberlanjutan, hal ini karena perusahaan

harus mampu memenuhi tuntutan pasar dan regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. (10) Membangun kemitraan yang harmonis. Pendekatan keuangan berkelanjutan mampu membangun kemitraan lebih erat dengan pemangku kepentingan diantaranya pelanggan, pemerintah, *supplier*, komunitas lokal, serta lembaga non-pemerintah.

C. Tantangan Keuangan Kerkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Terdapat beberapa hambatan penerapan keuangan berkelanjutan agar dapat memberi manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Ketidakpastian regulasi. Regulasi tentang keuangan berkelanjutan beragam dan belum didukung adanya standar global yang konsisten, ini menghasilkan kesulitan bagi perusahaan dan investor dalam mematuhi persyaratan di berbagai yurisdiksi.
2. Ketidakkonsistenan data yang dibutuhkan. Analisis ESG atau dimensi lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) perusahaan membutuhkan data reliabel, namun belum semua data tersedia secara lengkap, di samping itu belum ada pengukuran dampak sosial dan lingkungan yang objektif.
3. Kurangnya pemahaman tentang keuangan berkelanjutan dari para pelaku bisnis, investor, dan masyarakat.
4. Kemungkinan terjadi "*greenwashing*" sehingga perusahaan mempercantik citranya, namun kenyataannya perusahaan tidak benar-benar mengadopsi praktik berkelanjutan tersebut.
5. Kurangnya insentif keuangan. Dampak positif keuangan berkelanjutan kemungkinan tidak tercermin secara langsung dari hasil finansial yang lebih tinggi dalam waktu singkat, namun memiliki manfaat jangka panjang, hal tersebut dapat mengurangi insentif perusahaan untuk mengadopsi keuangan berkelanjutan.
6. Kompleksitas pemetaan risiko ESG yang kemungkinan sulit dipahami sepenuhnya.

7. Kebutuhan investasi awal yang besar, ini menjadi hambatan bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya.
8. Kebijakan atau praktik berkelanjutan dari perspektif lingkungan memiliki dampak sosial negatif, di antaranya kehilangan lapangan kerja.
9. Pasar yang belum matang artinya pasar dan infrastruktur kemungkinan belum sepenuhnya matang sehingga pelaku bisnis dan investor memiliki keterbatasan dalam memilih produk atau investasi berkelanjutan.
10. Resistensi terhadap perubahan karena perusahaan dan pemangku kepentingan kemungkinan lebih tertarik dan nyaman dengan model bisnis konvensional dan resisten dibandingkan perubahan menuju pendekatan berkelanjutan.

D. Langkah-Langkah menuju Keuangan Keberlanjutan (*Sustainable Finance*)

Serangkaian langkah-langkah diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai dimensi lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola perusahaan (*governance*) (ESG) dalam rangka pengambilan keputusan keuangan. Langkah-langkah penting yang diperlukan untuk mencapai keuangan berkelanjutan meliputi:

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran perusahaan, investor, dan masyarakat tentang keuangan berkelanjutan yang mampu mempengaruhi keputusan keuangan.
2. Pengembangan kebijakan internal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam operasi perusahaan meliputi komitmen pengurangan emisi, pengelolaan limbah, diversitas karyawan, serta tanggung jawab sosial lainnya.
3. Pengukuran dan pelaporan ESG untuk memahami dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, dan untuk pelaporan ESG perusahaan dapat menggunakan kerangka kerja standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI).

4. Melakukan analisis terhadap risiko ESG yang dapat membantu perusahaan dan investor dalam mengidentifikasi risiko potensial yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan dengan menekankan pada pemahaman tentang faktor lingkungan dan sosial tersebut dapat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan.
5. Melakukan integrasi analisis ESG dalam pengambilan keputusan sebuah investasi mencakup risiko dan peluang investasi serta pemilihan portofolio yang relevan dengan nilai-nilai berkelanjutan.
6. Perusahaan perlu mencari sumber pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan berkelanjutan, di antaranya pembiayaan hijau atau sosial yang memiliki dampak positif pada lingkungan dan masyarakat.
7. Melakukan investasi berkelanjutan termasuk investasi di saham perusahaan berkelanjutan, obligasi hijau, atau dana indeks ESG.
8. Inovasi berkelanjutan seperti pengembangan produk yang ramah lingkungan atau teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
9. Pengembangan kemitraan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan diantaranya pemasok, pelanggan, dan komunitas lokal yang selanjutnya dapat membantu dalam mempromosikan adanya praktik keberlanjutan.
10. Berpartisipasi dalam advokasi yang mendukung inisiatif berkelanjutan dalam bentuk dukungan terhadap regulasi keberlanjutan. Melibatkan karyawan di pelatihan keuangan berkelanjutan yang dapat meningkatkan komitmen dan kesadaran atas praktik berkelanjutan di perusahaan.
11. Pembentukan portofolio berkelanjutan dengan menambah aset berkelanjutan seperti saham perusahaan yang memberi prioritas pada ESG, obligasi hijau, atau dana indeks berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem dengan dukungan secara komprehensif atas kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang selaras dengan kepentingan ekonomi,

lingkungan, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem keuangan berkelanjutan yang berupa 7 langkah inisiatif dalam membangun konsep keuangan berkelanjutan disajikan pada gambar 9.1 berikut ini.



Gambar 9. 1 Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia
Sumber: (Katadata, 2022)

Kesadaran (*Awareness*) Keberlanjutan. Menurut Epstein & Buhovac (2014), kesadaran keberlanjutan mengacu pada sistem manajemen dengan menerapkan konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnis, sistem keuangan, serta dan pasar modal. Tujuan kesadaran keberlanjutan tersebut adalah mengintegrasikan keberlanjutan dalam taktik dan perbandingan orporasional. Kesadaran atau perhatian tersebut dapat diperoleh dengan adanya pengembangan sebuah strategi komunikasi tentang keuangan berkelanjutan baik kepada industri keuangan, para pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat.

Kemampuan kesadaran keberlanjutan terdiri atas 9 prinsip (Epstein & Buhovac, 2014) disajikan dalam tabel 9.1 yaitu:

Tabel 9.1 Prinsip-Prinsip Kesadaran Keberlanjutan

No.	Prinsip	Kemampuan Keberlanjutan
1	Etika (<i>Ethics</i>)	Perusahaan menetapkan, menerapkan, memonitor, dan memelihara standar, peraturan serta praktik etika yang berhubungan dengan para pemangku kepentingan
2	Tata Kelola (<i>Governance</i>)	Perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, mengakui terjadinya liabilitas fidusia manajer korporasi untuk memfokuskan pada kepentingan para pemangku kepentingan korporasi
3	Transparansi (<i>Transperancy</i>)	Perusahaan melakukan pengungkapan (<i>disclosure</i>) informasi tepat waktu terkait produk, layanan, dan aktivitasnya, hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan mengambil keputusan yang tepat dan cepat
4	Hubungan bisnis (<i>Business relationship</i>)	Perusahaan terlibat dalam berbagai praktik perdagangan yang adil baik dengan pemasok (<i>supplier</i>), distributor, maupun mitra kerja
5	Pengembalian keuangan (<i>Financial return</i>)	Perusahaan memberi kompensasi kepada pemilik modal melalui pengembalian investasi dan memberi perlindungan aset perusahaan

No.	Prinsip	Kemampuan Keberlanjutan
6	Keterlibatan masyarakat/pengembangan ekonomi (<i>Community involvement/economic development</i>)	Perusahaan menjalin hubungan (<i>network</i>) saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat (perusahaan harus peka terhadap budaya, konteks, dan kebutuhan masyarakat)
7	Nilai produk serta layanan (<i>Value of products and services</i>)	Perusahaan menghormati adanya kebutuhan, keinginan, dan hak <i>customer</i> , selanjutnya berupaya untuk memberi nilai layanan yang baik dan produk level tertinggi
8	Praktik ketenagakerjaan (<i>Employment practises</i>)	Perusahaan mempromosikan adanya pengembangan, keragaman, dan pemberdayaan pegawai baik secara pribadi maupun profesional melalui praktik manajemen (pengelolaan) sumber daya manusia
9	Perlindungan lingkungan (<i>Protection of the environment</i>)	Perusahaan bertanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan lingkungan sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui produk, proses, layanan, serta aktivitas lainnya

Sumber: (Harahap & Anis, 2023)

Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan rancangan sistem formal dalam perusahaan yang memastikan bahwa bakat manusia berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. MSDM terkait perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atas seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemutusan hubungan kerja

untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendekatan baru menyatakan bahwa kapabilitas SDM merupakan fondasi utama atas peningkatan dan keberlanjutan perusahaan (Aidara *et al.*, 2021).

Dukungan Non Pemerintah. Dukungan non pemerintah berupa permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat diperoleh para pelaku usaha dalam bentuk dukungan riset dari lembaga riset atau universitas, serta dukungan lembaga internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.

Koordinasi Kementerian atau Lembaga (K/L). Koordinasi kementerian atau lembaga ini mampu memperluas jaringan koordinasi antar para pelaku usaha dengan Kementerian maupun Lembaga serta para pemangku kepentingan.

Infrastruktur Pasar. Perusahaan harus menyediakan prasarana teknologi dan informasi dan infrastruktur lainnya yang mendukung seluruh kegiatan keuangan berkelanjutan.

Produk. Perusahaan harus terus menggali potensi inovasi dengan mengembangkan berbagai jenis produk usaha dan layanan prima secara berkelanjutan, dan memperhatikan dampaknya, seperti pengelolaan limbah yang dihasilkan atas produksi usaha perusahaan.

Kebijakan. Perusahaan harus menyiapkan wadah dalam rangka pengembangan berbagai kebijakan yang dapat mendukung tercapainya keuangan berkelanjutan.

7 langkah inisiatif yang dikemukakan di atas dalam membangun konsep keuangan berkelanjutan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan jangka pendek yang selanjutnya akan menghasilkan kemakmuran di masa depan. Di samping itu, penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi akan memudahkan akses arus informasi secara cepat, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Perubahan

pola pikir dari para pelaku bisnis akan berlanjut dan proses transisi menuju pembangunan diharapkan berjalan baik, apabila tidak memperhatikan dimensi ekonomi saja, namun juga memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola. Perubahan memerlukan adanya mobilisasi sumber daya manusia serta nalar dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ketersediaan sumber daya alam juga menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi (Delvina & Hidayah, 2023).

E. Penerapan Keuangan Keberlanjutan (*Sustainable Finance*) dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung praktik keuangan berkelanjutan dari perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Melalui THI akan memudahkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menilai aktivitas ekonomi debitur terutama terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Ada 3 klasifikasi dengan kategori warna, yakni merah, kuning, dan hijau. Warna merah menunjukkan sektor kategori tidak ramah lingkungan dan sektor ini harus didorong untuk lebih ramah pada lingkungan. Warna kuning menunjukkan sektor kategori yang bertransisi menuju pemenuhan dimensi lingkungan (*Environment*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) disingkat ESG. Selanjutnya warna hijau adalah sebuah kondisi ideal, yaitu kondisi yang berdampak positif pada lingkungan. Penggunaan ukuran THI juga akan membantu perbankan dalam membiayai bisnis yang memenuhi ramah lingkungan.

Masyarakat berharap ada kepedulian perusahaan pada kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya di samping orientasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memperhatikan proses produksi yang memenuhi ramah lingkungan. Taksonomi Hijau Indonesia dalam pemenuhan praktik keuangan berkelanjutan disajikan pada gambar 9.2 sebagai berikut:

Kategori Warna	Kondisi
HIJAU	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengakibatkan bahaya yang signifikan 2. Menerapkan pengamanan yang minimum 3. Memberi dampak positif pada lingkungan (sesuai dengan tujuan lingkungan taksonomi hijau) 	Perusahaan menyelenggarakan usaha yang melindungi dan meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi perubahan iklim dan memenuhi standar tata kelola (<i>governance</i>) yang ditetapkan pemerintah
KUNING	
Tidak mengakibatkan bahaya yang signifikan	Perusahaan menyelenggarakan usaha yang memenuhi beberapa kriteria hijau. Penetapan manfaat usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan ditetapkan melalui pengukuran dan dukungan <i>best practices</i> yang lain
MERAH	
Kegiatan operasi perusahaan membahayakan	Perusahaan menyelenggarakan usaha yang tidak memenuhi kriteria baik hijau maupun kuning

Gambar 9. 2 Taksonomi Hijau Indonesia untuk Keuangan Berkelanjutan

Sumber: (Katadata, 2022)

Taksonomi Hijau Indonesia menunjukkan klasifikasi atas aktivitas ekonomi yang mendukung adanya upaya perusahaan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sektor keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat tercapainya kondisi ekonomi hijau. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyediakan modal untuk kegiatan ekonomi yang memiliki dampak positif pada lingkungan, dan diharapkan perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis yang kompetitif.

F. Kaitan antara Keuangan Keberlanjutan (*Sustainable Finance*) dengan Nilai Perusahaan

Perkembangan saat ini, sektor industri mengalami perkembangan pesat diikuti dengan berkembangnya tanggung jawab sebuah perusahaan. Perusahaan tidak hanya memprioritaskan pada maksimalisasi laba, namun dituntut juga berkontribusi dalam menyeimbangkan 3 dimensi yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi. Tanggung jawab sosial perusahaan di lembaga jasa keuangan yang disebut keuangan berkelanjutan, bertujuan menyediakan modal pada bisnis yang tidak merugikan lingkungan hidup, masyarakat sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Ryszawska, 2016). Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perusahaan selain diwajibkan menghasilkan kinerja ekonomi yang baik, juga perlu memfokuskan pada dampak dan perkembangan sosial lingkungan (Gunawan & Susilo, 2021). Aktivitas keuangan berkelanjutan tersebut harus diungkap dan dilaporkan, agar pemangku kepentingan memperoleh informasi terkait aktivitas perusahaan. Hasil riset menunjukkan bahwa pengungkapan keuangan berkelanjutan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. *Stakeholder* memberi penilaian positif

terhadap perusahaan, dan pada akhirnya mencapai tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan salah satunya diukur menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q mengukur kinerja berbasis pasar dari perusahaan (*market based performance*).

Penelitian pengaruh pengungkapan keuangan berkelanjutan terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan dengan menggunakan standar GRI G4 sebagai dasar pengukuran pengungkapan keberlanjutan (Aydoğmuş *et al.*, 2022). Standar lain menggunakan *Refinitiv ESG scores* untuk mengukur pengungkapan keberlanjutan serta dengan pendekatan *ESG rating system* yang dikembangkan *Sino-Securities Index Information Service Co., Ltd.* sebagai dasar pengukuran pengungkapan keuangan berkelanjutan (Wu, 2022). Sementara penelitian yang dilakukan Marheni (2022) menggunakan standar dari *Sustainability Accounting Standard Board* (SASB) dalam menilai pengungkapan keuangan berkelanjutan sebuah perusahaan. Karakteristik standar SASB adalah dispesifikasi untuk jenis industri yang berbeda, hal tersebut memungkinkan dapat dilakukan analisis untuk setiap jenis industri.

Teori yang mendasari kajian keuangan keberlanjutan terhadap nilai pasar adalah teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan entitas yang hanya beroperasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, melainkan juga memberi manfaat bagi *stakeholder* yaitu karyawan, investor, *customer*, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. *Stakeholder* tersebut memiliki peran penting pada capaian keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. Teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan harus membangun kepercayaan investor dan masyarakat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama teori ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Selaras teori *stakeholder*, teori legitimasi juga mengemukakan adanya peran pemangku kepentingan dalam menekan operasi perusahaan. Dengan menyediakan informasi pada laporan keberlanjutan dan laporan tahunan (*annual report*), akan mampu meningkatkan legitimasi kinerja perusahaan yang terefleksi pada peningkatan nilai perusahaan (Gunawan & Susilo, 2021). Transparansi pengungkapan informasi akan menghasilkan persepsi positif pemangku kepentingan, sehingga mengurangi terjadinya ketidaksamaan informasi (*asymmetry information*) dan meningkatkan reputasi perusahaan. Peningkatan reputasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

G. Kesimpulan

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) merupakan fundamental utama membangun masa depan berkelanjutan di bumi. Berbasis integrasi dimensi lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) perusahaan yang disingkat dengan ESG akan mampu menciptakan dampak positif yang bersifat jangka panjang. Tantangan dihadapi perusahaan dalam implementasi keuangan keberlanjutan, perlu memperhatikan langkah-langkah utama mencapai keuangan berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Keuangan berkelanjutan mendukung aktivitas perekonomian terkait pengambilan keputusan berinvestasi yang juga mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk investasi dalam jangka panjang. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan *sustainable finance* di Indonesia yaitu sulitnya memberi keyakinan pada para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan usaha yang berkesinambungan dengan tetap memikirkan dampak sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidara, S., Mamun, A. A., Nasir, N. A. M., Mohiuddin, M., Nawir, N. C., Zainol, N. R. (2021). Competitive Advantages of the Relationship between Entrepreneurial Competencies and Economic Sustainability Performance. *Sustainability* , 13, 864. <https://doi.org/10.3390/su13020864>.
- Aydoğmuş, M. Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG Performance on Firm Value and Profitability. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 119-127. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221484502200103X>.
- Delvina, E. M. & Hidayah, R. (2023). The Effect of ESG (Environmental, Social and Governance) Performance on Company Value and Company Performance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5436-5444.
- Epstein, M. J. & Buhovac, R. A. (2014). *Making Sustainability Work: Second Edition*. Property of Greenleaf Publishing Ltd.
- Gunawan & Susilo. (2021). Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Share Price: A Study of Consumer Goods Industries using Sustainable Accounting Standard Board (SASB) Disclosure. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 8(1), 65-84.
- Harahap, M. F. P. & Anis, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Keberlanjutan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI 2018-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1977-1988. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet> atau <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16438> e-ISSN 2339-0840.
- Katadata. (2022). *Peluang, Tantangan, dan Inisiatif Green Finance di Indonesia*. Katadata Insight Center. <https://katadata.co.id/green-finance-di-indonesia>.

- Marheni. (2022). Pengaruh Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1696-1704. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6059/4163>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Rezaee, Z. (2016). Business Sustainability Research: A Theoretical and Integrated Perspective. *Journal of Accounting Literature*, 36, 48-64.
- Ryszawska, B. (2016). Sustainability Transition Needs Sustainable Finance. *Copernican Journal of Finance and Accounting*, V, 185-194.
- Wu, S., Li, X., Du, X. & Li, Z. (2022). The Impact of ESG Performance on Firm Value: The Moderating Role of Ownership Structure. *Sustainability*, 14(21), 14507; <https://doi.org/10.3390/su142114507>.
<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/14507>.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya



Penulis lahir di kota Sampang tanggal 30 November 1973. Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya pada Program Studi Akuntansi. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Akuntansi STIESIA Surabaya tahun 1996, Magister Sains (M.Si.) Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1998, dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2005. Meraih gelar profesor pada tanggal 1 Agustus 2023. Bidang keahlian penulis adalah Akuntansi Keuangan. Motivasi penulis adalah sekecil kebaikan yang dilakukan sekarang, maka berdampak besar di masa depan. Penulis aktif menghasilkan buku Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Monograf Kajian Teoritis Capital Structure, Firm Size, Volatility, Tangibility, Uniqueness & Profitability, Monograf Faktor Penting Sukses Inklusi Keuangan, Monograf Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Ditinjau dari Peran Struktur Kepemilikan dan *Corporate Social Responsibility*, *book chapter* Etika Profesi Bidang Akuntansi, Akuntansi Manajemen, dan Manajemen Keuangan.

Email Penulis: nurfadjrih@stiesia.ac.id

BAB 10

AKUNTANSI UNTUK RANTAI PASOKAN BERKELANJUTAN

Dr. Hj. Musvianti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA., CSP.
Universitas Mulawarman

A. Pendahuluan

Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan dan kualitas lingkungan. Tanpa upaya yang sistematis untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan, kualitas hidup akan terancam menurun dengan cepat tanpa kemungkinan perbaikan (Min & Kim, 2012). Disisi lain pemenuhan kebutuhan hidup melalui aktivitas perekonomian dipengaruhi oleh kegiatan produksi. Aktivitas produksi perusahaan menjadi perhatian global akan isu-isu lingkungan dan sosial. Semakin gencarnya tuntutan bagi perusahaan agar tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan yang maksimal atau maksimalisasi profit, menyebabkan perubahan strategi dalam model bisnis perusahaan.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pengelolaan rantai pasokan yang ramah lingkungan, dikenal sebagai rantai pasokan hijau (*Green Supply Chain Management-GSCM*) atau rantai pasokan berkelanjutan (*Sustainable Supply Chain Management-SSCM*). Faktor pendorong utama adalah penggabungan efisiensi lingkungan atau *eco-efisiensi* ke dalam rantai nilai, hubungan antara aktivitas pengadaan, produksi, dan distribusi, serta faktor eksternalitas

yang memengaruhi aktivitas tersebut (Min dan Kim, 2012). Konsep keberlanjutan menjadi hal penting dalam operasional perusahaan. Perusahaan beroperasi untuk mencapai kinerja dalam tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini terjadi karena berkembangnya kesadaran "*green business*" yaitu menjadikan konsep "keberlanjutan" sebagai paradigma baru dalam pengukuran kinerja. Hal ini berdampak pada pemilihan keputusan yang mampu menjadikan bisnis perusahaan berkelanjutan dan pada akhirnya mampu meningkatkan *value* perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki kesempatan untuk mengubah rantai pasokannya menjadi rantai pasokan berkelanjutan (Beske & Seuring, 2014). Rantai pasokan berkelanjutan menekankan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya pelanggan, karyawan dan pemasok serta pengelolaan hubungan internal dan eksternal untuk menciptakan nilai, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja keseluruhan dalam rantai pasokan (Ahi & Searcy, 2013)

Perkembangan ilmu akuntansi harus berfokus pada aspek keberlanjutan agar eksistensinya terus terjaga. Akuntansi sebagai salah satu disiplin ilmu yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan mengalami perkembangan seiring dengan dinamisasi bisnis. Akuntansi harus menangani kompleksitas rantai pasokan sebagai sebuah entitas, yang mencakup organisasi atau pemasok pada saluran hulu dan pembeli pada saluran hilir dengan tingkat kompleksitasnya tinggi. Oleh karena itu akuntansi harus menyediakan dukungan keputusan bagi para manajer dalam situasi yang tidak pasti, global, berorientasi logistik, dan pengaturan komunikasi yang diperlukan untuk manajemen rantai pasokan yang efektif (Burritt & Schaltegger, 2014). Pemilihan dan pengambilan keputusan rantai pasokan akan mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan dan membentuk strategi bisnis dengan memiliki rantai pasokan yang berkelanjutan sebagai upaya

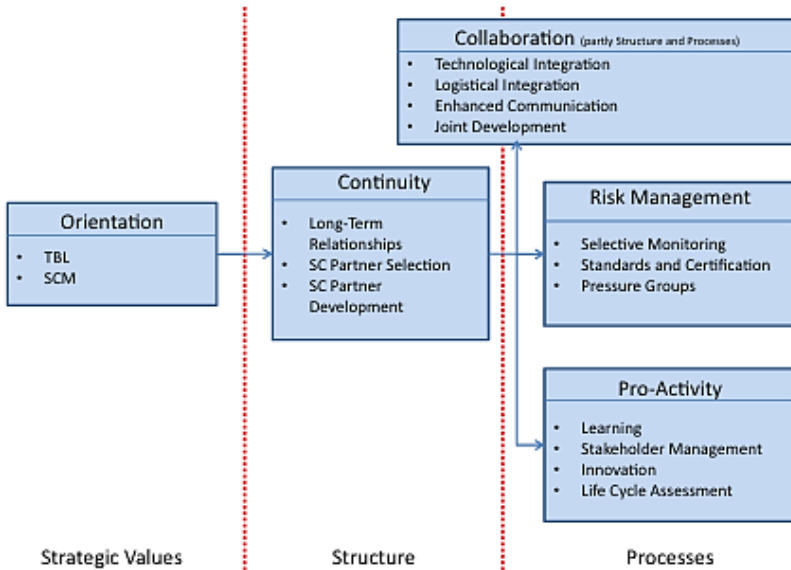
perusahaan mencapai *sustainability business* yang tercermin pada kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu peran informasi akuntansi sangat diperlukan agar tujuan keberlanjutan menjadi bagian utama dalam bisnis.

B. Konsep Rantai Pasokan Berkelanjutan

Seuring & Müller (2008) mendefinisikan bahwa rantai pasokan berkelanjutan adalah manajemen aliran bahan, informasi, dan modal dengan memperhatikan tujuan dari tiga aspek pembangunan yang berkelanjutan, yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan ini menitikberatkan pada kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Definisi ini juga mencakup kerjasama antar mitra dalam rantai pasok (Sharfman dkk., 2009). Rantai pasokan berkelanjutan dinyatakan sebagai pengelolaan yang terkoordinasi dari rantai pasok melalui integrasi sukarela faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan sistem utama bisnis antarperusahaan yang dirancang secara efisien dan efektif dalam mengatur aliran material, informasi, dan modal yang terkait dengan pengadaan, produksi, dan distribusi produk atau layanan.

Karakteristik utamanya berfokus pada aliran, koordinasi, pemangku kepentingan, hubungan, nilai, efisiensi dan kinerja. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan profitabilitas, daya saing, serta daya tahan terhadap tantangan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Ahi & Searcy, 2013). Dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasokan berkelanjutan adalah pengelolaan rantai pasokan yang efisien dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam penilaian kelayakan pemasok, keberlanjutan sumber daya bahan baku, standar keamanan dan kualitas produk, serta aktif melibatkan pemangku kepentingan agar tercipta rantai pasokan yang berkelanjutan.

Manajemen rantai pasokan terus berkembang ke arah rantai pasokan keberlanjutan dengan pengembangan kerangka kerja berdasarkan kajian literatur yang dilakukannya (Beske & Seuring, 2014).



Gambar 10. 1 Kategori dan Praktik Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan

Sumber : (Beske & Seuring, 2014)

Kerangka kerja yang dikembangkan oleh Beske & Seuring (2014) menunjukkan pengelompokan praktik-praktik rantai pasokan keberlanjutan ke dalam lima kategori umum. Kategori-kategori ini adalah orientasi, kontinuitas, kolaborasi, manajemen risiko dan proaktif. Dengan kategori ini, manajemen rantai pasokan dapat disusun pada tiga tingkat hierarki. Orientasi merupakan aspek dasar dalam manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan. Keseriusan terhadap keberlanjutan dan manajemen rantai pasokan menjadi bagian dari strategi perusahaan serta nilai-nilai yang dianut. Fokus pada orientasi ini menyoroti pentingnya dukungan dari manajemen puncak sebagai faktor krusial dalam mencapai potensi penuh rantai

pasokan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan orientasi sebagai bagian integral dari strategi perusahaan, dengan menggabungkan konsep TBL (*Triple Bottom Line*) dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi guna mencapai keunggulan bersaing yang berdimensi berkelanjutan.

Manajer perlu menginternalisasi pemikiran dan tujuan manajemen rantai pasokan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan membangun kolaborasi, yang merupakan elemen kunci dalam strategi manajemen rantai pasokan berkelanjutan untuk mengurangi biaya transaksi. Komunikasi juga membantu meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan, tidak hanya dari mitra terpilih, dan harus diterapkan baik pada pemasok maupun pelanggan. Fokus pada kelompok pelanggan yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya merugikan kinerja secara keseluruhan, tetapi juga menghasilkan keuntungan non-finansial. Rantai pasokan berkelanjutan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan rantai pasokan konvensional (Beske & Seuring, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa kategori orientasi merupakan penentuan rantai pasokan dengan memperhatikan pengurangan limbah, peningkatan efisiensi energi, dan praktik produksi yang ramah lingkungan. Pemilihan pemasok yang berorientasi pada keberlanjutan seperti memiliki emisi karbon yang rendah dan menerapkan aspek kinerja sosial seperti perhatian terhadap keselamatan kerja dalam keseluruhan rantai pasokan. Kategori Kontinuitas ditempatkan pada tahap kedua dalam manajemen rantai pasokan. Kontinuitas rantai pasokan yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan mitra rantai pasokan, hubungan jangka panjang, dan pemilihan mitra rantai pasokan. Hubungan yang baik dan saling menguntungkan menjadi faktor kunci dalam manajemen rantai pasokan berkelanjutan. Praktik-praktik ini perlu diterapkan pada pemasok dan pelanggan, yang seringkali melibatkan

bagian rantai pasokan yang lebih panjang dibandingkan dengan rantai pasokan konvensional (Beske & Seuring, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kategori kontinuitas akan memperkuat hubungan dan meningkatkan kemampuan rantai pasokan secara keseluruhan, membuatnya lebih efisien dan kompetitif. Selain itu, hal ini dapat mengurangi risiko gangguan dalam rantai pasokan, memastikan rantai pasokan tetap berkelanjutan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Semua ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Kategori kolaborasi terletak pada struktural dan kerangka kerja operasional. Praktik kolaborasi meliputi komunikasi yang ditingkatkan (*enhanced communication*), integrasi logistik (*logistic integration*), integrasi teknologi (*technological integration*), dan pengembangan bersama (*joint development*) Kategori mencakup isu-isu yang mendorong kolaborasi struktur organisasi atau infrastruktur teknologi informasi.

Aspek kolaborasi dicapai dalam rantai pasokan dikelompokkan pada tingkat operasional, yaitu pertemuan rutin antar departemen dan antar organisasi. Khususnya untuk produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengetahuan tentang komponen, bahan dan kondisi kerja di semua tahap rantai pasokan sangat penting karena terdapat informasi rinci biasanya dengan pemasok masing-masing (Beske & Seuring, 2014). Kategori kolaborasi merupakan kerjasama berbagai pihak dalam rantai pasokan dengan teknologi yang diintegrasikan pada proses dan sistem rantai pasokan serta kolaborasi untuk inovasi, efisiensi dan keberlanjutan operasi. Penyatuan logistik dapat berupa penyatuan sistem manajemen persediaan, pengiriman meliputi transportasi dan pengelolaan gudang.

Kategori kolaborasi berada pada struktur dan kerangka operasional dalam manajemen rantai pasokan. Praktik kolaborasi ini mencakup peningkatan komunikasi (*enhanced communication*), integrasi logistik (*logistic integration*), integrasi teknologi (*technological integration*), dan pengembangan bersama

(*joint development*). Isu-isu yang mendorong kolaborasi termasuk struktur organisasi dan infrastruktur teknologi informasi. Aspek kolaborasi dalam rantai pasokan dapat tercapai melalui pertemuan rutin antar departemen dan antar organisasi pada tingkat operasional. Khususnya untuk produk yang ramah lingkungan berkelanjutan, pengetahuan tentang komponen, bahan, dan kondisi kerja di semua tahap rantai pasokan menjadi penting karena informasi yang rinci sering kali tersedia dengan pemasok masing-masing, yang membantu menghindari asimetri informasi (Beske & Seuring, 2014).

Kategori kolaborasi merupakan kerjasama antara berbagai pihak dalam rantai pasokan dengan teknologi yang terintegrasi pada proses dan sistem rantai pasokan, serta kolaborasi untuk inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan operasi. Penyatuan logistik dapat berupa penyatuan sistem manajemen persediaan, pengiriman yang mencakup transportasi, dan pengelolaan gudang. Kategori manajemen risiko, merupakan pendekatan manajemen berkelanjutan yang melibatkan penggunaan standar dan sertifikasi (*standards and certification*) identifikasi standar dan sertifikasi sebagai "sumber potensial keunggulan kompetitif". Bila ini diimplementasikan dalam strategi bisnis secara keseluruhan seperti ISO 14001 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan, pemantauan selektif (*selective monitoring*) terhadap praktik, dan kelompok penekan (*pressure groups*) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kategori proaktivitas atau proaktif dalam rantai pasokan berkelanjutan mengacu pada berbagai praktik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja berkelanjutan dalam rantai pasokan. Kategori produktivitas dalam rantai pasokan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja berkelanjutan melalui pembelajaran terus-menerus (*learning*), manajemen pemangku kepentingan yang efektif (*stakeholder management*) seperti semakin banyak pelanggan yang membuat keputusan pembelian dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian inovasi dalam proses dan produk (*innovation*), serta evaluasi siklus

hidup (*life-cycle assessment*) yaitu penilaian dampak lingkungan dari siklus hidup produk termasuk *reuse* dan *reducing* (Beske & Seuring, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa kategori proaktif diperlukan agar organisasi yang cepat tanggap mengambil inisiatif dan bertindak secara aktif dalam mengendalikan atau mengubah situasi yang mempengaruhi kinerja. Evaluasi siklus hidup dan manajemen pemangku kepentingan merupakan hal yang membedakan dengan rantai pasok konvensional (Beske & Seuring, 2014).

Kategori proaktivitas dalam rantai pasokan berkelanjutan merujuk pada berbagai praktik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja berkelanjutan dalam operasi rantai pasokan. Tujuan dari kategori produktivitas dalam rantai pasokan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja berkelanjutan melalui pembelajaran berkelanjutan (*learning*). Selanjutnya juga ada manajemen pemangku kepentingan yang efektif (*stakeholder management*), inovasi dalam proses dan produk (*innovation*), serta evaluasi siklus hidup (*life-cycle assessment*), yang mencakup penilaian dampak lingkungan dari siklus hidup produk termasuk penggunaan kembali dan pengurangan (Beske & Seuring, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kategori proaktif diperlukan agar organisasi dapat secara cepat tanggap mengambil inisiatif dan bertindak secara aktif dalam mengendalikan atau mengubah situasi yang mempengaruhi kinerja. Evaluasi siklus hidup dan manajemen pemangku kepentingan merupakan elemen kunci yang membedakan dengan rantai pasok konvensional.

C. Akuntansi Rantai Pasokan Berkelanjutan

Akuntansi rantai pasokan berkelanjutan dapat dipahami bentuknya secara sistematis melalui berapa pendekatan, yaitu (Burrit & Schaltegger, 2014):

1. Mengkaji cara pemanfaatan informasi keberlanjutan untuk memicu kerjasama antara pemasok, organisasi lokal, dan

pelanggan guna memperjuangkan keberlanjutan dan kemajuan bersama.

2. Memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh yang dihasilkan oleh perusahaan, serta cara pengintegrasianya dalam operasi rantai pasokan.
3. Menyoroti strategi keseluruhan rantai pasokan dapat memberikan sumbangan positif terhadap keunggulan kompetitif dan nilai tambah bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan holistik untuk optimalisasi biaya di seluruh rantai pasokan memberikan fondasi sebelum pertimbangan keberlanjutan (Burritt & Schaltegger, 2014). Rantai pasokan membutuhkan strategi manajemen secara utuh dan inklusif. Hal ini melibatkan pengetahuan teknis dan pendekatan bisnis yang menyeluruh bergantung pada informasi finansial dan non-finansial. Pendekatan ini diharapkan dapat memengaruhi cara pandang manajemen dalam operasional dan strategi jangka panjang. Dalam konteks ini, rantai pasokan berkelanjutan tidak hanya dilihat sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga sebagai proses yang terjadi di seluruh ekosistem bisnis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini seringkali memerlukan kolaborasi erat antara perusahaan, pemasok, mitra logistik, hingga para pesaing, untuk mengoptimalkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan responsivitas, dan mengurangi risiko dalam rantai pasokan.

Pembahasan akuntansi rantai pasokan berkelanjutan merupakan bagian dari perkembangan akuntansi manajemen yang memainkan peranan penting untuk memastikan fungsi rantai pasokan berhasil dalam jangka panjang, serta transparansi sejalan dengan dinamisasi pasar yang mengglobal (Dobroszek *et al.*, 2020). Penjelasan lebih lanjut bahwa akuntansi rantai pasokan dimulai dari pembuatan rencana, pengendalian, pengawasan dan tersediannya informasi yang mendukung

optimalisasi tujuan dari kegiatan rantai pasokan sesuai operasional perusahaan.

Konsep akuntansi manajemen dapat diperinci dalam tiga perspektif di antaranya, rasional, terkoordinasi, dan informatif. Perspektif rasional menjelaskan bahwa akuntansi manajemen terfokus pada rantai pasokan memastikan bahwa semua pihak bekerja secara logis untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian diperlukan pembentukan sistem pengukuran kinerja khusus dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Perspektif kedua bahwa akuntansi manajemen memberikan dukungan kepada manajemen melalui perencanaan, pengendalian, dan penyediaan informasi ke rantai pasokan. Kinerja yang dihasilkan tercermin dalam hasil keuangan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di sisi lain, perspektif ketiga, akuntansi manajemen memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dengan memilih data yang relevan, dan sistem ini juga terjadi pembagian informasi yang diperlukan (Dobroszek *et al.*, 2020).

Akuntansi dalam konteks akuntansi keberlanjutan untuk produksi dan rantai pasokan mengacu pada berbagai teknik atau *tools* akuntansi manajemen yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja keberlanjutan meliputi (Burritt & Schaltegger, 2014):

1. *Environmental accounting*. Perlakuan dampak lingkungan dan biaya lingkungan diidentifikasi dan dinilai dari segi signifikansinya sebagai bagian dari struktur biaya bisnis. Akuntansi lingkungan mencakup pengukuran, pelaporan, dan analisis biaya dan manfaat dampak lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan.
2. *Environmental management accounting*. Menekankan pada keputusan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan adalah bagian dari sistem akuntansi manajemen yang fokus pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan terkait dengan aspek lingkungan dari operasi perusahaan.

3. *Activity based costing*. Kerangka kerja biaya berbasis aktivitas dibuat sebagai alat untuk mengevaluasi pengurangan biaya antar-perusahaan dalam rantai pasokan. Hal ini berkaitan dengan strategi biaya ditangani, dihitung, dan didistribusikan dalam lingkungan antar-perusahaan. *Process costing* adalah bagian penting dari biaya berbasis aktivitas yang masih relevan dalam dua hal di antaranya: *Pertama*, biaya berbasis aktivitas mengidentifikasi sekelompok penggerak biaya yang akan disatukan dengan biaya produk. Desain dianggap sebagai tempat biaya dan kinerja lingkungan yang diintegrasikan. *Kedua*, pencatatan untuk proses aliran material, energi, air, dan limbah juga merupakan bagian integral dari pencatatan biaya aliran material. Biaya berdasarkan aktivitas dinilai sebagai metode strategis untuk tujuan jangka panjang dalam aktivitas logistik terkait penciptaan nilai (Dobroszek *et al.*, 2020).
4. *Material flow cost accounting (MFCA)*. Konsep yang dikembangkan mencari *output* non-produk yang mengandung pemborosan, sehingga dapat dihilangkan dengan pelacakan proses yang cermat agar bisa membantu lingkungan menghemat biaya material perusahaan atau rantai pasokan. Akuntansi biaya aliran material (MFCA) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis aliran material dan biaya yang terkait dalam produksi. MFCA terkait dengan manajemen rantai pasok berkelanjutan berfokus pada optimalisasi penggunaan bahan baku dan pengurangan limbah dalam proses produksi. Selain itu untuk mengembangkan beberapa metode perhitungan biaya guna mengurangi jumlah bahan baku yang digunakan dan limbah yang dihasilkan (Atik & Kovacevic, 2020) .
5. *Carbon accounting and eco-control*. Perhitungan karbon dan perkiraan emisi gas rumah kaca untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Penghitungan karbon melibatkan pengukuran, pelaporan, dan pengelolaan emisi gas rumah kaca dari operasi organisasi, sedangkan *eco-control* pengendalian perusahaan berbasis lingkungan untuk

mengelola dan mengontrol praktik-praktik yang berdampak pada lingkungan.

6. *Water management accounting dan Supply Chain Value added*. Menganalisis jejak air (*water footprint*) pada aktivitas perusahaan dan rantai pasokan. Akuntansi manajemen air melibatkan pengukuran, pelaporan, dan analisis penggunaan air dalam operasi perusahaan serta dampaknya terhadap lingkungan. *Supply chain value added* merupakan analisis nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh rantai pasokan, termasuk faktor-faktor keberlanjutan oleh setiap entitas dalam rantai pasokan dan memahami kontribusi masing-masing bagian terhadap keseluruhan nilai.
7. *Sustainability balanced scorecard*. Suatu alat manajemen yang berfokus pada kinerja non moneter tetapi tetap mempertimbangan kinerja moneter dalam perspektif keuangan. *Sustainability balanced scorecard* digunakan untuk mengukur dan melacak kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi berdasarkan sejumlah perspektif.

Berbagai alat, metode, dan pendekatan tersebut yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam konteks produksi dan rantai pasokan.

Hubungan rantai pasok saat mencapai tahap *maturity*, maka akuntansi manajemen dapat memberikan kontribusi signifikan dengan menyediakan informasi yang mendukung manajemen kemitraan dan menjaga kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Beberapa contoh dari kontribusi ini meliputi, penilaian rinci tentang posisi kompetitif bersama, evaluasi detail mengenai investasi yang telah dilakukan, perencanaan dan pemantauan risiko dan manfaat bersama, pelaporan pencapaian tujuan terkait investasi, profitabilitas, pengurangan biaya, kualitas, dan lainnya, serta pelaporan tentang perluasan hubungan ke bisnis, pasar, atau teknologi baru (Ramos, 2004).

Informasi akuntansi dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi akan memberikan kepastian tindakan yang memadai untuk jangka pendek, serta membantu membuat keputusan lebih terarah untuk jangka menengah dan jangka panjang

(Velayutham *et al.*, 2021). Tanpa sistem akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, situasinya akan berbeda. Rantai pasokan memiliki tingkat ketidakpastian dari aktivitas hulu (pemasok) dan aktivitas hilir (pelanggan). Informasi tentang peningkatan penjualan akan memengaruhi permintaan persediaan bahan baku dan efisiensi penggunaan aset tetap. *Output* dari sistem akuntansi akan mencerminkan *economies of scale* dan tingkat efisiensi. Pada jangka menengah, mitigasi akan dilakukan jika ada risiko yang diperkirakan oleh perusahaan. Secara jangka panjang, informasi akuntansi dalam rantai pasokan berkelanjutan akan memengaruhi perencanaan strategis dalam penciptaan nilai.

D. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Rantai Pasokan Berkelanjutan

Membangun rantai pasokan yang erat antara pemasok dan pembeli mengharuskan tambahan pelaporan mengenai isu-isu rantai pasokan dan penggunaan data organisasi dan eksternal yang lebih luas serta mendalam (Ramos, 2004). Bentuk pelaporan akuntansi rantai pasok berkelanjutan dapat disajikan pada laporan keberlanjutan. Salah satu pedoman yang digunakan perusahaan untuk laporan keberlanjutan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi perusahaan untuk mengelola dan melaporkan aspek-aspek keberlanjutan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan konteks bisnis masing-masing (Moneva *et al.*, 2006). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan laporannya dengan konteks dan skala bisnis, isu yang relevan dengan pemangku kepentingan, dan jaminan konten keakuratan dan keandalan laporan.

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan bagian dari perlakuan akuntansi untuk rantai pasokan berkelanjutan. Pengungkapan rantai pasokan secara praktis dapat ditemukan pada laporan keberlanjutan perusahaan. Pengungkapan rantai pasokan berkelanjutan meliputi aktivitas hulu dan hilir perusahaan. Aktivitas hulu berkaitan dengan pengolahan bahan baku dengan semua kegiatan dan pihak yang terlibat. Sementara aktivitas hilir berkaitan dengan distribusi produk atau jasa ke konsumen. Contoh pengungkapan sebagai berikut:

Rantai Pasok Supply Chain [2-6]



Rantai pasok didefinisikan sebagai kegiatan pemenuhan produk & jasa oleh pihak lain (bisa anak usaha atau mitra) untuk mendukung kegiatan operasional Pupuk Kaltim, agar Perusahaan bisa lebih berkonsentrasi pada kegiatan bisnis utama. Produk & jasa dimaksud membawa/ dapat mempengaruhi nama/reputasi Pupuk Kaltim, sehingga memerlukan kontrak dengan persyaratan khusus yang ketat dan spesifik.

Supply chain is defined as an activity to fulfill the needs for products & services by other parties (either subsidiaries or partners) to support the operational activities of Pupuk Kaltim, allowing the Company to concentrate more on its main business activities. These products and services are able to affect or bear the Pupuk Kaltim's name and reputation, thus requiring a contract with strict and specific requirements.

Pupuk Kaltim memproduksi beberapa jenis produk, di antaranya pupuk urea, amoniak, dan pupuk NPK. Pupuk urea dibuat dengan cara mensintesis amoniak dengan karbon dioksida. Untuk bahan baku amoniak, Pupuk Kaltim memproduksi sendiri sehingga tidak perlu membeli dari pemasok. Bahan baku produksi amoniak adalah gas alam yang diambil dari Muara Badak melalui pipa sepanjang 60 km ke Bontang. Dengan demikian, bahan utamanya tergantung pada pasokan gas alam yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah.

Pupuk Kaltim produces several types of products, including urea, ammonia, and NPK fertilizer. Urea fertilizer is made through the synthesis of ammonia with carbon dioxide. Pupuk Kaltim produces its own ammonia raw material so that it does not need to buy from suppliers. The raw material for making ammonia is natural gas taken from Muara Badak through a 60 km pipeline to Bontang. Thus, the main ingredient depends only on the supply of natural gas, which is fully managed by the government.

Tabel Volume Penggunaan dan Nilai Pengadaan Bahan Baku Urea Tahun 2022
 Use Volume and Value of Urea Raw Materials Procurement in 2022

No	Pabrik Plant	VOLUME PENGGUNAAN BAHAN BAKU GAS (MMbbu) Volume of Urea Raw Materials (MMbbu)	NILAI PENGADAAN (Rp) Procurement Value (Rp)
1	Kaltim-1A, 2, 3, 5	59.175.434,13	Rp7.754.023.055.901,58
2	Kaltim-4	18.480.411,19	Rp1.620.763.391.686,28
Total		107.658.845,32	Rp9.404.786.447.587,86

Total pembelian bahan baku gas tersebut pada tahun 2022 adalah senilai Rp9.404,79 miliar (2021: Rp10.016.862.483.109,60) dan keseluruhan pasokan diperoleh dari pemasok lokal Kaltim.

The total purchase of raw gas materials in 2022 amounted to Rp9.404.79 billion (2021: Rp10.016.862.483.109.60) and all supplies were obtained from a local supplier in Kaltim.

Untuk bahan baku pupuk NPK, Pupuk Kaltim menggunakan pemasok dari dalam dan luar negeri. DAP, MOP/KCL powder dan flake, RP dipasok dari luar negeri, sedangkan bahan baku NPK lainnya, yakni RP, clay, coating oil, brucite, MgO 20%, MgO 18%, dolomite, boric acid dan zinc oxide dipasok dari dalam negeri.

For raw materials for NPK fertilizer, Pupuk Kaltim uses domestic and foreign suppliers. DAP, MOP/KCL powder and flake, RP are supplied from overseas, while other raw materials for NPK, namely: RP, clay, coating oil, brucite, MgO 20%, MgO 18%, dolomite, boric acid dan zinc oxide are supplied domestically.

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR • LAPORAN KEBERLANJUTAN 2022 SUSTAINABILITY REPORT

Gambar 10. 2 Pengungkapan Rantai Pasok pada Laporan Keberlanjutan

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur, 2022

Pengungkapan rantai pasokan ada kaitannya dengan dampak ekonomi yang menggunakan standar GRI. Perusahaan mengungkapkan rantai pasok berhubungan dengan pemasok lokal terkait proporsi pengeluarannya melalui GRI 204 yaitu GRI 308-1 mengenai Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan dan Pengungkapan GRI 308-2 mengenai dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Contoh pengungkapan sebagai berikut :

126

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL ASPECT PERFORMANCE

Pupuk Kaltim melakukan seleksi terhadap semua kontraktor/pemasok baru yang akan menjadi rekanan perusahaan dengan memasukkan kriteria Lingkungan dan K3. Hal ini diatur di dalam Prosedur Penerapan Aspek K3 & LH pada Pengadaan Jasa (SMT-KKK-26) yang dilakukan dalam tahapan Pra-Kualifikasi pada proses tender. Selama 2022, terdapat 3 (tiga) penyedia jasa baru (2011: 4) yang diseleksi menggunakan kriteria tersebut dengan presentase kelulusan 100%. [308-1]

Pupuk Kaltim selects all new contractors/suppliers that will become the company's partners by including Environmental and OSH criteria. This is regulated in the Procedure for the Application of OSH & EHS Aspects in Service Procurement (SMT-KKK-26) which is carried out in the Pre-Qualification stage of the tender process. During 2022, there were 3 (three) new service providers (2011:4) selected using these criteria with a 100% passing percentage.

[308-1]

Pupuk Kaltim juga telah mengidentifikasi dan menerapkan langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dalam rantai pasokan, antara lain:

1. Tumpahan bahan kimia ke lingkungan.
2. Tumpahan limbah B3 yang diangkut ke lingkungan.
3. Pembuangan sisa hasil pekerjaan/proyek yang tidak sesuai peraturan.
4. Pembuangan limbah non-B3 yang tercampur dengan limbah B3. [308-2, SEOJK F4]

Pupuk Kaltim has also identified and implemented mitigation measures against actual and potential significant negative environmental impacts in the supply chain, among others:

1. Chemical spills to the environment.
2. Spillage of transported hazardous waste into the environment.
3. Disposal of residual work/project results that are not in accordance with regulations.
4. Disposal of non-hazardous waste mixed with hazardous waste. [308-2, SEOJK F4]

Pada tahun 2022, biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp. 9.05 Miliar atau naik 31,86 % dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya tersebut meliputi biaya pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan & pemanfaatan limbah B3, biaya penyusutan perijinan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan lainnya. [SEOJK F4]

In 2022, the environmental costs incurred by the company amounted to Rp. 9.05 billion or an increase of 31.86% compared to the previous year. These include the cost of water pollution control, air pollution control, management & utilization of hazardous waste, the cost of preparing environmental licenses, and other environmental maintenance. [SEOJK F4]

Gambar 10. 3 Pengungkapan Dimensi Lingkungan Rantai Pasokan Berkelanjutan

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur, 2022

Dimensi sosial rantai pasokan meliputi antara lain standar upah, usia karyawan, penggunaan tenaga kerja anak, kerja paksa, penyalahgunaan pekerja rumahan, keselamatan kerja, dan ke higienisan kondisi kerja (Atik & Kovacevic, 2020). Pengungkapan rantai pasokan dampak sosial dari standar GRI, dapat menggunakan GRI 403 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan GRI 414 yaitu Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial dan Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Contoh pengungkapan sebagai berikut :

Hubungan Dengan Pemasok Dan Para Mitra Kerja [414-1]

Mengingat pemasok dan mitra kerja, baik yang termasuk dalam rantai pasok maupun tidak, merupakan salah satu kelompok pemangku kepentingan yang juga berperan besar bagi keberhasilan Perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan menjalankan tugas penyediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi, Pupuk Kaltim berkomitmen penuh untuk mewujudkan interaksi positif timbal balik dengan para pemasok dan mitra kerja.

Relationships With Suppliers And Partners [414-1]

Considering that suppliers and business partners, whether included in the supply chain or not, are one of the stakeholder groups that also play a major role in the success of the Company in developing its business and carrying out the task of supplying and distributing subsidized fertilizers, Pupuk Kaltim is fully committed to realizing positive reciprocal interactions. with suppliers and partners.

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR • LAPORAN KEBERLANJUTAN 2022 SUSTAINABILITY REPORT

Gambar 10. 4 Pengungkapan Dimensi Sosial Rantai Pasokan Berkelanjutan

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur, 2022

Pelaporan rantai pasokan berkelanjutan memberikan informasi yang lebih transparan bagi para pemangku kepentingan, sehingga konsep keberlanjutan dapat terus dipertahankan menuju model *sustainable business*.

E. Kesimpulan

Akuntansi rantai pasokan berkelanjutan merupakan bagian dari akuntansi manajemen yang pengembangannya didasari pada berbagai pendekatan, teknik atau *tools* dari akuntansi manajemen. Pelaporan dan pengungkapan rantai pasokan berkelanjutan melalui laporan keberlanjutan meliputi tiga aspek yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan perusahaan dalam pengelolaan rantai pasokan dengan dimensi keberlanjutan. Pada berbagai tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian (*eco-control*), baik bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahi, P., Searcy, C., (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. *J Clean Prod* 52, 329–341. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.018>
- Atik, A., Kovacevic, I., (2020). Implications of sustainable supply chain management literature to management accounting. *eurasian journal of business and management* 8, 205–219. <https://doi.org/10.15604/ejbm.2020.08.03.004>
- Beske, P., Seuring, S., (2014). Putting sustainability into supply chain management. *Supply Chain Management* 19, 322–331. <https://doi.org/10.1108/SCM-12-2013-0432>
- Burritt, R., Schaltegger, S., (2014). Accounting towards sustainability in production and supply chains. *British Accounting Review* 46, 327–343. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.001>
- Dobroszek, J., Biernacki, M., Macuda, M., (2020). W kierunku umiędzynarodowienia / Towards internationalization Management accounting in logistics and supply chain management: evidence from Poland. Nr 106. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.9003>
- Min, H., Kim, I., (2012). Green supply chain research: Past, present, and future. *Logistics Research*. <https://doi.org/10.1007/s12159-012-0071-3>
- Moneva, J.M., Archel, P., Correa, C., (2006). GRI and the camouflaging of corporate unsustainability. *Accounting Forum* 30, 121–137. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.02.001>
- Ramos, M.M., (2004). Interaction between management accounting and supply chain management. *Supply Chain Management*. <https://doi.org/10.1108/13598540410527033>

- Seuring, S., Müller, M., (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *J Clean Prod* 16, 1699–1710. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020>
- Velayutham, A., Rahman, A.R., Narayan, A., Wang, M., (2021). Pandemic turned into pandemonium: the effect on supply chains and the role of accounting information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 34, 1404–1415. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4800>

TENTANG PENULIS

Dr. Hj. Musvianti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA., CSP.

Universitas Mulawarman



Penulis lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada tahun 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Mulawarman. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Mulawarman dan S3 di Universitas Hasanuddin. Ilmu akuntansi keberlanjutan semakin ditekuni sejak mengikuti PPL CSRS dan CRSA yang diselenggarakan oleh NCSR dan ICSP pada tahun 2020. Motivasi sebagai pembelajar sejati menjadikan semangat dalam berkarya sebagai bagian dari *long life learning* untuk keberlanjutan. Karya yang sudah diterbitkan dapat diakses pada *google scholar* penulis.

BAB 11

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Deviana Sari, S.E., M.S.Ak., CSRS.
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung

A. Pendahuluan

Perusahaan kini mengalami tekanan dari konsumen, karyawan, aktivis, pengadilan dan pemegang saham untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Pertanggungjawaban terhadap lingkungan telah mengalami kemajuan selama dekade terakhir seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap isu *climate change* secara global. Transisi menuju perekonomian berkelanjutan dan memenuhi target, hal tersebut memerlukan penggunaan data, pengukuran, perencanaan keuangan dan pelaporan yang transparan secara luas. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), biaya dan risiko lingkungan hidup, serta kemajuan dan dampak keberlanjutan, semuanya perlu diperhitungkan. Terdapat sejumlah kerangka kerja, inisiatif dan organisasi berbeda di seluruh dunia yang telah menetapkan tolak ukur pelaporan keberlanjutan dan penilaian risiko lingkungan dalam bisnis.

Akuntan perlu memahami dan memasukkan kerangka pelaporan lingkungan dan standar ini ke dalam praktik akuntansi bisnis, termasuk dalam konteks entitas pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan. Sementara akuntan juga memiliki peran penting dalam audit, pengukuran dan pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hak itu dapat dilacak dari kemampuan akuntan untuk memastikan bahwa pelaporannya

akurat, seragam, transparan dan mempertimbangkan risiko lingkungan secara penuh. Akuntan profesional mempunyai posisi unik untuk melakukan hal ini karena beberapa hal, sebagai berikut:

1. Keahlian akuntansi sangat cocok dengan fungsi audit, pengukuran, akuntansi lingkungan, mengembangkan proyeksi keuangan, menulis laporan CSR dan melakukan analisis resiko.
2. Akuntan sudah terikat kode etik untuk melaporkan secara akurat dan jujur demo kepentingan terbaik masyarakat.
3. Akuntan mempunyai tanggung jawab sahamnya untuk melakukan penilaian dan pengungkapan secara akurat atas seluruh risiko dan biaya, termasuk faktor lingkungan.

Federasi Akuntan Internasional (IFAC) menyatakan, bahwa seorang akuntan profesional harus memiliki tanggung jawab penting dan peluang transformatif untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan terutama laporan keberlanjutan.

B. Konsep Etika dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Akuntansi Keberlanjutan

Etika dan tanggung jawab merupakan dua konsep yang saling terkait dan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks individu, bisnis, dan masyarakat. Etika mencakup seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur berperilaku manusia. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam berbagai situasi. Etika menuntut individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan standar moral tertentu. Etika memegang peranan penting dalam konteks bisnis internasional karena lingkungan bisnis tersebut seringkali memiliki perbedaan signifikan dengan lingkungan bisnis dalam negeri. Standar etika yang tinggi diperlukan agar dapat menjaga hubungan yang positif dengan berbagai pihak, termasuk mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan, dan investor (Tambunan *et al.*, 2022).

Dalam konteks ini, etika dapat mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok. Tanggung jawab mencakup kesadaran akan dampak dari tindakan atau keputusan seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar. Tanggung jawab juga melibatkan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Dalam banyak kasus, tanggung jawab dapat terkait dengan etika, sehingga individu atau organisasi memiliki kewajiban moral tertentu terhadap orang lain atau masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, etika bisnis merupakan cara untuk menjalankan kegiatan bisnis secara adil dalam semua aspek yang terkait dengan perusahaan, individu, industri, dan masyarakat. Selain itu, etika bisnis juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mengatur standar moral pelaku bisnis, khususnya dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi (Wartoyo, 2018). Dengan demikian, implementasi etika bisnis bisa menjamin kelangsungan kegiatan bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memberikan peluang bersaing di kancah internasional (Asril, 2019).

1. Etika Akuntan dalam Akuntansi Keberlanjutan

Etika akuntan dalam konteks akuntansi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan dengan integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban terhadap dampak sosial dan lingkungan. Akuntansi keberlanjutan atau juga dikenal sebagai akuntansi berkelanjutan, sering kali berkaitan dengan pelaporan keuangan yang mencakup aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi.

Etika akuntan yang relevan dalam konteks akuntansi keberlanjutan harus memiliki prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kepatuhan terhadap standar profesional, transparansi, pertanggungjawaban sosial dan

lingkungan, pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan. Akuntan harus tetap jujur dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya, termasuk tidak boleh memanipulasi data atau informasi untuk keuntungan pribadi atau organisasi. Akuntan juga harus menjaga objektivitasnya dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan laporan yang adil serta akurat mengenai kinerja berkelanjutan. Selain itu, akuntan juga harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya terkait akuntansi berkelanjutan.

Hal ini untuk memastikan bahwa akuntan dapat menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Akuntan juga harus mematuhi standar profesi akuntansi dan pelaporan yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan standar pelaporan berkelanjutan yang diterima secara internasional. Akuntan juga harus mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan berkelanjutan. Informasi yang disajikan harus jelas dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam konteks akuntansi berkelanjutan, para akuntan harus memahami dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi, agar bisa mempertimbangkan aspek-aspek dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Terakhir, para akuntan harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk para investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum.

2. Tanggung Jawab Akuntan dalam Akuntansi Berkelanjutan

Dalam praktik akuntansi berkelanjutan, para akuntan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan mencerminkan dengan akurat dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan organisasi. Akuntan memiliki peran krusial dalam membawa dimensi berkelanjutan ke dalam arena bisnis melalui praktik akuntansi berkelanjutan. Tanggung jawab utama akuntan adalah tidak hanya

merekam dan melaporkan data keuangan, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari operasi organisasi. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, akuntan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Hal itu melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek keberlanjutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelolaan emisi karbon, efisiensi sumber daya, hak asasi manusia, dan praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Tanggung jawab akuntan juga mencakup pemastian bahwa laporan keberlanjutan disusun dengan integritas dan objektivitas. Dengan demikian para akuntan harus memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum. Dalam melaksanakan peran ini juga diperlukan integritas yang menggambarkan dampak positif dan negatif dari kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik bisnis organisasi sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Para akuntan perlu membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait keberlanjutan, termasuk risiko reputasi, hukum, dan operasional. Dalam upaya ini, para akuntan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tanggung jawab akuntan dalam akuntansi keberlanjutan juga melibatkan pendekatan proaktif untuk terus memperbarui pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam praktik keberlanjutan dan standar pelaporan. Hal ini memungkinkan para akuntan untuk tetap relevan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan memahami dan memenuhi tanggung jawab ini, para akuntan berperan sebagai agen perubahan

yang membantu organisasi untuk bertransisi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam menanggapi tantangan global terkait keberlanjutan, akuntan tidak hanya menjadi pencatat angka, tetapi juga menjadi pionir dalam membentuk masa depan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berdampak positif.

C. Etika dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Sustainability Report

Akuntansi keberlanjutan berpatokan pada konsep *triple bottom line* (TBL), yakni sinergi antara tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiga elemen tersebut yang dikenal juga dengan nama 3P (*profit, people, planet*) merupakan kunci utama dalam konsep *sustainability*. Suatu bisnis dapat dikatakan keberlanjutan apabila segala aktivitas dan proses produksinya turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga lingkungan, dapat memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu langkah taktis tersebut yaitu memperkuat *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan komitmen berkesinambungan perusahaan untuk berperilaku dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dari komunitas lokal dan masyarakat luas. Penting bagi akuntan untuk bisa memahami dan mempraktikkan etika dan tanggung jawab dalam menyusun *Sustainability Report*. Dalam konteks ini *sustainability report* merupakan dokumen yang memberikan gambaran holistik tentang kinerja suatu organisasi dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Seorang akuntan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa *sustainability report* sebuah perusahaan harus mencerminkan kinerja organisasi dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi secara akurat. Dalam menyusun laporan keberlanjutan, seorang akuntan perlu menerapkan prinsip-prinsip etika yang melibatkan integritas, objektivitas, dan kejujuran. Akuntan juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan informasi yang

disajikan dalam laporan tersebut bisa dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Pentingnya etika dalam konteks *sustainability report* mencakup ketepatan pengukuran kinerja keberlanjutan, pengungkapan informasi yang relevan, dan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Akuntan juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dampak keuangan, lingkungan, dan sosial dari keputusan bisnis serta menyajikannya dengan cara yang transparan. Tanggung jawab akuntan juga mencakup penerapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan yang berlaku. Hal ini mencakup memahami *framework* seperti *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, atau standar lain yang relevan. Dengan mengikuti pedoman ini, akuntan dapat memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, tetapi juga memenuhi standar industri yang berlaku.

Lebih dari sekadar menyusun laporan, akuntan berperan sebagai konsultan internal yang dapat memberikan wawasan keuangan dan non-keuangan kepada manajemen. Dengan demikian akuntan dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan risiko terkait keberlanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam konteks keberlanjutan para akuntan harus bisa memastikan bahwa laporan tersebut tidak hanya mencerminkan pencapaian saat ini, tetapi juga memberikan arah untuk perbaikan dan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab secara konsisten, para akuntan bisa membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan dampak positif perusahaan terhadap dunia.

D. Kesimpulan

Peran etika dan tanggung jawab akuntan dalam akuntansi keberlanjutan memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas, transparansi, dan dampak positif perusahaan dalam lingkungan, sosial dan ekonomi. Kehadiran etika bisnis bisa menjadi dasar untuk, memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan adalah akurat, dan memberikan pemangku kepentingan gambaran yang jelas tentang komitmen perusahaan terhadap konsep keberlanjutan. Tanggung jawab para akuntan juga tidak hanya sebatas mencatat dan melaporkan data, tetapi juga merangkum nilai-nilai keberlanjutan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan risiko yang muncul dari praktik bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dan standar pelaporan keberlanjutan yang berlaku, para akuntan bisa membantu menciptakan laporan keberlanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan arahan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan di masa depan. Pentingnya etika dan tanggung jawab akuntan dalam akuntansi keberlanjutan juga tercermin dalam upaya memelihara hubungan positif dengan pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan, dan investor. Pada akhirnya para akuntan bisa menjadi pemandu perusahaan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang, dan merangkul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian para akuntan bisa menjadi katalisator perubahan positif dalam mewujudkan visi misi bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, J. (2019). Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance dalam Menciptakan Perusahaan Berbasis Nilai. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(2), 215-224.
- Tambunan, B. A. Y., Sitanggang, E., & Sintia, I. (2022). The Importance of Applying Ethics in Business. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(1), 11-18.
- Wartoyo, W. (2018). Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 229-244.

TENTANG PENULIS

Deviana Sari, S.E., M.S.Ak., CSRS.

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung



Penulis lahir di Kurungan Nyawa tanggal 18 Maret 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung. Menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Lampung pada Jurusan Magister Sains Akuntansi. Penulis menekuni Pengajaran dan penelitian di Bidang Akuntansi Forensik, Sustainable Auditing, Akuntansi Keuangan dan *Green Accounting*. Karya yang sudah diterbitkan adalah Buku Ajar yang berjudul Analisa Laporan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Parktikum Akuntansi.

BAB 12

AKUNTANSI HIJAU DAN PRAKTIK KEBERLANJUTAN

Amir Hamzah, S.E., M.Si.
Universitas Kuningan

A. Akuntansi Hijau

1. Definisi Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah konsep yang berkembang dalam bidang akuntansi yang bertujuan memperhitungkan dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis suatu entitas secara lebih komprehensif (Ahmad *et al.*, 2023). Definisi akuntansi hijau mencakup aspek-aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan.

- a. Akuntansi hijau mengakui bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam tempat operasinya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan finansialnya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- b. Akuntansi hijau menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini melibatkan pencatatan dan analisis terhadap penggunaan energi, air, bahan baku, dan pengelolaan limbah untuk meminimalkan jejak lingkungan perusahaan.

- c. Akuntansi hijau melibatkan pelaporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel. Perusahaan perlu melaporkan informasi yang relevan mengenai praktek-praktek keberlanjutan, pencapaian tujuan lingkungan, serta dampak sosial yang dihasilkan.
- d. Akuntansi hijau mendorong perubahan perilaku dan budaya di dalam perusahaan menuju praktek-praktek yang lebih ramah lingkungan. Hal ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keberlanjutan, serta melibatkan proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Utama Akuntansi Hijau

Prinsip-prinsip utama akuntansi hijau mencerminkan panduan dan pedoman yang digunakan untuk mengarahkan praktik akuntansi yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan (Soesanto, 2022). Berikut adalah beberapa prinsip utama akuntansi hijau di antaranya:

a. Prinsip keterpaduan lingkungan dan ekonomi

Prinsip ini mengakui bahwa aktivitas ekonomi harus dipertimbangkan dalam konteks lingkungan alam tempat operasinya. Akuntansi hijau menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi menjadi satu kesatuan.

b. Prinsip efisiensi sumber daya

Prinsip ini menekankan perlunya penggunaan sumber daya secara efisien dalam aktivitas bisnis. Akuntansi hijau menyoroti pentingnya mengurangi konsumsi sumber daya alam, seperti energi, air, dan bahan baku, serta mengoptimalkan penggunaannya agar mencapai hasil maksimal dengan jejak lingkungan yang minimal.

c. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Prinsip ini menekankan pentingnya pelaporan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel tentang praktik-praktik keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Akuntansi hijau mendorong perusahaan untuk secara terbuka menyajikan informasi mengenai dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

d. Prinsip siklus hidup produk

Prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk memperhitungkan siklus hidup produk secara menyeluruh, dari tahap produksi hingga pembuangan akhir (*end-of-life*). Akuntansi hijau mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari seluruh tahap siklus hidup produk, termasuk pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan.

e. Prinsip pembayaran dan pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan biaya internal dan eksternal dari aktivitas bisnisnya. Akuntansi hijau mendorong perusahaan untuk memperhitungkan biaya lingkungan dan sosial, seperti biaya remediasi lingkungan atau biaya kesehatan masyarakat akibat polusi, sebagai bagian dari pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam praktik akuntansi, sehingga dapat menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan pemegang saham. Prinsip-prinsip ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko lingkungan serta sosial yang mungkin dihadapi.

3. Perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi hijau

Perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi hijau mencerminkan perbedaan dalam fokus, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan (Sardjono *et al.*, 2023) Berikut adalah beberapa perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi hijau di antaranya:

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Hijau
Fokus dan Tujuan	Pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan, pengambilan keputusan manajemen, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.	Memperhitungkan dan melaporkan informasi non-keuangan terkait dengan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnis. Mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan	Metode pencatatan dan pelaporan yang berfokus pada aspek keuangan seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban.	Pendekatan holistik yang mencakup pencatatan informasi keuangan dan non-keuangan seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan kegiatan sosial

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Hijau
		tanggung jawab perusahaan (CSR).
Pengukuran Kinerja	Berfokus pada indikator keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi penggunaan modal.	Meliputi aspek keuangan, lingkungan, dan sosial. Mengukur dampak lingkungan seperti jejak karbon atau penggunaan air, serta kontribusi terhadap komunitas dan masyarakat.

4. Tujuan Akuntansi Hijau dalam Konteks Keberlanjutan

Tujuan akuntansi hijau dalam konteks keberlanjutan adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi (Lako, 2019). Berikut adalah beberapa tujuan utama akuntansi hijau dalam konteks keberlanjutan di antaranya:

a. Peningkatan keseimbangan lingkungan

Salah satu tujuan utama akuntansi hijau adalah mengurangi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap lingkungan alam. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Dengan demikian, akuntansi hijau bertujuan untuk membantu mempertahankan keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.

b. Promosi praktek bisnis yang bertanggung jawab

Akuntansi hijau bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini termasuk memperhatikan hak asasi manusia, memperkuat kondisi kerja yang adil, serta mendukung pembangunan masyarakat lokal saat perusahaan beroperasi.

c. Peningkatan efisiensi operasional

Dengan memperhitungkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis, akuntansi hijau bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hal ini dapat mencakup penggunaan energi yang lebih efisien, pengurangan limbah produksi, dan pengoptimalan penggunaan sumber daya alam. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mengurangi biaya operasional perusahaan.

d. Meningkatkan reputasi perusahaan

Perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan dan memiliki pelaporan keberlanjutan yang transparan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dihadapan konsumen, investor, dan masyarakat secara umum. Tujuan akuntansi hijau adalah memperkuat reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan.

e. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar

Akuntansi hijau bertujuan untuk membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat dan mengikuti standar keberlanjutan yang berkembang. Dengan memperhitungkan dan melaporkan informasi lingkungan secara akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan.

Melalui pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan, akuntansi hijau bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan alam.

B. Praktik Keberlanjutan dalam Akuntansi

1. Pengelolaan limbah dan Emisi

a. Pencatatan limbah dan emisi

Pencatatan limbah dan emisi melibatkan proses dokumentasi dan pelacakan jumlah limbah yang dihasilkan dan emisi yang dilepaskan oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan operasional bisnis (Lako & Andreas, 2018). Langkah-langkah utama dalam pencatatan limbah dan emisi di antaranya:

1) Identifikasi sumber

Perusahaan harus mengidentifikasi sumber-sumber limbah dan emisi dari setiap aktivitasnya, termasuk produksi, transportasi, dan pemrosesan bahan mentah.

2) Pengukuran kuantitatif

Setelah sumber limbah dan emisi teridentifikasi, perusahaan harus secara teratur mengukur dan mencatat jumlahnya. Pengukuran bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat sensor dan alat pengukuran yang sesuai untuk mengumpulkan data yang akurat.

3) Kategorisasi

Limbah dan emisi biasanya dikategorikan berdasarkan jenisnya, seperti limbah padat, limbah cair, emisi gas, dan lain-lain. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang jenis limbah dan emisi yang dihasilkan.

4) Pelaporan

Informasi yang terkumpul kemudian dijadikan dasar untuk menyusun laporan yang menyajikan jumlah limbah dan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan transparan untuk memenuhi standar pelaporan keberlanjutan.

b. Pengukuran dampak lingkungan

Pengukuran dampak lingkungan merupakan tahap penting dalam pengelolaan limbah dan emisi. Hal ini melibatkan evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh limbah dan emisi terhadap lingkungan, baik secara lokal maupun global (Kusumawati *et al.*, 2023; Sarvasti *et al.*, 2023). Langkah-langkah dalam pengukuran dampak lingkungan meliputi:

1) Analisis efek lingkungan

Perusahaan harus melakukan analisis terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan emisi yang dihasilkan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kualitas udara, air, dan tanah di sekitar lokasi perusahaan.

2) Pemantauan terus-menerus

Proses pengukuran dampak lingkungan tidak berhenti pada satu titik waktu, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus. Perusahaan perlu memantau perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis sebagai akibat dari aktivitas operasional bisnis.

3) Penilaian risiko

Berdasarkan hasil pengukuran, perusahaan harus melakukan penilaian terhadap risiko-risiko lingkungan yang mungkin timbul. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area-area sehingga tindakan perbaikan atau mitigasi diperlukan.

4) Kepatuhan terhadap regulasi

Perusahaan harus memastikan bahwa limbah dan emisi yang dihasilkan mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi-regulasi ini adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Dengan melakukan pencatatan limbah dan emisi secara sistematis serta mengukur dampak lingkungan yang dihasilkan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan bertanggung jawab dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga membantu perusahaan dalam membangun citra positif sebagai entitas yang peduli terhadap lingkungan dalam mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien

a. Pengelolaan Energi

1) Audit energi

Langkah awal dalam pengelolaan energi adalah melakukan audit energi untuk mengidentifikasi konsumsi energi yang ada dan menentukan area-area agar terjadi efisiensi energi. Audit ini bisa mencakup penggunaan listrik, gas, bahan bakar, dan sumber energi lainnya.

2) Penerapan teknologi hemat energi

Perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi hemat energi seperti pencahayaan LED, sistem pemanas dan pendingin yang efisien, dan mesin-mesin dengan efisiensi tinggi. Penggunaan teknologi ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi secara signifikan.

3) Pemantauan dan pengukuran energi

Penting untuk memiliki sistem pemantauan dan pengukuran energi yang efektif untuk melacak dan menganalisis konsumsi energi secara berkala. Data

yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, menganalisis pola konsumsi, dan mengidentifikasi potensi area perbaikan.

4) Pelatihan karyawan

Melakukan pelatihan kepada karyawan tentang praktik penggunaan energi yang efisien sangat penting. Karyawan harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menghemat energi, cara-cara untuk mengurangi konsumsi energi, dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung tujuan efisiensi energi perusahaan.

b. Penggunaan Bahan Baku Secara Bertanggung Jawab

1) Penggunaan bahan baku yang berkelanjutan

Perusahaan harus memprioritaskan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini termasuk memilih bahan baku yang dapat didaur ulang, bahan baku organik, atau bahan baku yang diproduksi dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan.

2) Optimasi penggunaan bahan baku

Proses produksi harus dirancang sedemikian rupa untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Hal ini bisa mencakup penggunaan teknologi yang meminimalkan limbah dan penggunaan bahan baku yang efisien.

3) Manajemen persediaan yang efisien

Manajemen persediaan yang efisien sangat penting dalam mengurangi pemborosan bahan baku. Perusahaan harus memantau persediaan dengan cermat, memperkirakan kebutuhan dengan akurat, dan menghindari pembelian berlebihan yang tidak perlu.

4) Kerjasama dengan pemasok berkelanjutan

Perusahaan harus bekerja sama dengan pemasok yang memiliki praktik pengelolaan bahan baku yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa rantai pasokan perusahaan juga mendukung tujuan keberlanjutan dalam penggunaan bahan baku.

Dengan mengelola energi dengan efisien dan menggunakan bahan baku secara bertanggung jawab, perusahaan dapat mengurangi jejak lingkungan, menghemat biaya operasional, dan memperkuat komitmen bisnis terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan (Imansari *et al.*, 2019; Nordman, 2023). Hal ini merupakan bagian penting dari upaya perusahaan untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan.

3. Pelaporan Keberlanjutan

a. Standar Pelaporan Keberlanjutan

1) *Global Reporting Initiative (GRI)*

GRI adalah salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling umum digunakan di dunia. GRI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu perusahaan.

2) *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

SASB mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang terfokus pada sektor-sektor industri tertentu. Standar SASB membantu perusahaan dalam mengidentifikasi materi-materi yang relevan untuk keberlanjutan dan memberikan panduan tentang cara melaporkannya.

3) ISO 26000

ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan panduan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan cara melaporkannya. Standar ini menyoroti prinsip-prinsip keberlanjutan yang penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan stakeholder.

4) *Integrated Reporting* (IR)

IR adalah pendekatan yang menyatukan laporan keuangan dan non-keuangan menjadi satu laporan terintegrasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja perusahaan dari segi keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

b. Indikator Kinerja Lingkungan

1) Jejak karbon

Jejak karbon mengukur jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan dalam aktivitas operasional bisnis. Hal ini mencakup emisi dari pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan listrik, transportasi, dan proses produksi.

2) Penggunaan energi terbarukan

Indikator ini mencatat persentase energi yang diperoleh dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, atau biomassa. Penggunaan energi terbarukan adalah salah satu ukuran kinerja lingkungan yang penting dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

3) Pengelolaan limbah

Indikator ini melacak jumlah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dan upaya-upaya untuk mengurangi, mendaur ulang, atau mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan.

4) Konservasi sumber daya alam

Indikator ini mencakup upaya-upaya untuk konservasi sumber daya alam seperti air, tanah, dan flora atau fauna. Hal ini bisa mencakup pengurangan penggunaan air, pelestarian habitat alami, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Pelaporan keberlanjutan yang berbasis pada standar dan indikator kinerja lingkungan membantu perusahaan untuk mengukur, melacak, dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional bisnis (Ashari et al., 2020; Marina *et al.*, 2017). Hal ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area-area yang akan diperbaiki agar menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

C. Implikasi Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis

1. Manfaat Akuntansi Hijau Bagi Perusahaan

a. Peningkatan efisiensi operasional.

Akuntansi hijau membantu perusahaan mengidentifikasi area-area terkait efisiensi operasional yang dapat ditingkatkan, termasuk pengelolaan sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan energi yang lebih efisien.

b. Pengurangan biaya operasional.

Dengan mengurangi konsumsi sumber daya dan mengoptimalkan proses produksi, perusahaan dapat menghemat biaya operasional jangka panjang.

c. Reputasi dan citra perusahaan yang lebih baik.

Praktik bisnis yang berkelanjutan dan transparan dalam mengelola dampak lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dihadapan konsumen, investor, dan publik.

d. Kepatuhan regulasi yang lebih baik.

Dengan menerapkan akuntansi hijau, perusahaan dapat lebih mudah mematuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang semakin ketat.

e. Inovasi produk dan layanan.

Fokus pada keberlanjutan melalui akuntansi hijau juga dapat mendorong inovasi produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Menerapkan Akuntansi Hijau

a. Kesulitan pengukuran.

Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan dari aktivitas bisnis secara akurat. Proses pengukuran ini sering kali kompleks dan memerlukan sumber daya yang signifikan.

b. Biaya implementasi.

Implementasi sistem akuntansi hijau dapat memerlukan investasi awal yang substansial dalam teknologi, pelatihan, dan infrastruktur. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya.

c. Perubahan budaya organisasi.

Menerapkan akuntansi hijau membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi dan perilaku karyawan. Menyadarkan karyawan tentang pentingnya keberlanjutan dan mengubah praktik kerja yang sudah mapan bisa menjadi proses yang lambat dan menantang.

d. Kompleksitas regulasi.

Regulasi lingkungan yang beragam dan kompleks dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dalam memahami persyaratan yang berlaku dan memastikan kepatuhan penuh.

e. Keterbatasan data dan informasi.

Terkadang, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaporkan kinerja lingkungan dengan akurat. Keterbatasan dalam sistem informasi dan akses terhadap data juga dapat menjadi hambatan.

Dengan mengenali tantangan ini, perusahaan dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan akuntansi hijau dan memaksimalkan manfaatnya bagi keberlanjutan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Hartanto, S., Harkat, A., Kurniawan, A., & Mimi, H. A. (2023). Merapah Akuntansi Hijau Dalam Harmoni Pemikiran Perintis (Ala "Prilly Latuconsina") dan Industri Pusaka Lingkungan Jember menuju Green City. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(3), 299-309.
- Kusumawati, N.P.A., Pramuki, N.M.W.A. and Pratiwi, N.P.T.W. (2023). Filosofi Tri Hita Karana Dalam Mengungkap Konsep Akuntansi Hijau (Studi Fenomenologi)', *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), pp. 150-162. Available at: <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.150-162>.
- Lako & Andreas. (2018). Transfromasi Menuju Akuntansi Hijau, pp. 52-54.
- Lako, A. (2019). Rerangka Konseptual Akuntansi Hijau. *Akuntan Indonesia*, May, 62-71', (May).
- Marina, A., Wahjono, S.I. and Desipradani, G. (2017). Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis: Implementasi Green Accounting untuk Merespon Kebutuhan Pasar', *Jurnal Balance*, 14(1), pp. 19-28.
- Muhammad Hasyim Ashari, Umi Muawanah and Oyong Lisa. (2020). Pengaruh Ukuran Organisasi Dan Pemahaman manajemen Tentang Akuntansi Hijau terhadap penerapan Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) Padarumah Sakit Umum Di Malangraya. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, pp. 60-71.
- Nordman, E.E. (2023). Green economy, *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, pp. 249-250. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.G.22>.
- Rizkaninghadi Imansari, A. and Widya Prihatiningtias, Y. (2019). Akuntansi Hijau dan Industri Perhotelan: Sebuah Keniscayaan, *Jurnal Economia*, Vol. 15(No. 2), pp. 189-208. Available at:

<https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>.

- Sardjono, S., Yoga, T.P. and Agustillah, A.N. (2023). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web. *SisInfo : Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, 3(2), pp. 99-134. Available at: <https://doi.org/10.37278/sisinfo.v3i2.637>.
- Sarvasti, L. D., & Yuliati, A. (2023,). Analisis Peran Kunci Akuntan Dalam Mendukung Akuntansi Hijau (Studi Kasus KJA Wahyu. H. C). In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call For Paper* (Vol. 3, No. 01, pp. 30-37).
- Soesanto, S. (2022). Akuntansi Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau Perspektif Relasi Natural Sustainability Dengan Keberlanjutan Bisnis, *Account*, 9 (1), pp. 1581-1589. <https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4580>.

TENTANG PENULIS

Amir Hamzah, S.E., M.Si.

Universitas Kuningan



Penulis lahir di Kuningan, 10 Juli 1991 dari Orang tua, Bapak W. Mahdi (Alm) dan Ibu Rokana sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI Cokroaminoto Kabupaten Kuningan (lulus tahun 2003), melanjutkan ke MTS Negeri Kadugede Kabupaten Kuningan (lulus tahun 2006), SMK Negeri 2 Kuningan (lulus tahun 2009), S1 Akuntansi Universitas Kuningan (lulus tahun 2014) dan S2 Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman (lulus tahun 2016). Penulis pernah bekerja di Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan, Operator Sempik Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan dan Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan (2016 s.d sekarang). Penulis juga aktif dalam tridarma perguruan tinggi mulai dari pengajaran, pengabdian dan penelitian. Penulis juga aktif menulis beberapa judul modul dan buku seperti Modul Praktikum Akuntansi Keuangan I, Modul Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif, Buku Chapter Konsep dan Implementasi Akuntansi Comprehensive, Buku Chapter Pengenalan Dasar-Dasar Akuntansi dalam Berbagai Bidang, Buku Chapter Perbankan Syariah Indonesia, Buku Chapter Metodologi Penelitian & Analisis Data *Comprehensive*, dan Buku Saku UMKM dan Buku Kreatif Akuntansi UMKM: Sukses Tanpa Rumit.

BAB 13 | PENGELOLAAN RISIKO BERKELANJUTAN

Sofyan Anshori S.E., Ak., CA., M.M.
Universitas Mercu Buana

A. Pendahuluan

Pengelolaan risiko adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi, proyek, atau aktivitas. Pengelolaan risiko adalah bagian penting dari manajemen yang efektif dan merupakan praktek yang kritis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengelolaan risiko:

1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau kegiatan organisasi. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang ancaman potensial, kesempatan, dan masalah yang mungkin muncul.
2. Penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko-risiko ini untuk memahami dampak dan probabilitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis data historis, mengumpulkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, atau menggunakan metode analisis risiko seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) atau analisis kuantitatif.

3. Prioritas risiko. Setelah risiko dinilai, prioritas harus ditentukan. Hal ini melibatkan identifikasi risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas tinggi untuk diberikan perhatian lebih lanjut. Risiko-risiko ini disebut sebagai “risiko tinggi” dan harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko.
4. Perencanaan mitigasi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti perubahan proses bisnis, asuransi, diversifikasi portofolio, pengendalian kualitas, atau penggunaan kontrak.
5. Implementasi tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi yang direncanakan harus diimplementasikan dengan hati-hati. Tim atau individu yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk mengurangi risiko.
6. Pemantauan dan pengendalian risiko. Risiko perlu terus dipantau dan dievaluasi seiring waktu. Hal ini termasuk mengidentifikasi perubahan dalam risiko, mengukur efektivitas tindakan mitigasi yang telah diambil, dan melakukan perubahan yang diperlukan.
7. Komunikasi risiko. Komunikasi yang efektif tentang risiko adalah kunci untuk pengelolaan risiko yang baik. Informasi tentang risiko harus disampaikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen eksekutif, tim proyek, dan pihak eksternal bila diperlukan.
8. Perencanaan kontinuitas bisnis. Organisasi harus memiliki rencana kontinuitas bisnis yang merinci tindakan yang harus diambil dalam menghadapi risiko besar yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur kunci, atau masalah lain yang dapat mengganggu operasi normal.
9. Pengelolaan risiko adalah proses yang berkelanjutan, dan organisasi harus selalu siap untuk menyesuaikan strategi seiring perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko yang mungkin muncul. Pengelolaan risiko yang efektif dapat

membantu organisasi menghindari kerugian yang tidak perlu, menjaga stabilitas, dan mencapai tujuan dengan lebih baik.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola sebuah bisnis, dengan pengelolaan risiko yang baik maka sebuah lembaga bisnis dapat terhindar dari kerugian ataupun kebangkrutan. Risiko yang ditimbulkan perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko merugikan nama perusahaan. Terhindar dari resiko yang merugikan merupakan tujuan hampir semua orang, baik itu kerugian harta milik pribadi maupun kerugian atas milik lembaga usaha. Banyak yang tidak menyadari pentingnya manajemen atau pengelolaan resiko bagi sebuah lembaga usaha, padahal ada banyak manfaat yang menguntungkan dan memudahkan proses manajemen lembaga usaha. Dengan catatan bila pihak pengelola sudah mampu melakukan identifikasi dan pengendalian dari risiko-risiko yang mungkin dialami oleh sebuah lembaga usaha. Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dikarenakan manajemen risiko merupakan proses pengukuran untuk mengembangkan strategi pengelolaannya. Sebagai contoh risiko dipindahkan kepada pihak lain, sehingga mengurangi efek negatif dari risiko lain-lain.

Sementara perusahaan keluarga sulit untuk menentukan strategi mengendalikan perusahaan di masa depan karena sulit untuk memilih siapa yang akan memimpin perusahaan. Pilihannya pada anggota keluarga yang profesional tetapi masih berusia muda atau yang sudah cukup dewasa tetapi amatir. Manajemen resiko sendiri merupakan upaya pencegahan terhadap terjadinya kerugian (*accident*) agar tidak terjadi efek dominonya, sehingga dapat terus dilakukan perbaikan berkelanjutan dan dijadikan acuan untuk proses pengambilan resiko.

Guna mendukung pelaksanaan manajemen resiko yang efektif dan efisien, perusahaan perlu menyusun kebijakan manajemen risiko. Pedoman manajemen risiko dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko dengan tujuan sebagai berikut (Anonim, 2017):

1. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
2. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
3. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, dengan cara menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan.
4. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
5. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

Manajemen risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat memberikan benefit bagi perusahaan (Daud, 2011) yaitu:

1. Membantu pencapaian tujuan perusahaan
2. Mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada *stakeholders*, sehingga meningkatkan kualitas dan nilai perusahaan
3. Mencapai hasil yang lebih baik berupa efisiensi dan efektivitas pelayanan, seperti meningkatkan pelayanan kepada publik atau meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih baik.

4. Memberikan dasar penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap elemen kunci risiko
5. Menghindari biaya-biaya yang mengejutkan karena perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang tidak diperlukan, termasuk menghindari biaya dan waktu yang dihabiskan dalam suatu perkara
6. Menghindari pemborosan dan membuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
7. Mencapai pengambilan keputusan yang terbuka dan berdasarkan proses manajemen
8. Meningkatkan akuntabilitas dan *corporate governance*.
9. Mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka, dan toleransi terhadap kesalahan tetapi tidak terhadap *hiding errors*. Perubahan pandangan ini memungkinkan perusahaan belajar dari kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya
10. Perusahaan akan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat meminimalkan “gangguan-gangguan” yang tidak dikehendaki.

Diketahui ada beberapa proses penting dalam manajemen risiko dapat memberi manfaat sebesar mungkin bagi sebuah lembaga usaha. Bagian pertama dari pengelolaan resiko adalah melakukan identifikasi atas resiko-resiko yang mungkin dialami suatu lembaga usaha. Selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan lembaga usaha pada saat tersebut terkait dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dari hasil evaluasi ditemukan strategi dan metode mengendalikan resiko serta sistem pengawasan resiko untuk menghindarkan lembaga usaha mengalami resiko-resiko. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan dan kemampuan analisis yang baik bagi siapapun untuk melakukan identifikasi resiko hingga membuat sistem pengawasan dan strategi pengendalian resiko yang mungkin dialami sebuah lembaga usaha. Pengalaman juga akan berguna bagi siapapun yang harus menjalani proses analisis resiko dan merancang sistem pengawasan serta

menyusun strategi pengendalian resiko (Anonim, 2017).

Salah satu cara untuk memiliki keterampilan dan kemampuan identifikasi. Selanjutnya evaluasi dan menyusun sistem pengawasan resiko adalah dengan mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko dan pengendalian resiko. Oleh sebab itu dibutuhkan dasar ilmu dan juga ketrampilan untuk dapat menjalani proses identifikasi hingga seorang pengelola lembaga usaha mampu melakukan pengendalian risiko dan memanfaatkannya keuntungan lembaga usaha. Suatu strategi manajemen lembaga usaha yang baik pasti meliputi penerapan sistem pengawasan resiko dan strategi pengendaliannya. Tanpa dua elemen tersebut, maka kerugian dapat terjadi akibat terlambatnya merespon kondisi beresiko yang gagal diidentifikasi dan dikelola, sehingga berdampak seminimal mungkin bagi lembaga usaha.

Sebagai contoh, implementasi Risk Management di PT *Surya Siam Keramik (SCG Group)* yaitu selalu diadakan *training risk management* setiap tahun. Selain itu, juga digelar pelatihan mengenai *Quality Managemen System*. Dengan begitu, ketika akan menganalisis resiko di dalam perusahaan, maka yang paling utama yaitu mengetahui tujuan perusahaan yang dipaparkan di *Quality Management System*. Selanjutnya bila sudah mengetahui tujuan, visi misi perusahaan barulah analisis resikonya.

Dalam menganalisis resiko diketahui ada resiko internal yaitu resiko yang terjadi di departemen, sedangkan resiko eksternal yang berhubungan dengan dunia luar seperti supplier. Sementara analisa resiko tersebut akan di audit setiap tahunnya oleh auditor internal, sehingga dapat dilihat perkembangan resiko apakah dapat menurun resikonya. Dengan begitu sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan mutu perusahaan. Oleh sebab itu akan dijelaskan dalam metode berikut:

1. Menghindari risiko.

Agar risiko tidak terjadi, perlu dihindari. Namun, apakah akan selamanya menghindari risiko tersebut? Contoh, risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Untuk menghindarinya, seseorang tinggal di dalam rumah sepanjang waktu. Sekalipun keluar rumah atau naik kendaraan, tentunya risiko kecelakaan di jalan raya akan dihindari, tetapi hidup bisa jadi menyedihkan.

2. Mengendalikan risiko.

Mengendalikan risiko yaitu mengendalikan kapan datangnya risiko, tetapi seseorang bisa mengendalikan dampak atau kerugian yang timbul ketika risiko terjadi. Sebagai contoh untuk mengendalikan risiko kecelakaan di jalan raya, secara rutin memeriksa kondisi mobil. Lalu memilih mobil yang memiliki fitur keamanan terbaik. Dengan kata lain ketika mengendarai mobil seseorang selalu dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

3. Menerima risiko

Bertolak belakang dengan dua cara di atas, seseorang juga bisa memutuskan untuk menerima risiko yang akan terjadi. Dengan catatan bahwa seseorang sudah siap memperhitungkan dan menanggung dampak atau kerugian. Perlu diingat juga bahwa untuk menerima risiko sebaiknya seseorang sudah menyadari bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan. Sebagai contoh, seseorang sengaja tidak menggunakan jam tangan yang mahal di kendaraan umum, karena angka kriminalitas di dalamnya sangat tinggi. Ketika suatu hari, jam tangan tersebut dijambret, seseorang sudah siap menerima risiko kehilangan barang tersebut, karena kerugiannya tidak signifikan.

4. Mengalihkan risiko

Cara yang paling bijaksana, bisa jadi adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut. Tentunya pengalihan risiko tersebut disertai syarat bahwa seseorang harus

membayarkan sejumlah dana terlebih dulu kepada pihak yang bersedia menanggung risiko tersebut. Melalui cara seperti ini, bisa dikatakan bahwa kita sudah membeli asuransi. Dengan memiliki asuransi, anda telah mengalihkan risiko yang mungkin terjadi kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, asuransi akan berjanji untuk melindungi seseorang dari sejumlah risiko yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pengelolaan Risiko

Salah satu unsur dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Manajemen perusahaan melakukan identifikasi serta perkiraan kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampaknya dan diikuti dengan penentuan tingkat risiko tersebut. Kemudian menelaah kecukupan pengendalian intern dalam mengurangi dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi serta menyusun rencana untuk meningkatkan pengendalian risiko yang dirasakan belum efektif. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan produk-produk alas kaki untuk melayani permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri, perseroan menghadapi risiko yang timbul baik dari internal maupun eksternal.

Risiko pasar untuk penjualan domestik lebih kepada melemahnya daya beli pasar. Karakteristik produk sepatu termasuk dalam kebutuhan tersier, dan menjadi urutan kesekian dalam setiap alokasi dana konsumen. Lemahnya harga beberapa komoditi ekspor yang berasal dari perkebunan dan pertambangan serta kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap pasar sepatu karena mengurangi daya beli pasar. Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh perseroan untuk dapat meningkatkan penjualan, antara untuk penjualan ekspor melalui negosiasi peninjauan harga secara berkala dengan

pihak pembeli, dan untuk pasar lokal antara lain melalui inovasi desain baru dan peningkatan efisiensi agar dapat menekan biaya produksi.

2. Risiko rantai pasokan (*Supply Chain Risk*)

Rantai pasokan adalah serangkaian aktivitas sejak dari bahan baku dan komponen produksi lainnya sampai menjadi produk akhir yang diserahkan ke konsumen. Ketika satu tahapan dari rantai pasokan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka seluruh rantai pasokan akan terganggu, yang pada akhirnya akan berakibat pada menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya, dan merusak reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen. Secara umum, risiko rantai pasokan terbagi dua jenis:

- a. Risiko rantai pasokan eksternal, antara lain:
 - 1) Risiko permintaan, yang disebabkan oleh kesalahan memperkirakan selera dan permintaan pasar;
 - 2) Risiko pasokan, yang disebabkan oleh adanya gangguan terhadap aliran produk di dalam rantai pasokan;
 - 3) Risiko lingkungan, yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, pemerintahan dan iklim;
 - 4) Risiko bisnis, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kestabilan kondisi keuangan pemasok, penjualan atau pembelian perusahaan *supplier* dan sebagainya.
 - 5) Risiko fisik pabrik, yang disebabkan antara lain oleh kondisi fasilitas pabrik *supplier*, dan tingkat kepatuhan *supplier* kepada peraturan.
- b. Risiko rantai pasokan internal, antara lain:
 - 1) Risiko produksi, yang disebabkan oleh gangguan pada proses produksi;
 - 2) Risiko bisnis, yang disebabkan oleh perubahan personal inti, manajemen, struktur laporan, dan proses bisnis.

- 3) Risiko perencanaan dan pengawasan, yang disebabkan oleh perencanaan dan pengawasan yang tidak memadai karena tidak efektifnya fungsi manajemen.

Pengelolaan risiko-risiko tersebut bisa dilakukan dengan melakukan antisipasi atas risiko-risiko yang mungkin terjadi, meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko serta merencanakan penanganan yang harus dilakukan apabila risiko yang tidak dikehendaki tersebut terjadi. Dengan pengelolaan risiko yang baik, kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

3. Perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen risiko

Pada kehidupan sehari-hari, setiap individu diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Apakah aktifitas yang dilakukan pada hari tersebut sudah sesuai dengan rencana? Apakah ada peningkatan kinerja dari hari sebelumnya? Bagaimana merencanakan kegiatan di esok harinya supaya lebih baik dari hari ini.

4. Perbaikan yang Berkelanjutan?

Perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus menerus, konstan, dan reguler dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi; menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Harapannya dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan meraih keunggulan bersaing.

Perbaikan yang berkelanjutan dikembangkan oleh salah satu ahli manajemen mutu, Edward Deming, sekitar tahun 1950. Konsep tersebut diperkenalkan bersamaan dengan *Total Quality Management*. Secara historis, perbaikan yang berkelanjutan dilaksanakan oleh perusahaan sekitar abad ke-18, sehingga para pimpinan melakukan perbaikan

terhadap pekerja (*employee-driven improvements*) dan program insentif, sehingga mampu merubah organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya pada awal abad ke-19, muncul revolusi industri yang menekankan pada sains manajemen. Pengembangan berbagai metode dilakukan untuk membantu para manajer menganalisis dan mengatasi permasalahan, khususnya di bidang produksi dengan pendekatan saintifik. Ketika perang dunia II, Amerika Serikat meluncurkan program "*Training within industry*" untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah perbaikan berkelanjutan. Program tersebut kemudian diperkenalkan oleh Deming, Juran, dan Gilbreth di Jepang, dan berkembang lebih luas. *Kaizen* merupakan terminologi perbaikan berkesinambungan yang terkenal di Jepang

5. Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen risiko

Prinsip dalam SNI ISO31000 adalah perbaikan berkelanjutan. Menurut ISO 31000, manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Lebih lanjut disampaikan dalam dokumen tersebut bahwa "organisasi sebaiknya secara sinambung meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta strategi proses manajemen risiko diintegrasikan". Perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip yang meningkatkan efektivitas kerja manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten adalah suatu siklus berkesinambungan dengan menerapkan metode PDCA (*Plan Do Check Action*). Setiap proses dievaluasi bila sudah sesuai dengan tujuan organisasi?. Perbaikan dilakukan terhadap hal-hal kritis yang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini dilakukan secara periodik dan konsisten.

Perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan pada 3 tingkatan yang berbeda yaitu manajemen, grup dan individu. Pada tingkatan manajemen, implikasi perbaikan pada strategi organisasi. Level kelompok mencakup pekerjaan

penyelesaian permasalahan pada skala yang lebih luas. Sementara pada level individu, perbaikan berupa pekerjaan rutin sehari-hari. Setiap pimpinan perlu mengevaluasi organisasinya dengan membuat program monitoring dan evaluasi. Berbagai teknik perbaikan (*problem-solving tools*) banyak dikembangkan seperti *six sigma*, *lean manufacturing*, *work process*, penyederhanaan pekerjaan, dan monitoring kinerja.

Apabila perbaikan dilakukan secara berkesinambungan, maka ciri-cirinya antara lain: (1) setiap individu menunjukkan kesadaran dan pemahaman terhadap visi, misi dan tujuan organisasi; (2) para karyawan menggunakan tujuan strategis organisasi untuk fokus memprioritaskan aktifitas perbaikan, (3) pekerjaan berbasis *team work* dikembangkan; (4) penilaian risiko yang terus menerus terhadap organisasi; (5) setiap level manajemen berkomitmen aktif untuk melakukan perbaikan secara kontinue; (6) Karyawan belajar dari pengalaman dirinya sendiri dan orang lain, baik yang positif maupun negatif; (7) pembelajaran individu maupun kelompok dikembangkan.

Perbaikan ini bisa menjadi budaya dalam organisasi, sehingga pengambilan keputusan lebih efisien dan efektif. Akhir kata, perbaikan sebaiknya dilakukan dari hal-hal yang kecil secara bertahap, dimulai dari setiap individu yang dilakukan konsisten. Ada pepatah mengatakan "*Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini*". Itulah perbaikan yang berkesinambungan. Organisasi berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya, sehingga mampu meraih keunggulan bersaing.

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa

tingkat lebih baik, sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko merupakan kata yang sering didengar setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, sehingga bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut.

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni yaitu risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, dan risiko spekulatif yaitu risiko yang diharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis yang muncul dari perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, yang dapat memunculkan jenis-jenis risiko baru dan risiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut, sehingga bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Bila organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa

mengalami kerugian. Oleh karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Diketahui ada beberapa definisi dari manajemen risiko organisasi atau perusahaan pada umumnya, diantaranya:

- a. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.
- b. *Enterprise risk management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- c. *Enterprise risk management* (ERM) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam *setting* strategi. Selanjutnya hal itu mencakup organisasi secara keseluruhan, sehingga bisa didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Sementara menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen

risiko, dan penerapan kerangka kerja Pengembangan budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi.

Struktur manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk terdiri atas Unit Pemilik Risiko yang (UPR) merupakan unit pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit, unit kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari perumusan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan monitoring dan evaluasi sistem manajemen risiko.

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko di Kementerian Keuangan diterapkan secara periodik selama 1 (satu) tahun dan terdiri atas tahapan yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review. Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.

Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Identifikasi risiko bertujuan

untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, besaran/level risiko residual, harapan, keputusan mitigasi risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga besaran dan atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, menyusun rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Pemantauan dan review bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dan review risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan proses manajemen

Tujuan dari manajemen risiko intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Di lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen risiko juga telah didukung dengan perangkat aturan yang sesuai dengan standar manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan selalu memperhatikan situasi terkini dan ketidakpastian di masa mendatang, selain juga dari sasaran organisasi yang telah ada, sehingga identifikasi risiko dalam organisasi dapat lebih beragam dan lebih banyak kategori risiko. Hal ini dapat turut

berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sejak dini dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko tersebut sebelum membesar.

Pengelolaan risiko adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi, proyek, atau aktivitas. Pengelolaan risiko adalah bagian penting dari manajemen yang efektif dan merupakan praktek yang kritis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengelolaan risiko:

a. Identifikasi risiko.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau kegiatan organisasi. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang ancaman potensial, kesempatan, dan masalah yang mungkin muncul.

b. Penilaian risiko.

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko-risiko ini untuk memahami dampak dan probabilitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis data historis, mengumpulkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, atau menggunakan metode analisis risiko seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) atau analisis kuantitatif.

c. Prioritasi risiko.

Setelah risiko dinilai, prioritas harus ditentukan. Hal ini melibatkan identifikasi risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas tinggi untuk diberikan perhatian lebih lanjut. Risiko-risiko ini disebut sebagai "risiko tinggi" dan harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko.

d. Perencanaan mitigasi.

Langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti perubahan proses bisnis, asuransi, diversifikasi portofolio, pengendalian kualitas, atau penggunaan kontrak.

e. Implementasi tindakan mitigasi.

Tindakan mitigasi yang direncanakan harus diimplementasikan dengan hati-hati. Tim atau individu yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk mengurangi risiko.

f. Pemantauan dan pengendalian risiko.

Risiko perlu terus dipantau dan dievaluasi seiring waktu. Hal itu termasuk mengidentifikasi perubahan dalam risiko, mengukur efektivitas tindakan mitigasi yang telah diambil, dan melakukan perubahan yang diperlukan.

g. Komunikasi risiko.

Komunikasi yang efektif tentang risiko adalah kunci untuk pengelolaan risiko yang baik. Informasi tentang risiko harus disampaikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen eksekutif, tim proyek, dan pihak eksternal jika diperlukan.

h. Perencanaan lontanuitas bisnis.

Organisasi harus memiliki rencana kontinuitas bisnis yang merinci tindakan yang harus diambil dalam menghadapi risiko besar yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur kunci, atau masalah lain yang dapat mengganggu operasi normal.

Pengelolaan risiko adalah proses yang berkelanjutan, dan organisasi harus selalu siap untuk menyesuaikan strategi bisnis seiring perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko yang mungkin muncul. Pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu organisasi menghindari kerugian yang tidak perlu, menjaga stabilitas, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik.

Pengertian risiko keuangan risiko keuangan (*financial risk*) adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal (termasuk pasar modal dan bank) untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti *leverage* neraca, transaksi *off-balance sheet*, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran utang, likuiditas, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan berisiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri yang dihasilkan secara internal. Tujuan manajemen risiko keuangan bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas dan equitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Meskipun fokus terhadap volatilitas harga atau tingkat, akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya seperti risiko likuiditas.

Selain itu ada risiko kredit yang merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen resiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Risiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai.

6. Manajemen risiko, tujuan, kategori, dan mitigasi

a. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Adapun tujuan dari manajemen risiko di antaranya:

1) Melacak sumber-sumber risiko

Poin pertama tujuan manajemen risiko adalah melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam tercapainya tujuan organisasi. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas organisasi, mulai dari proses pelayanan hingga pengelolaan aset.

2) Menyediakan informasi risiko bagi organisasi

Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan.

3) Meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko

Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain.

4) Memberikan rasa aman bagi *stakeholder*

Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar *stakeholder* merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. *Stakeholder* di sini bukan sebatas satuan kerja saja, tetapi juga pegawai, rekanan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

5) Menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi

Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar organisasi bisa berkembang dengan stabil sesuai target kerjanya. Dengan adanya proses manajemen risiko, organisasi bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam tujuan organisasi.

B. Kategori risiko

Di dalam manajemen risiko di Kementerian Keuangan, kategori risiko dibagi menjadi tujuh kategori. Adapun kategori risiko dari yang paling tinggi ke yang paling rendah sesuai KMK 577/KMK.01/2019 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Keuangan Negara dan Kekayaan Negara

Berkaitan kondisi fiskal pemerintah pusat meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.

2. Kebijakan

Berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.

3. Reputasi

Berkaitan dengan persepsi negatif atau menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.

4. *Fraud*

Berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa

uang, barang dan harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih.

5. Legal

Berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum dan upaya hukum lain kepada organisasi atau jabatan.

6. Kepatuhan

Berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.

7. Operasional

Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

Kategori risiko ini juga mempengaruhi level dampak risiko. Kategori risiko juga menggambarkan tingkat kepentingan, semakin tinggi tingkat kategori risiko semakin tinggi pula tingkat kepentingan, semakin besar dampaknya terhadap organisasi.

C. Mitigasi Risiko

Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama.

Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko
Mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.
2. Mengurangi dampak risiko
Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan.
3. Membagi (*sharing*) risiko
Mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi atau entitas lain seperti melalui asuransi, *outsourcing* atau *hedging*.
4. Menghindari risiko
Mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko.
5. Menerima risiko
Tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2017).

<http://www.geg.ptpn12.com/index.php/manajemen-risiko-2/tujuan-dan-sasaran-manajemen-risiko>. Diakses tanggal 16 Mei 2017

Daud, M. (2011).

<http://mukhtardaud.blogspot.co.id/2011/08/manfaat-manajemen-risiko.html> / Diakses tanggal 16 Mei 2017

TENTANG PENULIS

Sofyan Anshori S.E., Ak., CA., M.M.

Universitas Mercu Buana



Penulis lahir di Biak, 17 Nopember 1974. Penulis lulus Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2001, dilanjutkan dengan Pendidikan Program Magister Ilmu Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (UMB) diraih pada tahun 2011. Sejak tahun 2017 sampai sekarang penulis mengabdikan pada Kampus yang berada di Kota Jakarta yaitu Universitas Mercu Buana dan Universitas Terbuka. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, penulis berharap besar semoga buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Manajemen.

BAB 14

PENGARUH REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Anita Wijayanti, S.E., M.M., Akt., CA.
Universitas Islam Batik Surakarta

A. Pendahuluan

Pentingnya akuntansi keberlanjutan semakin menjadi sorotan di tengah tuntutan masyarakat dan tekanan global terkait isu-isu krusial seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kebutuhan akan transparansi bisnis. Dalam menghadapi era di mana kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial suatu perusahaan semakin tumbuh, akuntansi keberlanjutan muncul sebagai landasan kritis untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan di luar aspek finansial. Dalam konteks perubahan iklim yang mendesak, perusahaan tidak lagi bisa hanya terpaku pada pencapaian keuntungan finansial semata (Kumajas *et al.*, 2022). Sementara, tuntutan masa kini mengharuskan perusahaan untuk menjadi agen perubahan, aktif berkontribusi pada kesejahteraan sosial, dan melindungi lingkungan. Paradigma baru ini memandang keberlanjutan bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai elemen integral dari strategi bisnis. Perubahan iklim, sebagai ancaman nyata, memerlukan respons serius dari seluruh sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis (Kumajas *et al.*, 2022).

Di sinilah peran penting akuntansi keberlanjutan, yang membantu perusahaan mengukur dan melacak dampaknya terhadap lingkungan. Mulai dari pencatatan emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, hingga langkah-langkah

mitigasi, semua elemen tersebut perlu diukur dan dilaporkan. Lebih dari sekadar tanggapan terhadap risiko, perusahaan dapat menggunakan akuntansi keberlanjutan sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru yang muncul dari perubahan iklim, seperti inovasi teknologi hijau, pengembangan produk berkelanjutan, dan praktik bisnis ramah lingkungan. Dalam konteks bisnis kontemporer, transparansi menjadi elemen kunci bagi masyarakat yang menginginkan informasi yang lebih terperinci mengenai praktik bisnis dan dampaknya. Akuntansi keberlanjutan menjadi alat yang memungkinkan perusahaan untuk membuka diri, menyajikan informasi secara jelas mengenai inisiatif keberlanjutan, risiko terkait, dan capaian yang telah dicapai. Di era informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, transparansi bukan hanya keinginan, melainkan suatu kebutuhan.

Laporan keberlanjutan bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi alat untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang mampu membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui data dan fakta yang transparan akan memiliki keunggulan kompetitif dalam memenangkan dukungan konsumen. Dalam konteks internal perusahaan, akuntansi keberlanjutan dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan ketenagakerjaan yang adil melalui indikator seperti rasio gaji, diversitas di tempat kerja, dan program pelatihan inklusif. Selain itu, akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan melihat dampak sosialnya di luar batas internal. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), investasi dalam komunitas lokal, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial menjadi bagian yang dapat diukur dan dinilai melalui laporan keberlanjutan. Inovasi ini tidak hanya berkontribusi secara finansial, melainkan juga mencerminkan pemahaman terhadap dampak jangka panjang yang dapat diberikan perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Evolusi akuntansi keberlanjutan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan dalam dunia bisnis modern. Paradigma keberlanjutan yang semakin mendalam menuntut perusahaan untuk lebih dari sekadar pematuhan regulasi atau respons terhadap tuntutan masyarakat. Perusahaan harus menjadi agen perubahan yang proaktif, terlibat dalam pembentukan dunia yang lebih berkelanjutan (Garvey, 2021). Akuntansi keberlanjutan menjadi ujung tombak dalam menyediakan alat dan informasi yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutannya. Dengan memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi dengan aspek-aspek keberlanjutan, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang komprehensif dan relevan (Breliastiti & Ririn, 2020).

Langkah pertama dalam evolusi ini adalah menggeser pandangan terhadap keberlanjutan dari aspek yang sekadar opsional menjadi sesuatu yang terintegrasi dalam semua level operasional dan strategi bisnis (Garvey, *et al*, 2021). Hal ini bukan lagi tentang membagi bisnis menjadi sisi finansial dan non-finansial, melainkan tentang menyatukan kedua aspek tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan perusahaan (Breliastiti & Ririn, 2020). Evolusi ini juga melibatkan pengembangan standar dan pedoman yang lebih jelas dalam hal akuntansi keberlanjutan. Meskipun ada beberapa inisiatif dan standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menciptakan konsistensi dan komparabilitas di antara laporan keberlanjutan (Dienes *et al.*, 2016).

Evolusi akuntansi keberlanjutan tidak dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memandu transformasi ini melalui regulasi yang mendukung dan mendorong praktik keberlanjutan. Dukungan finansial atau pemotongan pajak bagi perusahaan yang mencapai target keberlanjutan, serta sanksi bagi yang kurang berkomitmen, dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong perubahan. Pemerintah juga dapat berperan dalam

mengembangkan regulasi yang memberikan arah yang jelas dan konsisten dalam hal akuntansi keberlanjutan. Standar yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dapat memberikan pedoman yang lebih kuat dan dapat diandalkan bagi perusahaan, memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang dihasilkan memiliki kualitas yang diakui secara universal (Rudyanto & Astrid, 2021).

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan praktik keberlanjutannya dengan kerangka regulasi yang ada, sambil tetap memenuhi tuntutan masyarakat dan berkontribusi pada pembentukan dunia yang lebih berkelanjutan.

B. Peran Kritis Pemerintah dalam Mendorong Pengungkapan Akuntansi Keberlanjutan

Pada era modern yang dipenuhi dengan tantangan lingkungan dan sosial, akuntansi keberlanjutan telah menjadi pusat perhatian sebagai alat utama untuk mengukur dan melaporkan dampak organisasi terhadap aspek-aspek non-keuangan. Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak dapat diabaikan dan dianggap sebagai elemen kritis dalam mendorong pengungkapan akuntansi keberlanjutan (Kumajas *et al.*, 2022). Pengaturan dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki potensi besar untuk membentuk perilaku perusahaan, mendorong adopsi praktik berkelanjutan, dan menggerakkan roda perubahan menuju bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Pemerintah, sebagai regulator utama, memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung dan mendorong pengungkapan akuntansi keberlanjutan. Dalam hal ini, regulasi yang jelas dan tegas membantu membentuk landasan bagi perusahaan dalam memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan (Kumajas *et al.*, 2022). Persyaratan pelaporan yang konsisten dan komprehensif yang diatur oleh pemerintah menciptakan standar yang

seragam, memungkinkan perbandingan antar perusahaan, dan mendorong transparansi.

Pentingnya peran kritis pemerintah ini juga tercermin dalam dukungannya terhadap kebijakan publik yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, pemerintah telah memperkenalkan insentif fiskal atau stimulus ekonomi bagi perusahaan yang aktif mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasional. Hal ini tidak hanya memberikan dorongan finansial bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan tetapi juga menciptakan lingkungan yang praktik bisnis bertanggung jawab dihargai dan didorong.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran di kalangan perusahaan terkait manfaat dan implikasi dari pengungkapan akuntansi keberlanjutan. Menggalakkan kesadaran ini dapat menciptakan perubahan budaya di kalangan bisnis, dengan perusahaan-perusahaan mulai melihat keberlanjutan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dalam hal ini, dampak pemerintah tidak hanya terbatas pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga mencakup peran sebagai pemimpin moral (Garvey *et al.*, 2021). Dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan, pemerintah dapat menginspirasi sektor swasta dan masyarakat untuk mengikuti jejak mereka. Kepemimpinan pemerintah dalam menerapkan praktik keberlanjutan di dalam lembaga sendiri tidak hanya menciptakan contoh terbaik, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan otoritas pemerintah dalam mendorong perubahan di tingkat perusahaan.

Namun, sementara peran pemerintah dalam mendorong pengungkapan akuntansi keberlanjutan sangat penting, tantangan juga muncul. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dapat dijalankan oleh perusahaan tanpa memberikan beban biaya yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya

menjadi krusial dalam merancang regulasi yang seimbang dan efektif. (Kumajas *et al.*, 2022). Dalam konteks global, kolaborasi antar pemerintah juga menjadi esensial (Tiwari & Khan, 2020). Kerja sama internasional dalam merancang regulasi dan standar akuntansi keberlanjutan dapat menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dan dapat diukur, memberikan kepastian kepada perusahaan multinasional, serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian dan kebingungan di pasar global (Kumajas *et al.*, 2022).

Dengan demikian, peran kritis pemerintah dalam mendorong pengungkapan akuntansi keberlanjutan menciptakan dasar yang kuat untuk perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui regulasi yang bijaksana, dukungan kebijakan publik, dan kepemimpinan moral, pemerintah dapat menjadi katalisator utama dalam mengarahkan dunia bisnis menuju masa depan yang lebih berkelanjutan (Melida, 2023).

C. Regulasi dan kebijakan Public sebagai Pendorong Implementasi Akuntansi Keberlanjutan

Regulasi dan kebijakan publik memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong implementasi akuntansi keberlanjutan di era modern (Malida, 2023). Dalam konteks globalisasi dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial, praktik bisnis yang berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak pihak, termasuk perusahaan, regulator, investor, dan masyarakat secara umum. Di tengah tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, regulasi menjadi alat yang sangat efektif untuk mempercepat adopsi akuntansi keberlanjutan.

Peran utama regulasi dan kebijakan publik adalah mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka (Afolabi, 2022). Dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat dalam pelaporan keberlanjutan, perusahaan cenderung mengadopsi praktik

bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan lebih efisien, dan memperhatikan hak asasi manusia dalam rantai pasokan. Tanpa regulasi dan kebijakan publik yang sesuai, perusahaan mungkin cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Regulasi dan kebijakan publik juga meningkatkan tingkat akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, investor, dan pihak terkait lainnya (Kumajas *et al.*, 2022). Dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara teratur, regulasi menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari kegiatannya. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk memperhatikan praktik bisnis dan memastikan bahwa telah mematuhi standar etika dan keberlanjutan yang tinggi (Afolabi *et al.*, 2022). Dengan demikian, regulasi dan kebijakan publik menciptakan transparansi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di antara pemangku kepentingan.

Regulasi dan kebijakan publik keberlanjutan memiliki dampak yang luas, baik bagi perusahaan maupun masyarakat secara umum. Salah satu dampak positif adalah peningkatan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan sosial di kalangan perusahaan (Aliyu *et al.*, 2020). Dengan adanya persyaratan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara teratur, perusahaan menjadi lebih sadar akan dampak dari kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar (Afolabi, 2022). Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan publik juga dapat mendorong inovasi dalam praktik bisnis dan teknologi yang lebih berkelanjutan (Aliyu *et al.*, 2020). Ketika perusahaan dihadapkan pada persyaratan regulasi yang ketat, seringkali terdorong untuk mencari solusi inovatif untuk mengurangi

dampak lingkungan dan sosial dari operasi bisnis. Hal ini dapat meliputi investasi dalam teknologi hijau, pengembangan produk yang ramah lingkungan, dan perubahan dalam proses produksi untuk mengurangi limbah dan emisi (Afolabi *et al.*, 2022). Seiring waktu, inovasi ini dapat membantu menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, regulasi dan kebijakan publik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat, investor, dan pihak terkait lainnya. Dengan mematuhi regulasi keberlanjutan dan melaporkan kinerja mereka secara terbuka, perusahaan dapat membangun reputasi sebagai pemimpin dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Dengan demikian, regulasi tersebut memiliki dampak positif yang signifikan dalam memperkuat reputasi dan citra merek Perusahaan

D. Masa Depan Akuntansi Keberlanjutan di bawah Dampak Regulasi dan Kebijakan Publik

Salah satu dampak utama dari regulasi dan kebijakan publik yang lebih ketat adalah peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan (Afolabi *et al.*, 2022). Perusahaan akan diharuskan untuk memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnisnya. Hal ini berarti bahwa akuntansi keberlanjutan akan berkembang menjadi lebih rinci dan terperinci, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia (Aliyu *et al.*, 2020). Namun, sementara transparansi meningkat, tantangan baru muncul dalam hal pengukuran dan penilaian dampak keberlanjutan. Memiliki standar yang konsisten dan dapat diukur menjadi kunci dalam menghasilkan informasi yang berguna dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan publik juga akan

memainkan peran penting dalam menetapkan standar akuntansi keberlanjutan yang diterima secara luas.

Selain itu, regulasi dan kebijakan publik juga dapat mempengaruhi insentif bagi perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Afolabi *et al.*, 2022). Sebagai contoh, melalui insentif pajak atau subsidi untuk praktik-praktik yang ramah lingkungan atau melalui sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan. Namun, sementara regulasi dan kebijakan publik dapat memberikan kerangka kerja yang penting bagi perkembangan akuntansi keberlanjutan, ada juga risiko bahwa regulasi yang berlebihan atau tidak sesuai dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan seimbang dan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi.

Di samping itu, dengan berkembangnya teknologi dan analitik data, ada potensi besar untuk memperkuat akuntansi keberlanjutan melalui penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis big data. Regulasi dan kebijakan publik dapat memainkan peran dalam mendorong adopsi teknologi ini dengan memberikan insentif atau dukungan untuk investasi dalam sistem dan infrastruktur yang diperlukan (Aliyu *et al.*, 2020). Namun, ada juga risiko terkait dengan penggunaan teknologi dalam akuntansi keberlanjutan, termasuk masalah privasi data dan keamanan informasi. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan publik juga perlu memperhitungkan aspek-aspek ini dan memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan privasi.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat global tidak terbatas pada batas-batas negara atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kerja sama antarnegara dan kerangka kerja yang koordinat diperlukan. Regulasi dan kebijakan publik juga dapat memainkan peran dalam mendorong kerja sama internasional

dalam hal akuntansi keberlanjutan, termasuk mengadopsi standar yang seragam di seluruh dunia. Dalam menghadapi masa depan akuntansi keberlanjutan di bawah dampak regulasi dan kebijakan publik, penting untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang yang memperhitungkan kebutuhan perusahaan untuk berinovasi dan tumbuh, sambil tetap memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membutuhkan kerjasama antara regulator, pembuat kebijakan, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung perkembangan akuntansi keberlanjutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, masa depan akuntansi keberlanjutan dapat menjadi instrumen penting dalam upaya global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

E. Kesimpulan

Akuntansi keberlanjutan semakin menjadi fokus utama dalam dunia bisnis modern sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial. Perusahaan kini tidak hanya diharapkan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam kontribusi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. Evolusi akuntansi keberlanjutan tidak dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran utama dalam memandu transformasi ini melalui regulasi yang mendukung dan mendorong praktik keberlanjutan. Dukungan finansial atau pemotongan pajak bagi perusahaan yang mencapai target keberlanjutan, serta sanksi bagi yang kurang berkomitmen, dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong perubahan. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengembangkan regulasi yang memberikan arah yang jelas dan konsisten dalam hal akuntansi keberlanjutan. Standar yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dapat memberikan pedoman yang lebih kuat dan dapat diandalkan bagi perusahaan, memastikan bahwa

laporan keberlanjutan yang dihasilkan memiliki kualitas yang diakui secara universal.

Selain itu, peran pemerintah dalam mendorong praktik akuntansi keberlanjutan juga menjadi krusial. Melalui regulasi yang mendukung dan kebijakan publik yang sesuai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung transparansi dan pengungkapan informasi keberlanjutan. Namun, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung perkembangan akuntansi keberlanjutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hanya dengan kolaborasi yang kokoh, masa depan akuntansi keberlanjutan dapat menjadi instrumen penting dalam upaya global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil tetap memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, H., Ram, R., & Rimmel, G. (2022). Harmonization of sustainability reporting regulation: Analysis of a contested arena. *Sustainability*, 14(9), 5517.
- Aliyu, B., Abdulwahab, U. M., & Alabede, J. O. (2020). The Impact of Financial Reporting Regulations on Sustainability Accounting in Nigeria: Perception of users and Preparers. *Journal of Agripreneurship and Sustainable Development*, 3(1), 29-39.
- Breliastiti, R. (2020). Development of mandatory & voluntary instruments of sustainability reporting (SR) according to carrots & sticks 2006–2016. *The Indonesian Accounting Review*, 10(1), 71-81.
- Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154-189.
- Garvey, A. M., Parte, L., McNally, B., & Gonzalo-Angulo, J. A. (2021). True and fair override: Accounting expert opinions, explanations from behavioural theories, and discussions for sustainability accounting. *Sustainability*, 13(4), 1928.
- Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Kontradiksi Sustainable Finance: Sebuah Literatur Review. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).
- Melinda, M. (2023). Praktik Akuntansi Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Lintas Industri. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 10797-10807.
- Rudyanto, A. (2021). Is Mandatory Sustainability Report Still Beneficial?. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 2.
- Tiwari, K., & Khan, M. S. (2020). Sustainability accounting and reporting in the industry 4.0. *Journal of cleaner production*, 258, 120783.

TENTANG PENULIS

Anita Wijayanti, S.E., M.M., Akt., CA.

Universitas Islam Batik Surakarta



Penulis lahir di Solo tanggal 10 September 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis juga telah menyelesaikan pendidikan program Doctor of Philosophy pada bidang Management and Entrepreneurship di University Teknikal Malaysia Melaka. Penulis menekuni bidang Menulis sejak tahun 2009, beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain Mukzizar Zakat: Mengungkap Rahasia Dibalik Perintah Zakat, Tinjauan Syariat, Ekonomi dan Syariat (2009), Sistem Informasi Akuntansi: Pendekatan Pengembangan Pada UKM (2011) dan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (2013). Beberapa artikel juga telah diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional antara lain A Business Transformation Model To Enhance The Sustainability Of Small-Sized Family Businesses (2021) diterbitkan pada jurnal terindeks scopus, Jurnal Problems And Perspectives In Management.

BAB 15

TANTANGAN DAN PELUANG MASA DEPAN DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.

Institut Teknologi dan bisnis Widya gama lumajang

A. Pendahuluan

Dalam era ketidakpastian global dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu keberlanjutan, akuntansi keberlanjutan memainkan peran kritis dalam membimbing perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan bukan sekedar catatan angka dalam laporan keuangan, melainkan sebuah kanvas yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap planet ini, masyarakat, dan ekonomi global. Di dalamnya terkandung visi bisnis yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan.

Namun, di balik kejelasan visi tersebut, terdapat serangkaian tantangan yang perlu dihadapi. Lingkungan bisnis yang dinamis, ketidakpastian regulasi, dan ekspektasi yang semakin tinggi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi ujian bagi perusahaan dalam mengimplementasikan dan melaporkan praktik keberlanjutan bisnis. Dengan mengeksplorasi pendekatan inovatif dan penerapan teknologi terkini, perusahaan dapat menjadikan akuntansi keberlanjutan sebagai katalisator untuk pertumbuhan berkelanjutan. Peluang ini melibatkan transformasi bisnis ke arah yang lebih ramah lingkungan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai jangka panjang.

B. Tantangan dan Peluang Akuntansi Keberlanjutan

Ketahanan global menciptakan kondisi setiap manusia, alam, masyarakat, dan biosfer dapat eksis bersama secara seimbang, stabil, dan produktif untuk memberikan dukungan bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang (Sukaharsono & Andayani, 2021). Konsep pembangunan berkelanjutan adalah ide pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang memastikan pemenuhan kebutuhan di masa depan, tanpa merugikan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Akuntansi keberlanjutan meresapi setiap tahapan proses akuntansi, mulai dari pencatatan, pengukuran, pengakuan, hingga pengungkapan, akuntabilitas, dan transparansi (Sopannah et al., 2023). Dalam kerangka ini, fokus tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, melainkan juga melibatkan pemantauan terhadap peristiwa sosial dan lingkungan yang melingkupi transaksi ekonomi tersebut. Dalam konteks pelaporan akuntansi, pendekatan ini melibatkan penyajian informasi yang tidak hanya terbatas pada laporan tahunan atau laporan keuangan semata, melainkan juga mencakup laporan keberlanjutan. Laporan ini berfungsi sebagai bukti konkrit terkait dengan kinerja organisasi dalam aspek sosial dan lingkungan.

Laporan keberlanjutan merupakan suatu dokumen yang diterbitkan oleh entitas organisasi atau perusahaan yang merinci dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang timbul akibat kegiatan operasional sehari-hari (Adhariani, 2021). Dalam laporan keberlanjutan, disajikan nilai-nilai serta model tata kelola perusahaan, dan diberikan gambaran tentang keterkaitan antara komitmen dan strategi perusahaan terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Pelaporan ini berperan penting dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pihak eksternal, dan selain motivasi ekonomi, visi pembangunan berkelanjutan menekankan urgensi dari pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Di sisi lain, visi pembangunan berkelanjutan menuntut partisipasi aktif, terutama untuk pelaporan dan komunikasi mengenai isu-isu dan kegiatan yang relevan dengan keberlanjutan esensial. Proses partisipasi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya mekanisme komunikasi yang efektif. Kontribusi ini memberikan gambaran holistik mengenai tujuan utama dan manfaat dari pelaporan keberlanjutan perusahaan, serta evolusinya selama beberapa dekade terakhir, sambil menyajikan pandangan mengenai tantangan dan perkembangan terkini dalam domain ini.

Penting untuk dicatat bahwa penyusunan laporan keberlanjutan harus mematuhi standar pelaporan keberlanjutan yang berlaku agar memastikan konsistensi dan kredibilitasnya. Sejumlah standar pelaporan global yang telah diadopsi secara luas oleh pelaku bisnis dalam melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya melibatkan dua inisiatif utama (Aziza & Sukoharsono, 2021), yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standard Board* (SASB).

1. ***Global Reporting Initiative (GRI)***

GRI, didirikan pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat, menyusun suatu kerangka kerja laporan keberlanjutan pertama kali pada tahun 2000, dikenal sebagai GRI versi 1. Pada tahun 2002, GRI meluncurkan versi GRI G2, yang mengukuhkannya sebagai standar dari sebelumnya hanya pedoman. GRI secara berkala melakukan pembaruan, termasuk versi G3, G3.1, dan terakhir G4 pada tahun 2013. Pembaruan tersebut bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keberlanjutan dengan lebih akurat dan memastikan relevansi informasi kritis dalam organisasi terkait keberlanjutan. Versi terakhir, GRI G4, memperhatikan kemudahan implementasi oleh pembuat laporan keberlanjutan, baik yang baru pertama kali menyusun atau yang sudah berpengalaman.

2. *Sustainability Accounting Standard Board (SASB)*

SASB, didirikan pada tahun 2011, telah menyusun panduan pelaporan keberlanjutan sektor industri sejak tahun 2012. Pedoman SASB memiliki relevansi dan materialitas yang tinggi dengan menyertakan indikator kinerja spesifik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing industri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan laporan yang lebih seragam ketika dibandingkan antar sektor industri. Fokus utama penggunaan standar pelaporan SASB adalah memenuhi kebutuhan investor dengan memberikan pengungkapan laporan keberlanjutan yang material dan berkualitas tinggi. Pengutamakan terhadap kebutuhan investor disebabkan oleh keunikan kebutuhan yang berbeda dari *stakeholder* lain, sehingga laporan berdasarkan standar SASB lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan unik dari segmen ini.

Akuntansi keberlanjutan muncul sebagai evolusi dari disiplin akuntansi sosial dan lingkungan, yang fokus utamanya adalah pada *output* pelaporan, berupa kinerja non-keuangan suatu organisasi. Kinerja non-keuangan ini mencakup dampak langsung terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Adhariani, 2021). Dalam konsepnya, tiga metode utama dalam akuntansi keberlanjutan antara lain:

1. Biaya berkelanjutan

Metode ini menekankan pada biaya yang berkaitan dengan pengeluaran organisasi pada akhir periode akuntansi dengan tujuan mengembalikan kualitas lingkungan hidup ke posisi semula;

2. Akuntansi persediaan modal alam

Metode ini menunjukkan kepedulian khusus terhadap keberlanjutan modal alam sebagai unsur yang selalu ada dan harus dipertahankan;

3. Analisis input output

Metode ini melibatkan pelaporan produk dan barang sisa dalam unit yang dilihat dari aspek fisik pemanfaatan material dan energi.

Dalam penerapan praktik akuntansi keberlanjutan, organisasi dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk mengendalikan sumber daya ekonomi yang terbatas. Meskipun demikian, organisasi diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang akuntabel, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan serta sosial. Prinsip keberlanjutan dapat terwujud apabila setiap strategi, kebijakan, dan implementasi organisasi dijalankan dengan penuh komitmen oleh seluruh unsur atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Komitmen ini dapat berhasil tercapai ketika organisasi memiliki kesadaran tinggi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diemban. Kesadaran ini mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi.

Pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan hingga karyawan, dan masyarakat umumnya, harus turut serta dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan bukanlah hanya sebuah tujuan organisasi semata, melainkan suatu kewajiban moral yang melekat pada identitas dan budaya perusahaan. Dalam konteks ini, prinsip keberlanjutan menjadi pijakan moral dan etis dalam menjalankan operasionalnya. Akuntansi keberlanjutan berperan sebagai penghubung antara strategi perusahaan yang bersifat berkelanjutan dengan penyajian informasi mengenai tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial (Khafid & Mulyaningsih, 2015). Dalam prakteknya, mengumpulkan kebijakan yang mendukung, tujuan ekonomi, dan sosial secara simultan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan seringkali menjadi tugas yang kompleks. Kompleksitas ini mendorong organisasi untuk tidak hanya memfokuskan pada penciptaan nilai, tetapi juga pada upaya mitigasi risiko yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait, termasuk:

1. Isu-isu keberlanjutan yang secara material mempengaruhi penciptaan nilai, risiko, dan tanggung jawab organisasi;
2. Kebutuhan bisnis untuk merespons pertumbuhan secara berkelanjutan dengan tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Beberapa tantangan yang dihadapi akuntansi keberlanjutan antara lain:

1. Kurangnya konsistensi dan standarisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh akuntansi keberlanjutan saat ini adalah kurangnya konsistensi dan standarisasi dalam pengukuran serta pelaporan isu-isu ESG. Pembentukan standar global dapat memberikan kerangka kerja yang jelas, memastikan konsistensi interpretasi, dan memungkinkan perbandingan kinerja keberlanjutan antarperusahaan;

2. Ketidakpastian perubahan regulasi

Perubahan regulasi terkait keberlanjutan dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang mencoba mengintegrasikan praktik keberlanjutan. Keharusan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis ini membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan manajemen risiko yang tinggi;

3. Kompleksitas rantai pasokan global

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terinterkoneksi, perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam melacak dan mengelola dampak lingkungan dan sosial di seluruh rantai pasokan. Mengatasi kompleksitas ini memerlukan sistem akuntansi keberlanjutan yang dapat memberikan transparansi dan akurasi informasi

Selain manfaat yang ditawarkan oleh akuntansi berkelanjutan, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya menjadi lebih efektif dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan keberlanjutan.

Pertama, kurangnya konsistensi dan standarisasi dalam praktik

akuntansi berkelanjutan menjadi hambatan utama. Adanya perbedaan interpretasi dan penerapan standar membuat sulit untuk membandingkan kinerja berkelanjutan antar organisasi. Konsistensi dan standarisasi yang lebih baik dapat meningkatkan akurasi dan relevansi informasi yang dilaporkan (Rusdianti *et al.*, 2022).

Kedua, ketidakpastian perubahan regulasi merupakan tantangan serius dalam akuntansi berkelanjutan. Lingkungan regulasi yang dinamis dan perubahan kebijakan dapat memengaruhi cara perusahaan melaporkan dan mengelola keberlanjutan. Kekhawatiran akan adanya perubahan kebijakan yang signifikan dapat menghambat perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau dan mengantisipasi perubahan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berkembang.

Ketiga, kompleksitas rantai pasokan global juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam akuntansi berkelanjutan. Perusahaan seringkali memiliki rantai pasokan yang melibatkan berbagai pihak di seluruh dunia, sehingga sulit untuk melacak dan mengukur dampak keberlanjutan secara menyeluruh. Diperlukan upaya kolaboratif dan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk memastikan bahwa data yang relevan dapat diperoleh dan diintegrasikan dengan baik dalam pelaporan keberlanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, akuntansi berkelanjutan dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan informasi yang bermakna dan memainkan peran kunci dalam mendukung upaya keberlanjutan organisasi.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan transformasi yang signifikan dalam konteks bisnis, membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi dari praktik akuntansi keberlanjutan. Dalam era saat ini, era pasca COVID-19, tantangan baru muncul seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesadaran terhadap ketahanan dan tanggung jawab sosial. Pandemi telah mengekspos kerentanan dalam rantai pasokan

global dan meningkatkan urgensi untuk mengintegrasikan faktor-faktor keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan pandemi juga memberikan dorongan tambahan bagi organisasi untuk memperkuat praktik akuntansi keberlanjutan. Oleh karena itu, menghadapi tantangan baru yang timbul seiring dengan pandemi, praktik akuntansi keberlanjutan perlu mengadaptasi diri agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung upaya keberlanjutan organisasi di tengah dinamika perubahan pasca-COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis dan menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi oleh praktik akuntansi keberlanjutan. Di era pasca-COVID-19, beberapa tantangan muncul seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan fokus pada ketahanan dan tanggung jawab sosial (Wandira et al., 2023).

1. *Resilience reporting*

Pemulihan pasca COVID-19 menekankan perlunya melaporkan ketahanan perusahaan. Akuntansi keberlanjutan harus mampu menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat bertahan dan beradaptasi terhadap krisis serta strategi keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari strategi pemulihan;

2. Ketidakpastian ekonomi

Ketidakpastian ekonomi yang tinggi setelah pandemi meningkatkan tantangan dalam perencanaan keberlanjutan. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi, mengukur dampaknya, dan menyelaraskan strategi keberlanjutan dengan kondisi yang tidak pasti;

3. Pemulihan rantai pasokan

COVID-19 telah mengekspos kerentanan rantai pasokan global. Akuntansi keberlanjutan harus memperhitungkan peran perusahaan dalam membangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan berkelanjutan

untuk mengatasi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada rantai global;

4. Peran teknologi dalam akuntansi keberlanjutan

Pemanfaatan teknologi, seperti *remote sensing*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan, menjadi lebih penting untuk memonitor dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Akuntansi keberlanjutan perlu terus mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan;

5. Tanggung jawab sosial dan kesejahteraan karyawan

Pandemi meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Akuntansi keberlanjutan harus mencerminkan upaya perusahaan dalam memastikan kesejahteraan dan hak pekerja, serta kontribusinya terhadap masyarakat selama dan setelah pandemik;

6. Penguatan tren ESG

Tren lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semakin mendominasi dunia bisnis pasca-COVID-19. Perusahaan diharapkan untuk melibatkan diri lebih dalam dalam inisiatif keberlanjutan, dan akuntansi keberlanjutan harus dapat mencerminkan upaya konkret dan dampak positif yang dihasilkan;

7. Tekanan investor dan pemangku kepentingan

Investor dan pemangku kepentingan semakin memperhatikan keberlanjutan sebagai faktor penentu investasi. Akuntansi keberlanjutan perlu mengatasi ekspektasi dan tuntutan yang semakin meningkat dari pihak-pihak ini untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

Berbagai tantangan ini menegaskan pentingnya peran akuntansi keberlanjutan dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan dan membimbing perusahaan menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Pentingnya akuntabilitas dan pertanggung jawaban dalam praktik keberlanjutan semakin

meningkat, memerlukan perusahaan untuk menunjukkan bukti konkrit dari komitmennya, demi membangun sistem pelaporan yang kuat dan transparan agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas perusahaan. Melalui penanganan tantangan ini dengan pendekatan yang holistik, perusahaan atau organisasi dapat membentuk masa depan akuntansi keberlanjutan yang lebih dinamis, terintegrasi, dan memainkan peran sentral dalam mendorong keberlanjutan bisnis di era tahun 2024 dan seterusnya. Untuk mendukung akuntansi keberlanjutan, sejumlah strategi dan solusi dapat diimplementasikan guna memastikan bahwa praktik bisnis berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Beberapa strategi dan solusi tersebut antara lain:

1. Integrasi sistem akuntansi berkelanjutan

Menerapkan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan dimensi keberlanjutan, sehingga data terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicatat, diukur, dan dilaporkan secara efisien. Integrasi ini mendukung perusahaan untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara komprehensif;

2. Pelibatan pihak-pihak kunci

Melibatkan pihak-pihak kunci, termasuk *stakeholder* internal dan eksternal, dalam proses akuntansi keberlanjutan. Keterlibatan ini memastikan bahwa kepentingan berbagai pihak dipertimbangkan dan menciptakan transparansi yang diperlukan;

3. Pembentukan tim keberlanjutan

Membentuk tim atau departemen khusus yang fokus pada akuntansi keberlanjutan. Tim ini dapat membantu dalam pengumpulan data, penyusunan laporan keberlanjutan, serta merancang dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan;

4. Penerapan standar dan kerangka kerja

Mengadopsi standar dan kerangka kerja keberlanjutan yang diakui secara global, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB).

Hal ini membantu menyajikan informasi dengan konsistensi dan dapat dibandingkan;

5. Edukasi dan pelatihan

Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi staf dan manajemen terkait dengan konsep dan praktik akuntansi keberlanjutan. Pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi dan kualitas pelaporan;

6. Teknologi dan inovasi

Menggunakan teknologi dan inovasi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitika data, untuk meningkatkan kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan secara lebih efisien;

7. Audit dan verifikasi independen

Melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit dan verifikasi independen terhadap laporan keberlanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi yang disajikan;

8. Pengukuran dampak sosial dan lingkungan

Mengembangkan metrik dan indikator yang relevan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Pengukuran ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan;

9. Menyelenggarakan program CSR yang berdampak

Fokus pada program CSR yang sesuai dengan bisnis dan memberikan dampak positif, dengan melibatkan masyarakat lokal, berinvestasi dalam proyek-proyek keberlanjutan yang relevan, dan lakukan pelaporan transparan tentang kontribusi CSR.

Implementasi strategi dan solusi ini akan membantu menciptakan sistem akuntansi yang lebih berkelanjutan, mencapai tujuan keberlanjutan, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui integrasi strategis dan solusi teknologi, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan usaha dan berkontribusi pada perubahan positif dalam lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kesenambungan bisnis

dan keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga peluang untuk pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan.

Untuk meraih potensi penuh dari praktik akuntansi keberlanjutan, perusahaan dapat melihat peluang yang muncul di masa mendatang. Peluang akuntansi keberlanjutan di masa mendatang melibatkan beberapa aspek penting antara lain:

1. Inovasi teknologi dalam pelaporan

Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* dapat menghadirkan solusi untuk mengatasi tantangan pelaporan keberlanjutan. Otomatisasi proses ini dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan, sambil memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi kepada pemangku kepentingan;

2. Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan

Pentingnya mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis tidak bisa diabaikan. Perusahaan yang mampu menyelaraskan tujuan keuangan jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan akan mendapatkan keunggulan kompetitif;

3. Keterlibatan pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan yang lebih aktif dapat menjadi pendorong positif untuk perusahaan. Keterlibatan yang meningkat dari pelanggan, investor, dan masyarakat dapat memberikan insentif tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan praktik keberlanjutan mereka.

Dengan menggabungkan implementasi strategi dan solusi praktik akuntansi keberlanjutan dengan memanfaatkan peluang di masa mendatang, perusahaan dapat menjadi agen perubahan positif dan meraih keberlanjutan yang lebih baik dalam segala aspek.

Dengan demikian, implementasi strategi dan solusi dalam praktik akuntansi keberlanjutan merupakan langkah kritis menuju pencapaian tujuan keberlanjutan dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui integrasi

teknologi dan strategi berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya berkelanjutan dari segi ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat (Rusdianti & Sopanah, 2023). Kestinambungan bisnis, dalam konteks ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi peluang untuk pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan. Dengan memandang ke depan, perusahaan perlu memanfaatkan peluang yang muncul di masa mendatang, terutama melalui inovasi teknologi dalam pelaporan, integrasi akuntansi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan. Inovasi, integrasi, dan keterlibatan ini akan menjadi fondasi kuat untuk membangun sistem akuntansi keberlanjutan yang efektif, mampu menanggapi tantangan, dan menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan dalam era bisnis yang selalu berkembang.

C. Kesimpulan

Praktik akuntansi keberlanjutan menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan secara holistik. Sebagai konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan dan produktivitas untuk mendukung generasi saat ini dan masa yang akan datang, akuntansi keberlanjutan menjadi instrumen yang meresapi setiap aspek proses akuntansi. Proses ini melibatkan pencatatan, pengukuran, pengakuan, hingga pengungkapan, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam konteks pelaporan akuntansi, laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting yang merinci dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasional perusahaan. Laporan ini tidak hanya menjadi alat konkrit untuk mengukur kinerja organisasi dalam aspek-aspek tersebut, tetapi juga sebagai sarana komunikasi kepada pihak eksternal. GRI dan SASB, sebagai dua inisiatif utama dalam standar pelaporan keberlanjutan global, memberikan kerangka kerja yang membantu memastikan konsistensi dan kredibilitas dalam

penyusunan laporan. Tantangan dihadapi oleh akuntansi keberlanjutan seperti kurangnya konsistensi dan standarisasi, ketidakpastian perubahan regulasi, dan kompleksitas rantai pasokan global, menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik. Pandemi COVID-19 telah memperkenalkan tantangan baru, seperti ketahanan pelaporan, ketidakpastian ekonomi, dan penguatan tren ESG.

Namun, untuk mengatasi tantangan ini, strategi dan solusi yang terintegrasi dan inovatif perlu diadopsi. Integrasi teknologi dalam pelaporan, pengambilan keputusan berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan aktif menjadi kunci dalam meraih potensi penuh praktik akuntansi keberlanjutan di masa mendatang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan bukan hanya dapat memastikan keberlanjutan bisnis tetapi juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan bukan hanya sebuah tanggung jawab moral, melainkan peluang untuk pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan, menciptakan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan : Suatu Pengantar* (Vol. 1). UI Publishing.
- Aziza, W. Q. A., & Sukoharsono, E. G. (2021). Evolusi Akuntansi Keberlanjutan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5371-5388. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4376>
- Khafid, M., & Mulyaningsih. (2015). Kontribusi Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(3), 340-359. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i3.129>
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance: Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *IJEBD International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5(3), 581-589. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1857>
- Rusdianti, I. S., & Sopanah, A. (2023). *Mengenal Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopanah, A., Hasan, k., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas Publik Organisasi Nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*. UB Press.
- Wandira, A., Fitriani, D., Fauzi, E. M., & Hotimah, O. (2023). Strategi Negara Kawasan Asia Tenggara dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *GEOGRAPHIA : Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 4(2), 132-143. <https://doi.org/10.53682/gjppg.v4i2.7657>

TENTANG PENULIS

Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.

Institut Teknologi dan bisnis Widya gama lumajang



Penulis mengawali karir menjadi dosen pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober setelah berhasil menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi Universitas Negeri Jember di tahun 2022 dengan predikat Cumlaude. Menyelesaikan Program S1 Akuntansi di STIE Widyagama Lumajang Tahun 2018. Motivasi Imanita yaitu menuangkan ide, berbagi ilmu dan berkontribusi dalam kebermanfaatan karya tulis

akuntansi. Imanita juga berkolaborasi dalam penyusunan buku ajar, bunga rampai, buku monograf dan beberapa buku antologi.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202441324, 24 Mei 2024

Pencipta
Nama : **Grace Tianna Solovida, Bambang Arianto dkk**
Alamat : Perum Griya Tria Indah II/28 RT 007/RW 024, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50272, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50272

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Grace Tianna Solovida, Bambang Arianto dkk**
Alamat : Perum Griya Tria Indah II/28 RT 007/RW 024, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50272, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50272

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Akuntansi Keberlanjutan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Mei 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000616680

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

dan
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAHII
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.